



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERKEMBANGAN KARTUN POLITIK DI AUSTRALIA DAN
ANALISISNYA TERHADAP HUBUNGAN AUSTRALIA-
INDONESIA TERKAIT ISU TIMOR TIMUR 1974-2002**

SKRIPSI

**DEVI YULIA
0705040088**

**FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA
PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH
DEPOK
JULI 2010**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERKEMBANGAN KARTUN POLITIK DI AUSTRALIA DAN
ANALISISNYA TERHADAP HUBUNGAN AUSTRALIA-
INDONESIA TERKAIT ISU TIMOR TIMUR 1974-2002**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Humaniora**

**DEVI YULIA
0705040088**

**FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA
PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH
DEPOK
JULI 2010**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Devi Yulia
NPM : 0705040088
Tanda Tangan :
Tanggal : 19 Juli 2010



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang diajukan oleh :
Nama : Devi Yulia
NPM : 0705040088
Program Studi : Ilmu Sejarah
Judul : Perkembangan Kartun Politik Di Australia Dan
Analisisnya Terhadap Hubungan Australia-
Indonesia Terkait Isu Timor Timur 1974-2002

Ini telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Humaniora pada Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Wardiningsih., S.S.,M.A.,Ph.D. ()
Pembaca : Agus Setiawan., S.S., M.Si. ()
Penguji : Dr. Yuda B. Tangkilisan., S.S., M.Hum. ()

Ditetapkan di : Universitas Indonesia, Depok.

Tanggal : 19 Juli 2010

Oleh

Dekan
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya
Universitas Indonesia

Dr. Bambang Wibawarta
NIP. 19651023. 199003.1002

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Humaniora Jurusan Ilmu Sejarah Pengutamaan Australia pada Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Wardiningsih. S.S.,M.A.,Ph.D. selaku pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, pikiran, dan kesabarannya untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini. Saya juga berterima kasih kepada beliau atas ilmu yang telah berikan selama saya mengikuti kuliah di Ilmu Sejarah FIB-UI
2. Untuk Mas Kresno Brahmantyo, Mas Yuda, Mas Agus, Mas Maman, Mba Eri, dan seluruh staf pengajar Jurusan Ilmu Sejarah yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, saya ucapkan terima kasih karena telah memberikan bantuan, dukungan selama proses pengerjaan skripsi ini, dan untuk ilmu yang telah diberikan selama saya mengikuti kuliah di Ilmu Sejarah FIB-UI
3. Kepada staf Perpustakaan FISIP UI, Perpustakaan FIB UI, Perpustakaan Pusat UI, Perpustakaan Utan Kayu, Perpustakaan Institut Kesenian Jakarta (IKJ), dan Perpustakaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), saya ucapkan terima kasih atas bantuannya.
4. Untuk orang tua saya tercinta, yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil, doa, pengertian dan kesabarannya selama proses studi saya di Jurusan Ilmu Sejarah FIB-UI (Maaf ya ma, pa, bila selama proses studi saya telah banyak mengecewakan). Untuk kakakku tersayang, terima kasih atas segala dukungan, semangat, dan pengertiannya. (terima kasih atas suplai makanan dan perawatan ikan mas koki saya, ayo semangat juga skripsinya...^o^/), serta untuk Tiara,

Cello, Sheila, dan BarBur yang selalu menyemangati dan menemani saya selama proses penulisan skripsi ini.

5. Terima kasih untuk teman-teman kajian Australia, Adinda Fathin, Agung Prayogi, Bayu Kusuma Yuda, Harry Darmawan, dan Rifki Agung untuk tiga tahun proses kuliah yang menyenangkan, unforgettable, dan juga dukungan kepada saya selama proses penulisan (semoga kita bisa terus menjaga silaturahmi yaaa....). Tidak lupa untuk Sejarah angkatan 2006 kajian Australia, Ahmad Dedi, Amalia, dan Ratna Laurentina untuk segala dukungan dan semangat yang diberikan.
6. Kepada teman-teman angkatan 2005: Ayuningtyas, Dita Nurdayati, Friska Indah K, Nadia Paramitha, Nia Tendean, Riana Agustini, Shanty lady, Sri Pujianti, saya ucapkan terima kasih atas dukungan, semangat, dan pertemanan yang indah selama lima tahun (semoga kita tetap berteman yaa....). Untuk Sejarah angkatan 2006, Arifanti dan Dina Pangestu, terima kasih atas segala informasi yang berkaitan dengan skripsi.
7. Untuk sahabat-sahabatku, Rendi Ahmad, Fajar, Fany, dan Irul. Terima kasih atas persahabatan yang selama ini tetap terjalin dan semoga tidak lekang oleh waktu.

Akhir kata, saya berharap Allah swt berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang membantu. Semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, 19 Juli 2010

Devi Yulia

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Devi Yulia
NPM : 0705040088
Program Studi : Ilmu Sejarah
Departemen : Sejarah
Fakultas : Ilmu Pengetahuan Budaya
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-Exklusif Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Perkembangan Kartun Politik Di Australia Dan Analisisnya Terhadap Hubungan Australia-Indonesia Terkait Isu Timor Timur 1974-2002

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

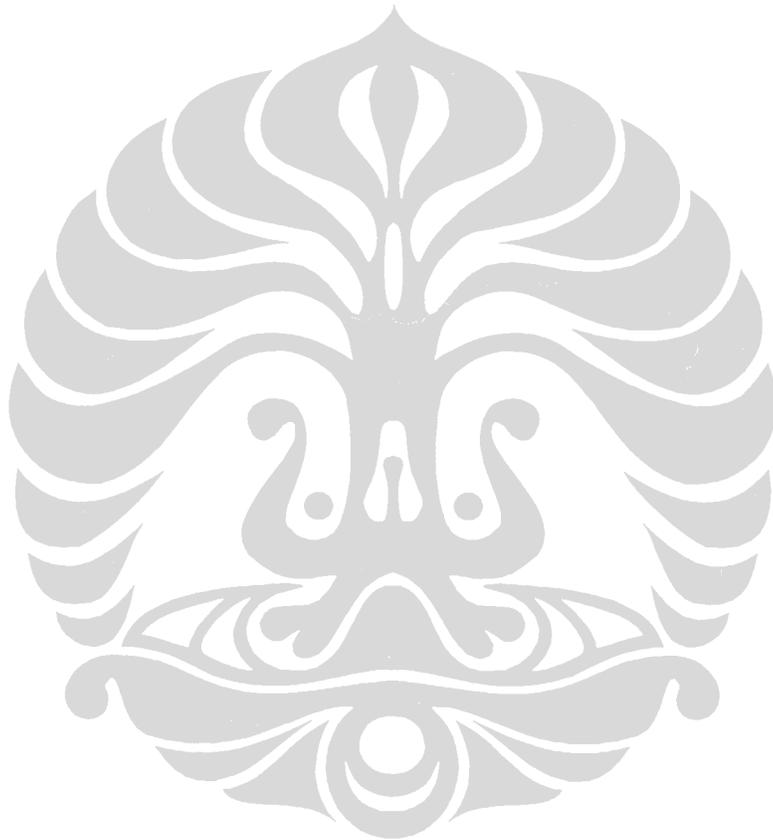
Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 19 Juli 2010
Yang menyatakan

Devi Yulia

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR SINGKATAN.....	xii
GLOSSARIUM.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
I. PENDAHULUAN.....	1
I. 1. Latar Belakang.....	1
I. 2. Perumusan Masalah.....	7
I. 3. Tujuan Penelitian.....	7
I. 4. Ruang Lingkup Masalah.....	8
I. 5. Metode Penelitian.....	8
I. 6. Tinjauan Sumber.....	12
I. 7. Sistematika Penulisan.....	13
II. PERKEMBANGAN KARTUN POLITIK DI AUSTRALIA.....	15
II. 1. Perkembangan Kartun politik di Australia.....	18
II. 2. Fungsi Dan Pengaruh Kartun Politik Di Australia.....	24
II. 3. Kartunis Australia.....	26
a. Will Dyson.....	29
b. Peter Nicholson.....	32
c. Bruce Petty.....	35
III. ANALISIS HUBUNGAN AUSTRALIA-INDONESIA TERKAIT ISU TIMOR TIMUR 1974-2002 DALAM KARTUN POLITIK AUSTRALIA.....	37
III.1. Proses Integrasi Timor Timur (1974-1976).....	40
III. 2. Masa Integrasi Timor Timur (1976-1999).....	55
III. 3. Menuju Referendum Di Timor Timur (1999-2002).....	67
IV. PERUBAHAN KEBIJAKAN PEMERINTAHAN AUSTRALIA TERHADAP INDONESIA TERKAIT ISU TIMOR TIMUR DALAM KARTUN POLITIK	72
IV. 1. Faktor-Faktor Penentu Kebijakan Luar Negeri Australia.....	72
IV.1.1. Faktor Internal.....	73
IV.1.2. Faktor Eksternal.....	77
IV. 2. Dampak Perubahan Kebijakan Luar Negeri Australia.....	81

V. KESIMPULAN.....	84
VI. DAFTAR PUSTAKA.....	87
VII. LAMPIRAN	

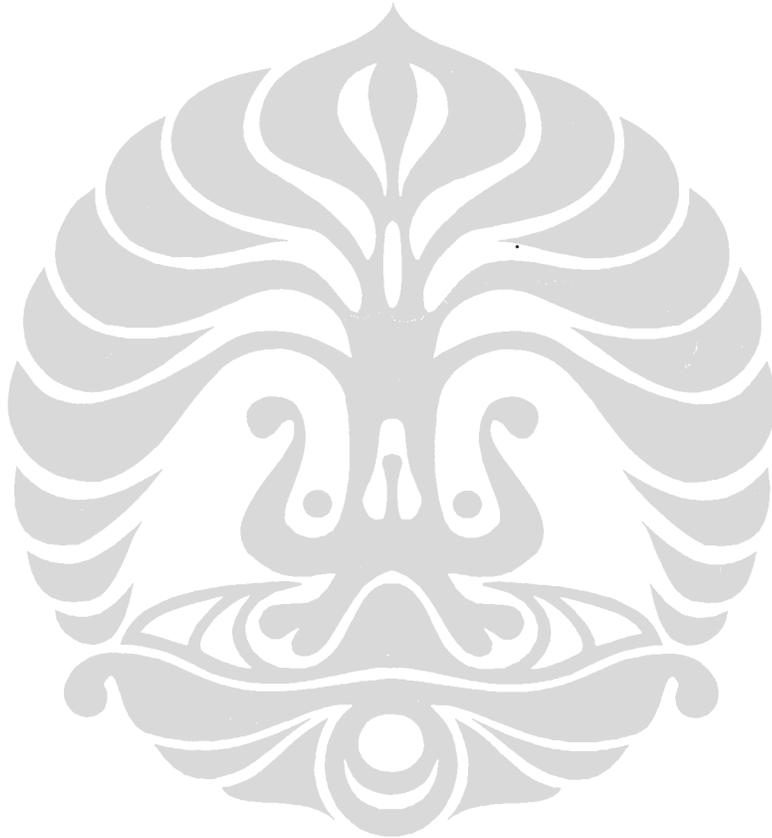


DAFTAR SINGKATAN

ABC	=	Australian Broadcasting Corporation
ABRI	=	Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
ACA	=	Australian Cartoonists' Association / Asosiasi Kartunis Australia
ADF	=	Australia Defence Forces / Angkatan Bersenjata Australia
ADITLA	=	Associaçao Democratica da Integraçao de Timor Leste a Australia / Perkumpulan Demokrasi Integrasi Timor Leste-Australia
AETD	=	All Inclusive East Timorese Dialogue
AITI	=	Associaçao Para a Integraçao de Timor na Indonesia/ Perkumpulan Integrasi Timor-Indonesia
ANP	=	Partai Aksi Nasional Rakyat
APMT	=	Associaçao Popular Monarquica Timorese
Apodeti	=	Associaçao Popular Democratica Timorese / Perkumpulan Rakyat Demokratik Timor
ASDT	=	Associaçao Social Democratica Timorese / Perkumpulan Sosial Demokratik Timor
Fretilin	=	Frente Revolucionaria de Timor Leste Independente / Front Revolusioner Kemerdekaan Timor Timur
FRELIMO	=	Frente de Liberacao de Mocambique
KOTA	=	Klibur Oan Timor Aswa'in
MFA	=	Movimento Das Forças Armada/Armed Forces Movement
MPLA	=	Movimento Popular de Libertação de Angola / Gerakan Kerakyatan bagi Pembebasan Angola
PCP	=	Portuguese Communist Party/ Partai Komunis Portugis.
PSTT	=	Pemerintahan Sementara Timor Timur
RUU	=	Rancangan Undang Undang
SAPT	=	Sociedade Agricola Patria E Trabalho
UDT	=	Uniao Democratica Timorese

GLOSSARIUM

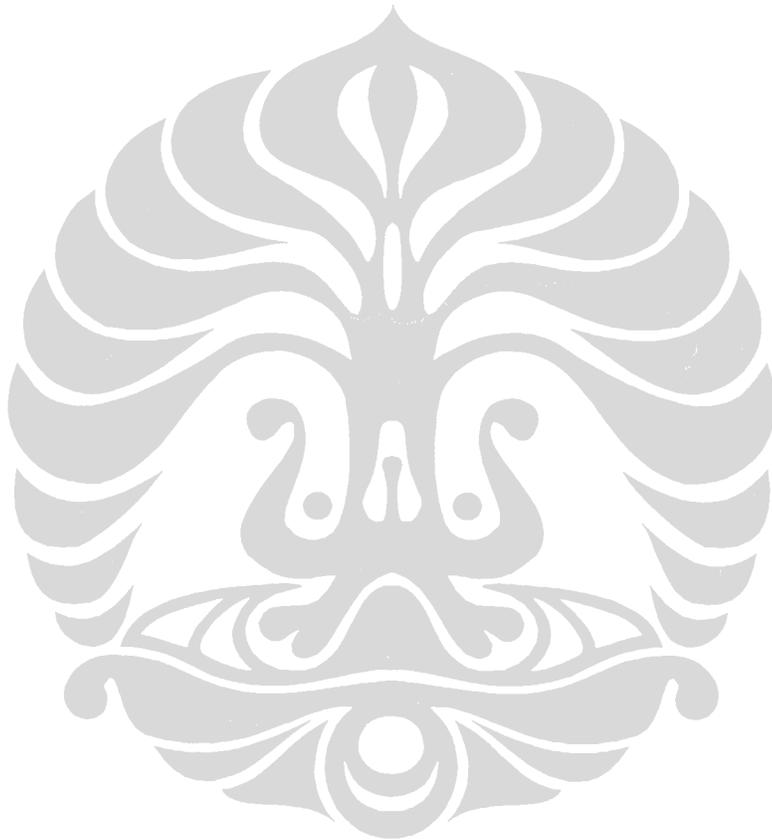
- De Jure* : adanya pengakuan dunia internasional secara hukum mengenai kemerdekaan suatu negara.
- De Facto* : pengakuan terhadap kemerdekaan suatu bangsa yang diberikan karena sesuai dengan kenyataan yang berlaku dan kondisi yang benar-benar terjadi.



DAFTAR GAMBAR

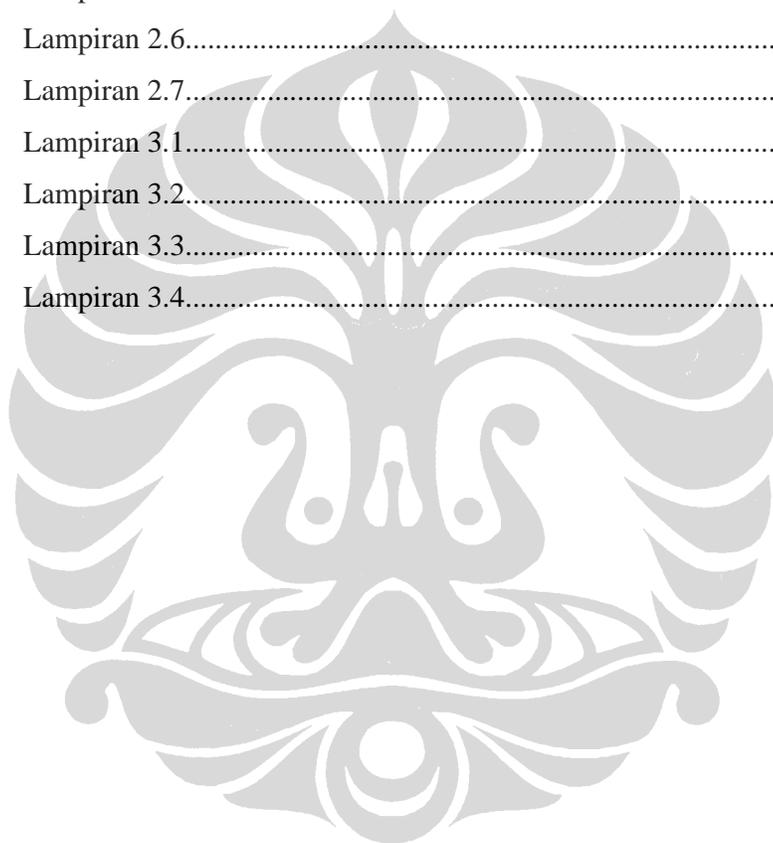
Gambar 3.1.	Geoff Hook, <i>Ahem....</i> 3 April 1975.....	48
Gambar 3.2	Geoff Hook, <i>East Timor Situation Begins,</i> 27 November 1975.....	50
Gambar 3.3	Geoff Hook, <i>Lest We Forget</i> 28 April 1976.....	53
Gambar 3.4	John Spooner, <i>Balibo Five</i>	54
Gambar 3.5.	Geoff Hook, <i>Disembarking</i> 7 Oktober 1976.....	56
Gambar 3.6	Geoff Hook, <i>Fraser Ignores The Past,</i> 11 Oktober 1976.....	57
Gambar 3.7.	Peter Nicholson, <i>East Timor Peacock Soeharto Tidy Neighbours,</i> 2 November 1979.....	58
Gambar 3.8.	Geoff Hook, <i>Moved?,</i> 12 Juli 1984.....	59
Gambar 3.9.	Geoff Hook, <i>The Santa Cruz Massacre,</i> 15 November 1991....	61
Gambar 3.10.	Linieberg.....	63
Gambar 3.11.	Peter Nicholson, <i>Blood Stains APEC Batik,</i> 17 November 1991.....	64
Gambar 3.12.	Geoff Hook. <i>Lest We Ignore,</i> 11 November 1996.....	66
Gambar 3.13.	Peter Nicholson, 22 Oktober 1998.....	67
Gambar 3.14	Bill Leak, 13 Januari 1999.....	68
Gambar 3.15.	Ian Sharpe, <i>East Timor Self Determination,</i> 13 Januari 1999.....	70
Gambar 3.16.	Peter Nicholson, 13 Februari 1999.....	71
Gambar 4.1.	Peter Nicholson, <i>Keating Kisses Soeharto's Boots,</i> 7 Oktober 1999.....	74
Gambar 4.2.	Geoff Hook, <i>Draw</i>	79

Gambar 4.3.	Peter Nicholson, <i>Burial of Australia's Policy of 25 Years</i> , 30 Januari 1999.....	80
Gambar 4.4.	Peter Nicholson, 20 Januari 1999.....	82
Gambar 4.5.	Geoff Hook, <i>Peacekeeping Takes Its Toll</i> 24 November 1999.....	83



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.1.....	93
Lampiran 2.1.....	94
Lampiran 2.2.....	95
Lampiran 2.3.....	96
Lampiran 2.4.....	97
Lampiran 2.5.....	98
Lampiran 2.6.....	99
Lampiran 2.7.....	100
Lampiran 3.1.....	101
Lampiran 3.2.....	102
Lampiran 3.3.....	103
Lampiran 3.4.....	104



ABSTRAK

Nama : Devi Yulia
Program Studi : Ilmu Sejarah
Judul : Perkembangan Kartun Politik Di Australia Dan Analisisnya
Terhadap Hubungan Australia-Indonesia Terkait Isu Timor
Timur (1974-2002)

Skripsi ini membahas mengenai perkembangan kartun politik di Australia dan analisisnya terhadap hubungan Australia-Indonesia terkait isu Timor Timur 1974-2002. Pemilihan judul tersebut dengan alasan bahwa kartun politik merupakan salah satu sarana bagi masyarakat Australia untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai kebijakan pemerintahannya, sehingga dalam hubungan Australia-Indonesia seringkali terdapat kartun politik yang menggambarkan kebijakan Pemerintah Australia terhadap Indonesia terkait dengan isu Timor Timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah yang terdiri dari empat tahapan yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian ini adalah bahwa kartun politik di Australia merupakan sebuah senjata untuk mengkritisi kebijakan Pemerintah Australia yang dalam hal ini mengenai isu Timor Timur, kartun politik juga bisa merepresentasikan bagaimana pandangan masyarakat Australia terhadap kebijakan Pemerintah Australia terkait Timor Timur.

Kata kunci : Kartun politik, Australia, Timor Timur.

ABSTRACT

Name : Devi Yulia
Study Program : History
Title : Australia Political Cartoons Development and Its Analysis
toward Australia-Indonesia Relations Related To East Timor
Issue 1974-2002

The focus of this study is about Australian political cartoons developments and its analysis toward Australia-Indonesia relationship related to East Timor issues. The reason for choosing this topic is because political cartoon is one of Australian political traditions for the Australians to express their opinions about government policies. In Australia-Indonesia relationship, there was a lot of political cartoon. One of the topics for Australia political cartoon is East Timor issue. This research using historical methods which is consist of four steps, heuristic, critic, interpretation, and historiography. The researcher suggests that Australia political cartoon analysis toward Australia-Indonesia relation is necessary because with political cartoon we can see how the Australians see about their government policies toward East Timor Issue.

Keywords : Political cartoons, Australia, East Timor

BAB I

PENDAHULUAN

I. 1. Latar Belakang Masalah

Hubungan bilateral antara Australia dan Indonesia telah dimulai sejak tahun 1945. Hubungan antara kedua negara yang sudah terjalin cukup panjang ini tidak terlepas dari berbagai masalah, tercatat beberapa peristiwa atau isu yang pernah membuat hubungan kedua negara ini berfluktuasi diantaranya adalah isu Irian Barat pada tahun 1950, isu Konfrontasi Indonesia-Malaysia pada tahun 1961, isu Timor-Timur pada tahun 1974, dan tulisan David Jenkins yang dimuat di dalam surat kabar *Sydney Morning Herald* Australia pada tanggal 10 April 1986.

Beragam masalah yang ditemui oleh kedua negara ini, dikarenakan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut adalah perbedaan latar belakang sejarah dan budaya serta prioritas-prioritas kebijakan politik dalam dan luar negeri masing-masing negara. Australia yang memiliki budaya politik warisan model *Westminster* dari Kerajaan Inggris tentunya memiliki perbedaan dalam menjalankan kebijakannya dengan Indonesia yang menerapkan Demokrasi sebagai budaya politiknya.¹

Selain itu dalam mengambil kebijakan politik dalam dan luar negeri, Australia memiliki dua faktor mendasar yaitu letak geografi Australia dan tradisi ke-Inggris.² Faktor pertama adalah letak geografis Australia, yang pada bagian timur dikelilingi oleh Samudera Pasifik dan bagian baratnya dikelilingi oleh

¹ Sistem Pemerintahan *Westminster* yang diterapkan oleh Australia adalah suatu sistem pemerintahan yang kekuasaan tertinggi eksekutif dipegang oleh raja/ratu, namun peran raja/ratu hanya bersifat simbolik. Kekuasaan pemerintah dipegang oleh Perdana Menteri, Perdana Menteri mengangkat menteri-menteri yang bertanggung jawab kepada Parlemen. Parlemen di dalam sistem pemerintahan Westminster terdiri dari dua majelis yaitu *House of Representative* dan Senat, kedua majelis ini merupakan pusat segala kegiatan politik Australia dan di kedua majelis inilah semua keputusan yang menyangkut kehidupan masyarakat, pemerintahan, dan kenegaraan dibuat. Sistem demokrasi yang diterapkan oleh Indonesia, adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Pemegang kekuasaan di dalam sistem Demokrasi adalah Presiden sebagai lembaga eksekutif yang dipilih melalui Pemilihan Umum, presiden kemudian mengangkat menteri-menterinya yang bertanggung jawab kepada Presiden. Zulkifli Hamid. *Sistem Politik Australia*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 1999. hlm 50.

² Hilman Adil. *Hubungan Australia Dengan Indonesia 1945-1962*. Jakarta: Djambatan. 1993. hlm. 6-12.

Samudera India, perbatasan ini tentu tidak memberikan kekhawatiran bagi Australia. Akan tetapi, pada bagian utara Australia yang membentuk garis perbatasan dengan Kepulauan Indonesia, cukup memberikan kekhawatiran bagi Australia.³

Sabuk utara ini membentuk sebuah kunci strategis bagi pertahanan Australia. Pulau-pulau yang dapat dipandang sebagai sebuah pagar penangkal bagi Australia, juga dinilai sebagai garis lemah dalam pertahanan negeri itu. Australia khawatir bila pulau-pulau tersebut jatuh ke tangan kekuasaan yang bermusuhan, maka keberadaan Australia juga ikut terancam. Kekhawatiran ini dikarenakan oleh pemikiran Australia bahwa keberadaan Australia ditentukan oleh siapa yang akan menguasai pulau-pulau yang berbatasan dengan sebelah utara Australia. Oleh karena itu, Australia berpikir bahwa tidak satu pun kekuasaan asing yang bermusuhan bisa dibiarkan berada di dekat Australia.⁴

Faktor kedua adalah adanya tradisi ke-Inggris yang dimiliki oleh masyarakat Australia. Hadirnya tradisi tersebut di masyarakat Australia, karena adanya latar belakang sejarah bahwa Australia merupakan bekas koloni Inggris dan memiliki banyak warga negara yang berasal dari Inggris. Selain itu, keterikatan dengan Inggris dari segi keamanan, perdagangan, hubungan-hubungan luar negeri dan sistem pendidikan yang beracuan atau diterapkan di Inggris, ikut membuat jati diri Australia kuat akan unsur Inggris.⁵ Sikap Australia yang menjaga jarak dengan negara-negara Asia tetangganya dan lebih memilih berdekatan dengan Inggris juga disebabkan oleh rasa bahwa dirinya lebih tinggi dari bangsa-bangsa Asia karena unsur keturunan Inggris dan berkulit putih.

Selain faktor-faktor perbedaan budaya politik dan prioritas-prioritas kebijakan dalam dan luar negeri yang berbeda, terdapat faktor lain yang juga memiliki peranan penting di dalam terciptanya hubungan baik atau buruk antara Australia-Indonesia. Salah satunya adalah faktor media massa, khususnya media massa Australia. Media massa sebagai sebuah institusi memiliki peluang yang cukup besar dalam melakukan komunikasi politik, hal ini disebabkan media

³ *Ibid.*

⁴ Lebih lengkapnya baca Hilman Adil, *ibid*, hlm. 6-9.

⁵ *Ibid*, hlm. 10.

massa tidak hanya sebagai sebuah institusi tetapi juga merupakan saluran komunikasi politik.⁶

Media massa dapat melakukan komunikasi politik lewat beberapa saluran. Untuk surat kabar hal ini dapat dilakukan melalui kolom editorial atau tajuk rencana, kolom opini, pemilihan dan penekanan berita yang akan ditampilkan serta lewat kartun politik yang di beberapa media massa menjadi sebuah kartun editorial.

Kartun politik di dalam media massa, dapat memberikan pandangan baru mengenai kondisi politik, ekonomi, sosial, bahkan olah raga di sebuah negara. Menurut kartunis Mochamad Fauzie, kartun editorial dapat dijadikan media penyampaian gagasan dan pikiran tentang persoalan politik yang terjadi di masyarakat.⁷

Masyarakat Australia sebenarnya tidak terlalu memahami proses politik negaranya, oleh karena itu pemerintah Australia sebisa mungkin membuat pemberitaan mengenai politik untuk masyarakatnya. Akan tetapi, tidak semua orang dapat menonton debat parlemen yang diberitakan oleh ABC, atau mendengarkan radio, atau membaca koran dengan seksama. Pemberitaan mengenai keadaan politik di Australia digambarkan melalui kartun politik karena seseorang hanya perlu melihat kartun tanpa perlu membaca dengan seksama.

Peranan media massa Australia yang cukup signifikan dalam menyampaikan informasi khususnya keadaan politik di Australia kepada masyarakat Australia, menyebabkan tercipta suatu hubungan antara media massa dengan politisi Australia sangat erat. Media massa membutuhkan politisi sebagai sumber berita dan politisi pun membutuhkan media massa sebagai sarana untuk menyampaikan pandangan politiknya, propaganda, bahkan untuk menarik dukungan pemilih ketika pemilihan umum berlangsung.⁸

Kartun politik di Australia, tidak hanya menggambarkan kartun-kartun politik yang anti-pemerintahan tetapi juga menggambarkan sisi kehidupan di

⁶ Dan nimmo. *Komunikasi Politik, Komunikator, Pesan, Dan Media*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 1993. hlm 166-167.

⁷ Brotoatmodko et al. *Demokrasi Dan Ham Dalam Kartun Pers*. (Cet 1). Jakarta: Institut ECATA-INPI-PACT. 1997. hlm. 34.

⁸ Zulkifli Hamid. *Sistem Politik Australia*. Bandung: LIP-FISIP-UI, dan PT. Remaja Rosdakarya. 1999. hlm. 326.

dalam masyarakat, kebijakan-kebijakan pemerintah, hubungan kerjasama baik dalam bidang politik, ekonomi, dan budaya antara Australia dengan negara lainnya seperti Inggris, Amerika, dan negara tetangga terdekatnya, Indonesia.

Dalam 65 tahun hubungan antara Australia-Indonesia telah tercatat beberapa kartun politik Australia yang menggambarkan hubungan kedua negara. Salah satu contohnya adalah kartun *Things Are Happening Next Door*,⁹ kartun yang menggambarkan tentang Indonesia yang berdiri sebagai sebuah negara merdeka. Kartun tersebut menggambarkan bahwa sebagai negara yang merdeka Indonesia menghadapi banyak tantangan diantaranya adalah Komunisme dan adanya kekuatan negara-negara barat. Di sisi lain, Australia, yang juga dapat dikatakan sebagai negara yang baru memiliki pengalaman untuk berdiri sendiri, digambarkan menyambut antusias kemerdekaan negara tetangganya.

Indonesia yang pada masa itu sedang memperjuangkan kemerdekaannya mendapatkan rasa simpati dari Pemerintah Australia, namun Pemerintah Australia masih enggan untuk terlibat jauh ke dalam problem Indonesia.¹⁰ Australia merasa bahwa negaranya harus berusaha menghindari setiap keterlibatan dalam masalah kolonial apa saja di Indonesia. Hal ini dinyatakan oleh Perdana Menteri J. B. Chifley di depan parlemen pada tanggal 29 Agustus 1945 :

“Prinsip Umum yang dilaksanakan oleh Pemerintah dalam hal yang menyangkut masalah-masalah sipil ialah, bahwa kecuali di Papua dan di daerah-daerah kemandatan Australia, Pemerintah akan berusaha menahan diri dari tanggung jawab terhadap masalah-masalah sipil dan pendudukan kembali sebuah kawasan...Kita melihat Pemerintah-Pemerintah yang memperoleh hak kedaulatan di kawasannya masing-masing untuk mengambil alih tanggung jawab penuh ke tangan mereka setelah periode awal berlalu”.¹¹

Berbeda dengan sikap Pemerintah Australia, kaum buruh galangan kapal Australia menunjukkan sikap mendukung kemerdekaan Indonesia. Dukungan ini dilakukan dengan menolak memberikan izin pemuatan kapal-kapal Belanda di Pelabuhan Australia, kapal-kapal Belanda tersebut diyakini membawa persenjataan yang akan digunakan oleh Tentara-Tentara Belanda untuk kembali

⁹ Lihat lampiran 1.1.

¹⁰ Hilman Adil. *Hubungan Australia Dengan Indonesia 1945-1962*. Jakarta: Djambatan. 1993. hlm. 1.

¹¹ *Current Notes*, Vol. 16, Agustus-September 1945, dalam Hilman Adil, *ibid*, hlm. 33

menduduki Indonesia.¹² Pemogokan-pemogokan yang dilakukan oleh para buruh pelabuhan ini, menempatkan Pemerintah Australia ke dalam posisi yang sulit.

Hubungan kedua negara ini, berkembang lebih lanjut pada bulan Juli 1947, ketika Australia mulai memberikan peranannya terhadap Indonesia di dalam Komisi Jasa-Jasa Baik PBB dan juga melalui kebijakan-kebijakan di Dewan Keamanan yang mencerminkan suatu sikap pro-Indonesia.¹³ Pada bulan Desember, perubahan sikap Australia lebih terlihat dengan menjadi lebih vokal dalam menentang kependudukan Belanda di Indonesia dan menuntut penyerahan kedaulatan yang lebih cepat kepada Indonesia.¹⁴

Perubahan sikap Australia juga disebabkan oleh serangkaian peristiwa yang terjadi pada tahun 1941-1942, pada masa-masa ini merupakan titik yang menentukan bagi Australia untuk melihat kembali kebijakan luar negeri negaranya. Kejatuhan Singapura, Malaya, dan Hindia Belanda ke tangan Jepang, telah menunjukkan ketidakmampuan Inggris dalam menjamin keamanan Australia. Peristiwa-peristiwa ini memaksa Australia untuk menghadapi masalah hubungan luar negeri di luar konteks persemakmuran.¹⁵

Australia mulai menyatakan keinginannya untuk memiliki hubungan baik dengan Indonesia, keinginan tersebut dinyatakan oleh Pemerintahan Menzies pada tanggal 27 Desember 1949,¹⁶ bertepatan dengan pengakuan resmi Australia terhadap kemerdekaan Indonesia. Peristiwa ini memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam hubungan kedua negara terutama mengenai kebijakan-kebijakan luar negeri yang akan diambil oleh negara masing-masing pada masa depan.

Hubungan Australia-Indonesia yang telah dibina selama 65 tahun, tidak hanya memiliki masa-masa indah tetapi juga seringkali mengalami masa-masa renggang. Salah satu isu yang mendapatkan perhatian cukup banyak baik dari pemerintahan maupun rakyat Australia adalah isu Timor-Timur, maka tak jarang media massa Australia terus mengangkat isu ini sebagai topik utamanya.

¹² Rupert Lockwood, *Armada Hitam*, Jakarta:Gunung Agung, 1975. hlm. 156.

¹³ *Op. Cit.*

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Hilman Adil. *Kebijaksanaan Australia Terhadap Indonesia 1962-1966: Studi Kasus Keterlibatan Australia Dalam Konflik Bilateral*. Jakarta : CSIS. 1997. Hlm. 12

Sebelum tahun 1974, Timor Timur hanya mendapat perhatian kecil baik dari Pemerintah Australia maupun masyarakatnya. Perhatian yang ditujukan untuk Timor Timur pun, hanya pada letaknya yang berdekatan dengan Australia dan berhubungan dengan masalah Pertahanan dan keamanan Australia. Adanya perhatian Australia terhadap Timor Timur, menekankan bahwa diperlukannya pemerintah yang stabil di Timor Timur yaitu Portugis.

Perhatian Australia mulai berubah pada tahun 1974, ketika terjadi perubahan situasi politik di Portugis yang mempengaruhi koloni-koloninya. Melihat perubahan yang ada di Timor Timur, Pemerintah Australia mulai memberikan perhatiannya tidak hanya sebatas mengenai letak Timor Timur tetapi juga permasalahan di negara Timor Timur pun ikut diperhatikan.

Timor Timur menjadi menarik perhatian masyarakat Australia, setelah dipublikasikan kebijakan Pemerintah Partai Buruh Australia di bawah pimpinan Whitlam. Kebijakan Whitlam mendapatkan kritik tidak hanya dari kalangan Pemerintah Australia tetapi juga dari masyarakat Australia sendiri. Isu Timor Timur menjadi bagian dari dasar pertimbangan bagi Australia khususnya Perdana Menteri selanjutnya setelah Whitlam, seperti yang dinyatakan oleh Gareth Evans bahwa keputusan Whitlam untuk mengambil peranan terhadap proses dekolonisasi Timor Timur, telah berdampak pada pengambilan kebijakan pemerintah selanjutnya. Keputusan Whitlam mengenai Timor Timur juga telah menjadi sumber dari permasalahan yang selama ini mengganggu hubungan Australia-Indonesia.¹⁷

Isu Timor Timur yang seringkali menjadi topik yang hangat untuk dibicarakan, tak jarang pula ditemui pada kartun-kartun politik di Australia yang menggambarkan bagaimana kebijakan Australia terhadap Indonesia terkait isu Timor Timur. Seringkali kartun politik yang digambarkan oleh para kartunis Australia mengenai kebijakan Australia terkait isu Timor Timur bersifat anti-pemerintah dan menggambarkan sikap ambivalen pada Pemerintah Australia bila berkaitan dengan pengambilan kebijakan terkait Timor Timur.

Sebelumnya belum terdapat tulisan serupa baik berupa skripsi ataupun tesis mengenai analisis kartun politik Australia terhadap hubungan Australia-

¹⁷ Gareth Evans dan Bruce Grant, *Australia's Foreign Relation In The World Of 1990's*, Australia: Melbourne University Press. 1991. hlm 27.

Indonesia terkait isu Timor Timur 1974-2002. Oleh sebab itu, penulis akan membahas mengenai kartun politik di Australia yang menggambarkan kebijakan Pemerintah Australia dan bagaimana perubahan-perubahan kebijakan Pemerintah dalam kartun politik Australia terkait isu Timor Timur.

I. 2. Perumusan Masalah

Skripsi ini mengkaji masalah kartun politik Australia yang merupakan salah satu wadah untuk memberikan pengetahuan politik bagi masyarakat Australia dan analisisnya terhadap hubungan Australia-Indonesia terkait isu Timor Timur 1974-2002. Untuk menjawab permasalahan tersebut, diajukan beberapa pertanyaan penelitian, seperti:

1. Bagaimana perkembangan kartun politik Australia? Apa fungsi dan peranan kartun politik Australia?
2. Bagaimana hubungan bilateral Australia-Indonesia terkait Timor-Timur sejak tahun 1974 hingga tahun 2002 dalam kartun politik Australia?
3. Bagaimana gambaran kartun politik Australia terhadap perubahan-perubahan kebijakan Australia terhadap Indonesia terkait isu Timor Timur dalam kartun politik Australia?

I. 3. Tujuan Penelitian

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan kartun politik Australia dan analisisnya terhadap hubungan Australia-Indonesia terkait isu Timor Timur dari tahun 1974-2002. Tujuan lain dari penelitian ini adalah untuk melengkapi historiografi mengenai hubungan Australia-Indonesia terkait isu Timor Timur yang dapat dilihat melalui kartun politik Australia.

I. 4. Ruang Lingkup Masalah

Penulis membatasi ruang lingkup permasalahan dari tahun 1974-2002. Pemilihan tahun 1974, dikarenakan pada tahun tersebut terjadinya Revolusi Bunga di Portugis yang menyebabkan perubahan politik di wilayah jajahan Portugis tidak terkecuali Timor Timur. Perubahan ini membuat Pemerintahan Australia ikut mengambil peranan untuk mencapai kestabilan di wilayah tersebut, dengan adanya kunjungan Whitlam ke Indonesia pada September 1974. Kunjungan ini dimaksudkan untuk menyampaikan opsi Australia, bahwa sebaiknya Timor Timur masuk ke dalam wilayah Indonesia.

Penulisan akan diakhiri pada tahun 2002, karena pada tahun tersebut merupakan tahun terakhir Timor Timur menjadi bagian dari wilayah Indonesia. Hal ini dikarenakan oleh hasil referendum rakyat Timor Timur yang menginginkan Timor Timur menjadi sebuah negara yang merdeka.

I. 5. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode sejarah dan metode Barthes untuk menganalisis kartun politik Australia. Metode sejarah merupakan tahapan-tahapan dalam penulisan skripsi yang terdiri atas empat tahap, yaitu, heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.

Dalam tahapan pertama yaitu heuristik, penulis dapat mengungkapkan latar belakang dari penelitian yang akan dilakukan. Pada tahapan ini penulis mencari dan mengumpulkan sumber-sumber berupa sumber primer dan sumber sekunder. Adapun yang dapat dijadikan sebagai sumber-sumber primer di antaranya adalah dari Koran *Kompas*, *Sinar Harapan*, *Republika*, *The Jakarta Post*, *The Age Australia*, dan *The Herald Sun* serta sumber wawancara beberapa kartunis Australia dari Australia National Library. Selain sumber-sumber Primer, penulis juga menggunakan beberapa sumber sekunder seperti buku dari Susan Critchley dengan judul *Hubungan Australia dengan Indonesia: Faktor Geografi, Politik, dan Strategi Keamanan*; E.M. Andrews dengan judul *A History of Australian Foreign Policy*; Kristio Wahyono dengan judul *Sepuluh Tahun*

Tragedi Timtim: Timor Target. Dengan sumber-sumber sekunder ini, dapat diperoleh tambahan data untuk mengkaji permasalahan yang diajukan.

Setelah mendapatkan data-data yang relevan dengan tema penelitian yang sedang dilakukan, maka dilakukan pengujian terhadap data atau sumber-sumber sejarah tersebut. Tahap pengujian ini disebut dengan kritik. Tahap kritik yaitu, suatu tahap yang dilakukan untuk memperoleh fakta yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Tahap kritik terbagi menjadi dua, yaitu kritik eksternal dan kritik internal. Kritik eksternal atau otentisitas dilakukan dengan cara meneliti bentuk fisik dan sumber data bahan penulisan. Sementara kritik internal dilakukan dengan cara melakukan analisa dan membandingkan kesaksian dari berbagai sumber sehingga dapat diperoleh fakta sejarah yang terpercaya dan dapat digunakan dalam penelitian.

Tahap selanjutnya setelah melalui proses kritisasi adalah interpretasi, yaitu memberikan penilaian dan melakukan analisis terhadap fakta-fakta yang telah didapatkan. Fakta-fakta tersebut tidak semuanya dapat digunakan, karena hanya fakta-fakta yang setelah diinterpretasikan ternyata sesuai dan relevan yang dapat disusun menjadi kisah sejarah. Dalam proses interpretasi ini, juga akan diteliti mengenai faktor periodisasi dan cakupan wilayah.

Tahap terakhir adalah Historiografi, dalam tahap ini merupakan penghimpunan fakta-fakta yang telah diinterpretasikan ke dalam suatu rekonstruksi kembali berdasarkan fakta dengan urutan yang kronologis dan sistematis. Pada tahap ini, penulis akan melakukan rekonstruksi terhadap perkembangan kartun politik Australia dan juga analisisnya terhadap hubungan Australia-Indonesia terkait Timor-Timur.

Penulis juga menggunakan Metode Barthes untuk menganalisis kartun yang bertujuan untuk mengungkapkan makna tanda-tanda atau simbol-simbol yang ada. Dalam teknik Barthes untuk menganalisis suatu kartun politik diperlukannya lima elemen.¹⁸ Kelima elemen tersebut adalah konteks, konten, target, teknik, dan pesan.

¹⁸ Alex Sobur. *Semiotika Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003, hlm 133.

1. Konteks

Konteks merupakan elemen pertama untuk menganalisis sebuah kartun politik. Elemen ini biasanya menggambarkan suatu isu atau peristiwa yang menjadi latar belakang atau topik sebuah kartun politik. Konteks di dalam sebuah kartun politik tidak hanya terbatas pada peristiwa yang terjadi di dalam negeri saja tetapi juga bisa dikaitkan dengan peristiwa yang terjadi di dunia secara umum. Ketika pembaca kartun politik telah menemukan konteks secara umum di dalam sebuah kartun politik maka akan mudah untuk mulai menguraikan isi dari pesan yang diutarakan oleh para kartunis.

2. Konten

Elemen kedua untuk menganalisis kartun politik adalah elemen konten atau isi. Pada elemen ini isi dari kartun politik digambarkan secara lebih detail sehingga memberikan penggambaran yang lebih jelas mengenai peristiwa atau topik yang diangkat. Di tahap ini, pembaca sudah mulai memahami apa yang akan diutarakan oleh kartun politik.

3. Target

Elemen target merupakan salah satu poin penting dalam menganalisis dan menginterpretasikan sebuah kartun politik. Elemen ini berfungsi untuk mengidentifikasi target dari kartun politik yang biasanya bisa saja seorang tokoh, sebuah pemikiran, atau sebuah institusi. Walaupun demikian, di dalam sebuah kartun politik bisa saja memiliki target yang sama namun dalam penyampaian atau penggambarannya kepada pembaca terdapat adanya perbedaan.

4. Teknik

Pada umumnya, seorang kartunis menggunakan teknik persuasif dalam menggambarkan kartun politik. Terdapat beberapa teknik persuasif yang sering dipergunakan oleh seorang kartunis untuk dapat menyampaikan inti dari kartun politik, seperti simbolisasi, efek

berlebihan, pemberian label, analogi, dan ironi.¹⁹ Ketika sebuah kartun menggunakan teknik-teknik ini, maka inti yang ingin disampaikan oleh para kartunis semakin jelas terbaca oleh pembaca.

a. Simbolisasi. Para kartunis menggunakan objek sederhana atau simbol untuk memaparkan konsep atau idenya. Simbol-simbol yang terdapat di dalam sebuah kartun politik biasanya memiliki arti tersendiri dan mewakili suatu benda, peristiwa, atau seorang individu. Keefektifan sebuah simbol sangat tergantung pada penggambarannya yang mudah untuk dipahami oleh pembaca.

b. Efek berlebihan. Kartun politik tidak menggambarkan suatu peristiwa yang nyata secara harfiah, kartunis seringkali menggambarkan objek dari kartun politiknya secara berlebihan atau justru mengecilkannya. Efek ini juga sering digunakan untuk menekankan besarnya kekuasaan, kepentingan, atau bahaya terhadap suatu isu.

Efek berlebihan merupakan teknik utama yang diterapkan oleh kartunis, dan biasanya digunakan pada karikatur objeknya. Penggunaan karikatur merupakan bentuk dari distorsi atau penekanan terhadap suatu gambaran fisik dari seseorang. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran terhadap pembaca mengenai sosok yang berada di dalam kartun politik.

c. Label. Kartunis biasanya memberikan label pada objek atau individu pada sebuah kartun, hal ini dimaksudkan untuk memberikan kejelasan kepada pembaca makna apa atau mewakili apa objek atau individu tersebut. Pemberian label yang bermacam-macam bentuk ini juga perlu diperhatikan dalam menganalisis sebuah kartun politik.

d. Analogi. Analogi merupakan sebuah perbandingan antara dua hal yang berbeda, perbandingan ini dimaksudkan untuk membandingkan isu atau situasi yang hampir sama. Teknik ini digunakan oleh kartunis untuk memberikan pemahaman bagi para

¹⁹ http://lcweb2.loc.gov:8081/learn/features/political_cartoon/cag.html, Diunduh pada tanggal 3 Juni 2010, pukul 04.48 wib.

pembacanya mengenai suatu peristiwa serupa namun sedikit berbeda.

- e. Teknik terakhir adalah ironi. Teknik ini merupakan penggambaran antara peristiwa pada kenyataannya dan peristiwa yang seharusnya terjadi atau peristiwa yang diharapkan terjadi oleh para kartunis. Ironi dimaksudkan untuk mengekspresikan opini kartunis ke dalam suatu isu.

Kelima teknik persuasif ini merupakan teknik-teknik yang sering diterapkan oleh kartunis, namun perlu diingat bahwa tidak setiap kartun politik memiliki kelima unsur persuasif ini. Oleh karena itu, dalam menganalisis kartun politik, perlu dilakukan juga analisis mengenai teknik yang dipakai oleh kartunis.

5. Pesan

Elemen terakhir dalam proses menganalisis kartun politik adalah pesan yang tersirat di dalam kartun politik. Pesan dapat berupa sekumpulan gambar, kata-kata humor atau gabungan keduanya.²⁰ Pesan melalui sekumpulan gambar, umumnya dilakukan dengan melebih-lebihkan karakteristik unik dari seorang individu atau penekanan pada benda yang berhubungan dengannya seperti pakaian, ekspresi wajah, atau bahasa tubuh. Untuk penyampaian pesan melalui kata-kata, biasanya terdapat dalam bentuk judul, keterangan, name tag, balon, komentar, atau dialog.

Setelah dilakukannya tahapan-tahapan analisis di atas, maka kartun politik baru dapat diinterpretasikan. Akan tetapi, tetap diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis kartun politik terutama mengenai adanya prasangka-prasangka atau opini kartunis yang mungkin dapat ditemui pada sebuah kartun politik.

I. 6. Tinjauan Sumber

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan beberapa data yang didapat melalui penelitian kepustakaan. Data yang diperoleh terdiri dari dua jenis, yaitu

²⁰ Charles and Cynthia Hou, *The Art of Decoding Political Cartoons: A Teacher Guide*, (Vancouver: Moody's Lookout Press, 1998), h. 72.

sumber primer dan sumber sekunder. Sumber Primer yang diperoleh berupa dokumen-dokumen pemerintahan yang sezaman, tempat sumber-sumber tersebut ditemukan adalah Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, di tempat ini penulis menemukan koran-koran sezaman

Untuk sumber sekunder meliputi buku-buku yang terkait dengan topik penelitian, baik yang terkait secara luas maupun secara spesifik. Tempat sumber-sumber tersebut ditemukan adalah LIPI, di tempat ini penulis menemukan beberapa jurnal dan artikel seperti Jurnal “Ilmu Sosial Ilmu Politik”, Jurnal “Analisa”, Jurnal “ Australian Journal of International Affairs”, Artikel “Australian Outlook” dan Artikel “Analisis CSIS”. Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik diantaranya adalah E.M. Andrews dengan judul *A History of Australia Foreign Policy*. Adapun buku-buku yang merupakan koleksi pribadi penulis di antaranya adalah Hilman Adil dengan judul *Kebijaksanaan Australia Terhadap Indonesia 1962-1966: Studi Kasus Keterlibatan Australia dalam Konflik Bilateral*; Susan Critchley dengan judul *Hubungan Australia dengan Indonesia: Faktor Geografi, Politik, dan Strategi Keamanan*; Ferdi Tanoni dengan judulnya *Skandal Laut Timor: Sebuah Barter Politik-Ekonomi Canberra-Jakarta*; Joseph Nevins yang berjudul *Pembantaian Timor-Timur: Horor Masyarakat Internasional*; Kristio Wahyono yang berjudul *Sepuluh Tahun Tragedi Timtim: Timor Target*.

Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia, penulis menemukan beberapa sumber seperti Jurnal “Aksi Sosial”, Jurnal “Marege”, Jurnal “Paradigma”, dan juga beberapa buku seperti buku *Karikatur dan Politik* karya dari Agustin Sibarani.

1.7. Sistematika Penulisan

Penulisan ini akan terbagi ke dalam empat bab yang terdiri dari :

Bab pertama merupakan pendahuluan dari seluruh bab. Dalam bab ini akan dikemukakan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup masalah, metode penelitian, sumber sejarah, dan sistematika penulisan.

Bab kedua berjudul Perkembangan Kartun Politik Australia. Dalam bab ini penulis akan memaparkan mengenai perkembangan kartun politik Australia. Selain itu penulis juga akan membahas mengenai fungsi dan peranan kartun politik Australia serta kartunis-kartunis Australia yang berpengaruh dalam perkembangan kartun politik di Australia.

Pada bab ketiga dengan Hubungan Australia-Indonesia terkait isu Timor Timur 1974-2002 dalam kartun politik Australia. Dalam bab ini, penulis akan membahas mengenai hubungan Australia-Indonesia sejak tahun 1974 yaitu pada masa proses dekolonisasi Timor Timur hingga tahun 2002 yang merupakan tahun terakhir Timor Timur menjadi bagian dari Indonesia yang disertai dengan kartun politik Australia.

Selanjutnya pada bab keempat dengan judul Perubahan Kebijakan Australia terhadap Indonesia terkait isu Timor Timur dalam kartun politik Australia 1974-2002. Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai faktor-faktor yang menentukan kebijakan luar negeri Australia dan perubahan kebijakan Australia terkait isu Timor Timur dalam kartun politik Australia.

Bab kelima atau bab terakhir yang merupakan bab kesimpulan dimana penulis akan menjelaskan hal-hal penting dari bab-bab sebelumnya. Sistematika penulisan ini akan bisa berubah, sesuai dengan penemuan di lapangan.

BAB II. PERKEMBANGAN KARTUN POLITIK DI AUSTRALIA

Ilustrasi satrikal,²¹ mulai dikenal oleh masyarakat Eropa pada akhir abad 15 dengan adanya penemuan mesin pencetak oleh Johannes Gutenberg, penemuan mesin tersebut kemudian mempermudah penyebaran ilustrasi satrikal ke masyarakat umum. Pada masa itu, ilustrasi satrikal dijadikan sebagai suatu senjata yang cukup kuat untuk melakukan perlawanan terhadap sistem kelas di masyarakat atau untuk melawan gereja.²²

Ilustrasi satrikal mengalami perubahan istilah pada tahun 1843 dengan adanya publikasi sebuah gambar kartun oleh majalah *Punch* Inggris yang berjudul ‘*Substance and Shadow*’ karya John Leech, seorang ilustrator berkebangsaan Inggris.²³ Dalam karyanya, Leech menggambarkan sebuah gedung baru Parlemen Inggris yang dinding-dindingnya dihiasi oleh *fresco*.²⁴

Gambar Leech tersebut, berbentuk kartun yang lucu namun di dalamnya terdapat unsur sindiran terhadap Parlemen Inggris yang membangun sebuah gedung baru dengan hiasan-hiasan *fresco* yang indah di tengah kemiskinan yang melanda. Leech bermaksud menggambarkan ketidakpekaan Parlemen Inggris yang mengeluarkan banyak biaya untuk gedung baru di tengah keadaan masyarakat Inggris yang dilanda kemiskinan, ia juga memberikan sindiran kepada seniman penggambar *fresco* di gedung baru tersebut karena telah menggambarkan keindahan yang tidak sesuai dengan keadaan Inggris pada masa itu.

²¹ Ilustrasi adalah gambar (foto, lukisan) untuk membantu memperjelas isi buku, karangan, tulisan, dsb. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Ed. 2*, Jakarta: 2007, hal. 425. Satrikal berasal dari kata satire yang berarti gaya bahasa yang dipakai dalam kesusastraan untuk menyatakan sindiran terhadap suatu keadaan atau seseorang. *Ibid*, hal 1002. Oleh karena itu, ilustrasi satrikal dapat bermakna suatu gambaran atau lukisan yang terdapat unsur sindiran terhadap suatu keadaan atau seseorang.

²² Pada abad ke-15, di dalam masyarakat Eropa berlaku sistem kelas yang membedakan tingkat atau posisi seseorang di dalam masyarakat. Struktur kelas ini memberikan ketimpangan antara para bangsawan dengan rakyat biasa baik dari segi pendidikan, pemerintahan, dan hukum. Pada abad 15, posisi Gereja mendominasi kehidupan di dalam masyarakat sehingga ajaran-ajaran yang bertentangan dengan agama dimusnahkan. www.cultureandrecreation.gov.au/articles/cartoons. Diunduh pada 19 Maret 2010, pukul 22.21 wib.

²³ www.punch.co.uk/cartoonhistory02.html. Diunduh pada 19 Maret 2010, pukul 22.35 wib. Lihat Lampiran 2.1.

²⁴ *Fresco* adalah seni menggambar di kaca dengan warna-warna yang indah dan mengilustrasikan suatu legenda atau mitos pada masyarakat Eropa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Ed. 2*, Jakarta. 2007. hlm. 245.

Sejak kartun karya Leech diterbitkan, masyarakat mulai menggunakan istilah kartun untuk merujuk pada sebuah ilustrasi satirikal. Kata kartun sendiri memiliki makna yang beragam. Kata kartun berasal dari Bahasa Italia, *cartone*, yang berarti kertas tebal.²⁵ Dalam seni rupa, makna kartun berarti sebuah sketsa awal yang dibuat oleh para seniman pada masa *renaissance* yang nantinya akan digambar kembali pada kanvas, pada permadani, atau pada hiasan dinding untuk bangunan arsitektural seperti mozaik, kaca, atau *fresco*.²⁶

Kata kartun pun mengalami perluasan makna ketika media massa baik elektronik maupun cetak mulai hadir di tengah-tengah masyarakat. Pada media cetak, kata kartun lebih dikenal dengan istilah kartun modern yang terdiri dari kartun politik, kartun opini, kartun humor, dan komik. Pada media elektronik seperti televisi, kartun lebih dikenal sebagai kartun animasi yang sering kita jumpai dan umumnya disenangi oleh anak-anak. Menurut Cipta Adi Pusaka, terdapat tiga jenis kartun, yang di antaranya adalah,²⁷

1. Kartun humor (*gag cartoon*) yaitu gambar kartun yang hanya menyajikan gambar lucu dengan tujuan menghibur pembaca.
2. Komik strip merupakan gambar kartun cerita yang terpisah-pisah, dimana karakter setiap gambar berkelanjutan dengan gambar lainnya dengan disertai dialog dalam setiap gambarnya.
3. Kartun editorial atau kartun politik (*political cartoon*) yaitu gambar kartun satu panel yang biasanya ditemukan di media cetak.

Kartun politik biasanya dapat kita temukan pada halaman editorial suatu surat kabar, namun tak jarang pula surat kabar menempatkannya di halaman komik. Pada umumnya kartun jenis ini menyajikan topik yang beragam mengenai keadaan atau peristiwa yang sedang terjadi di dalam masyarakat atau pemerintahan. Peristiwa-peristiwa yang akan diangkat umumnya terkait dengan peristiwa politik, sosial, ekonomi, sosial, olahraga, atau peristiwa-peristiwa sezaman.

²⁵ www.punch.co.uk/cartoonhistory02.html. Diunduh pada 19 Maret 2010, pukul 22.35 wib.

²⁶ <http://www.vision.net.id>. "Karikatur dan Presiden". Diunduh pada tanggal 19 Maret 2010, pukul 22.47 wib.

²⁷ Cipta Adi Pusaka dalam I Dewa Putu Wijana. *Kartun: Studi Tentang Permainan Bahasa*. Yogyakarta: Ombak. 2004. hlm. 11-12.

Menurut Gombrich, kartun editorial merupakan usaha cerdas kartunis dalam memampatkan (*condensation*) gagasan yang rumit ke dalam sebuah gambar yang mengejutkan dan berkesan untuk diingat.²⁸ Melalui sebuah rangkaian gagasan yang dipadatkan dalam sebuah gambar penuh makna (*pregnant image*) menurutnya adalah hakekat dari kecerdikan kartun.

Di dalam kartun politik, terdapat dua unsur yang tidak dapat dipisahkan yaitu unsur metafora dan karikatur.²⁹ Metafora adalah pemakaian kata atau kelompok kata bukan dengan arti sebenarnya, melainkan sebagai lukisan yang berdasarkan persamaan atau perbandingan.³⁰

Gombrich menyatakan bahwa metafora merupakan ungkapan konotatif dalam kartun yang dimaksudkan sebagai pengalihan ataupun penyamaran.³¹ Hal ini disebabkan, masalah dari topik yang diangkat tidak diungkapkan secara harfiah melainkan melalui makna yang tersirat. Selain itu, ia menyatakan bahwa metafora juga merupakan gudang senjata bagi kartunis (*cartoonist's armoury*) untuk dapat mengungkap komentar agar lebih tajam dan kaya makna.

Metafora di dalam kartun editorial, sering juga digunakan untuk menyamakan topik.³² Penyamaran yang cerdas dapat menghindarkan kartun dari permasalahan hukum, dan dalam situasi yang represif, menyindir dan berkias menjadi cara untuk menghindari serangan balik dari pemerintah, individu, atau sebuah institusi. Salah seorang kartunis yang sering menggunakan metafora di dalam karyanya adalah Thomas Nast (1840 - 1902). Ia menciptakan beberapa metafora yang terkenal di Amerika seperti, metafora gajah untuk mewakili Partai Republik dan Keledai untuk Partai Demokrat, serta metafora *Uncle Sam* yang berjanggut dan bertubuh ramping yang merefleksikan Amerika.³³

Unsur kedua di dalam kartun adalah karikatur. Karikatur berasal dari bahasa Italia *caricatura* dari *caricare* yang berarti memberi muatan atau beban tambahan.³⁴ Oleh karena itu, karikatur merupakan gambar bermuatan humor atau

²⁸ E.H. Gombrich. "The Cartoonist's Armoury". *South Atlantic Quarterly*. 1963. hlm. 189-223.

²⁹ Becker Stephen. *Comic Art In United States*. USA: Simon & Schuster. 1959.hlm. 33

³⁰ *Kamus Besar Bahasa Indonesia Ed. 2*, Jakarta. 2007. hlm. 739.

³¹ E. H. Gombrich, *ibid*.

³² *Ibid*.

³³ Thomas Nast adalah seorang kartunis politik penting di dalam sejarah kartun politik Amerika. <http://www.thomasnast.com/default.htm>. Diunduh pada tanggal 9 Juni 2010, pukul 06.31 wib.

³⁴ *Kamus Besar Bahasa Indonesia Ed. 2*, Jakarta. 2007. hlm. 541.

satir dalam berbagai media massa dengan mengambil tokoh-tokoh orang yang terkenal atau orang-orang biasa yang karena peristiwa tertentu menjadi terkenal. Untuk menampilkannya secara lebih humoristis tokoh-tokoh itu digambarkan dengan distorsi tubuh dan wajah.³⁵ Dengan ciri deformasi atau distorsi wajah, biasanya wajah manusia (tokoh) yang dijadikan sasaran.

Di dalam sebuah kartun mengandung unsur atau bentuk karikatur, begitu pula sebaliknya. Akan tetapi, cara pandang atau ruang lingkup kartun lebih luas dibandingkan karikatur. Perbedaan lain antara kartun dengan karikatur terletak pada kadar kritiknya, kartun memiliki titik satiris (*satirical point*) namun tidak ditekankan sebagai sesuatu yang dominan. Kartun juga tidak mengandung distorsi yang mutlak untuk karikatur,³⁶ sehingga suatu gambar kartun bisa bebas dari distorsi pada perubahan bentuk dalam pengolahan watak pada sebuah gambar yang diciptakan.³⁷ Hal ini karena kartun lebih mengutamakan humor daripada satir.

Adanya unsur kritik di dalam kartun, terkadang menimbulkan salah persepsi antara kartun politik dan karikatur. Dani Yustiniadi memaparkan perbedaan antara kartun politik dengan karikatur.³⁸ Menurutnya, kartun politik merupakan sebuah karya lucu yang sedikit banyak memiliki hasrat untuk “bercerita” sedangkan karikatur adalah sebuah karya lucu dengan cara melebihkan atau mengurangi ciri khas sesuatu atau seseorang yang tanpa banyak niat sindiran. Kedua unsur ini, yaitu metafora dan karikatur, dimaksudkan untuk menjelaskan kerumitan suatu situasi politik atau beberapa peristiwa tanpa mengurangi salah satu fungsinya sebagai gambar lucu.

II. 1. PERKEMBANGAN KARTUN POLITIK DI AUSTRALIA

Australia memiliki sejarah politik yang dinamis, salah satunya adalah sejarah mengenai kartun politik yang memberikan kesempatan kepada masyarakat

³⁵ I Dewa Putu Wijana, *ibid*, hal. 7.

³⁶ Distorsi adalah makna yang terdapat pada perubahan bentuk dalam pengolahan watak pada sebuah gambar yang diciptakan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Ed. 2*, Jakarta. 2007. hlm 271.

³⁷ Augustin Sibarani. *Karikatur Dan Politik*. Jakarta: ISAI-Garba Budaya-PT. Media Lintas Inti Nusantara. 2001. hlm. 34.

³⁸ *Ibid*. 8.

Australia untuk mengetahui proses politik negaranya dan juga untuk memperoleh masukan dari masyarakat terhadap pemerintahan. Salah satu alat dalam menyampaikan politik satir terhadap pemerintahan adalah kartun politik yang telah memiliki sejarah yang kuat di Australia.

Sejak tahun 1830-an, surat kabar Australia sudah mulai menerbitkan kartun politik yang menggambarkan tentang isu-isu politik, kebijakan pemerintahan, peristiwa olahraga hingga kampanye untuk pemilihan umum.³⁹ Kartun politik mulai berkembang di Australia pada abad 19, dengan kolom yang tersedia untuk kartun politik oleh surat kabar *The Cornwall Chronicle* dari Launceston, Tasmania pada tahun 1835.⁴⁰ Surat kabar ini menjadi surat kabar pertama di Australia yang menyediakan kolom kartun politik.

Pada tahun 1850, kehadiran kartun politik di surat kabar mulai nyata dengan kolom kartun politik yang diadakan oleh surat kabar terbitan Adelaide, *The Adelaide Month Almanac* dan diikuti oleh *The Melbourne Punch* pada tahun 1855.⁴¹ Kedua surat kabar ini mempublikasikan kartun politik yang menggambarkan anti-pemerintahan. Ketika surat kabar *The Bulletin* didirikan pada tahun 1880, kartun politik mulai tumbuh secara signifikan dengan dipublikasikan kartun politik pada setiap edisi *The Bulletin*.⁴²

Kartun politik yang semakin sering dipublikasikan oleh *The Bulletin*, disebabkan adanya keputusan dari editor pertama *The Bulletin*, William Traill. Traill memutuskan untuk mencari kartunis berbakat di Amerika Serikat yang bisa memberikan perkembangan bagi kolom kartun politik surat kabarnya. Sekembalinya dari Amerika, ia tidak hanya membawa seorang kartunis yaitu Livingstone Hopkins tetapi juga membawa sebuah mesin foto cetak.⁴³

³⁹ Peter Goodall. *High Culture Popular Culture*. Australia: Allen and Unwin. 1995. hlm. 28.

⁴⁰ *Ibid*, hlm 30

⁴¹ *Ibid*.

⁴² Pada awal mula surat kabar ini didirikan bernama *The Sydney Bulletin* yang kemudian berubah nama menjadi *The Bulletin*. www.cultureandcreation.gov.au/articles/cartoons. Diunduh pada 19 Maret 2010, Pukul 22.21 wib.

⁴³ Mesin pencetak foto ini, merupakan sebuah terobosan baru bagi dunia surat kabar. Mesin ini dapat membantu penciptaan kartun politik yang semula menggunakan teknik ukiran dengan tangan. Teknik ini, memakan waktu yang cukup lama sehingga kartun yang diterbitkan seringkali tidak mengikuti perkembangan dari peristiwa-peristiwa yang terjadi masyarakat. Cara teknik ini bekerja adalah dengan penggambaran kartun di sebuah balok kayu oleh kartunis yang nantinya dikirimkan ke pemahat untuk ukir. Berbeda dengan mesin cetak foto, selain tidak memerlukan waktu yang lama proses yang dilakukan pun cukup mudah yaitu hanya dengan menggambar

Kehadiran Hopkins juga memberikan suatu karya yang menjadi salah satu simbol di Australia yaitu *'The Little Boy From Manly'* yang ia buat pada bulan April 1885.⁴⁴ Di dalam karyanya tersebut, ia menggambarkan seorang anak laki-laki dengan berpakaian sekolah. Karakter *'The Little Boy From Manly'* diciptakan oleh Hopkins karena ia percaya bahwa setiap negara seharusnya memiliki figur khayalan yang dapat mencerminkan semangat nasional negara itu dan figur tersebut umumnya adalah pria.⁴⁵

Pada tahun 1884, Trail melakukan perjalanan ke Inggris dengan harapan ia dapat menemukan kartunis handal lain yang mau bergabung ke dalam *The Bulletin*. Perjalanannya ke Inggris tidaklah sia-sia, ia bertemu dengan Phil May. Pada saat May datang ke Australia, ia sangat terpesona dengan sistem masyarakat Australia yang egaliter dan berbeda dari Inggris yang masih memegang kuat tradisi pembagian kelas di masyarakat. Oleh karena itu, karya-karya kartun May tentang Australia lebih banyak menggambarkan kehidupan sehari-hari masyarakat Australia atau mengenai isu di dalam masyarakat dibandingkan isu mengenai politik.

Salah satu kartun May yang ikut mewarnai dunia kartun politik di Australia adalah kartun yang berjudul *'The Mongolian Octopus'*, Kartun ini dipublikasikan pada 21 Agustus 1886 oleh *The Bulletin*.⁴⁶ May menggambarkan 'gurita Asia' yang menguasai Australia, penguasaan atas Australia ini dapat terjadi mengingat Australia belum memiliki sistem pertahanan yang kuat⁴⁷. 'Gurita Asia' tersebut memiliki beberapa tentakel dan di setiap tentakelnya bertuliskan hal-hal negatif yang berhubungan dengan kedatangan imigran Cina ke Australia seperti buruh murah, opium, penyakit cacar, penyuapan, dan prostitusi. Kartun ini juga merupakan suatu ilustrasi tentang *xenophobia* masyarakat Australia terhadap imigran Cina yang terus berdatangan.⁴⁸

dengan pensil atau kuas. Bentuk kartun kemudian difoto kedalam piringan logam untuk dicetak.
Ibid.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ www.api-network.com. Diunduh pada 21 Maret 2010, pukul 13.25 wib.

⁴⁶ *Loc. Cit.*

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Lihat Lampiran 2. 2. http://www.aph.gov.au/library/pubs/monographs/Kendall/Chapter_one.htm. Diunduh pada 6 Mei 2010, pukul 03.22 wib.

Pada pertengahan abad ke-19, terjadi suatu perubahan yang cukup signifikan bagi kartun politik di Australia. Perubahan ini adalah dengan kebebasan dalam pemilihan topik yang diberikan kepada para kartunis. Sebelumnya para kartunis Australia, masih dibatasi kebebasan dalam pemilihan topik untuk menggambarkan sebuah kartun politik. Hal ini ditandai dengan adanya keputusan dari pihak surat kabar bahwa topik bagi kartun politik harus berdasarkan pada pertemuan dengan editor surat kabar,⁴⁹ sehingga sebuah topik kartun politik merupakan hasil diskusi antara editor dan para kartunis.

Kebebasan ini didapatkan melalui permintaan masyarakat terhadap sebuah kartun politik yang lebih satir dan mewakili pemikiran mereka dibandingkan hanya sebuah kartun politik yang bersifat lucu.⁵⁰ Salah satu yang juga merupakan titik tolak kebebasan dalam pemilihan topik bagi kartunis adalah perkembangan karya kartunis David Low yang semakin dikenal oleh masyarakat New Zealand, Australia, dan Inggris, ia dipandang sebagai seorang kartunis politik yang mandiri dan dapat mengutarakan pandangannya pada halaman editorial suatu surat kabar tanpa dibatasi oleh apapun. Dengan adanya tolak ukur ini, maka sebagian besar kartunis dan editor surat kabar maupun majalah mulai menjalankan prinsip bahwa untuk mendapatkan kartun politik yang satir maka para kartunis seharusnya diberikan kebebasan mengutarakan pandangan mereka.

Memasuki akhir abad ke-19, topik kartun-kartun politik di Australia didominasi oleh isu-isu mengenai pembentukan Federasi Australia, depresi ekonomi yang sedang melanda dan perkembangan Serikat-Serikat Perdagangan. Namun demikian terdapat beberapa isu kecil yang kemudian menjadi latar belakang bagi tercipta suatu isu yang lebih besar. Salah satunya adalah Demonstrasi Besar Buruh Pelabuhan London pada tahun 1889 yang gaungnya terdengar hingga ke Australia. Isu ini, menjadi topik hangat yang diangkat oleh beberapa surat kabar Australia melalui berbagai artikel yang berisikan dukungan terhadap para buruh di London dan juga untuk mengisi kolom kartun politik.

Salah satu surat kabar yang membuat kartun politik dengan dilatarbelakangi oleh peristiwa demonstrasi buruh pelabuhan di London pada

⁴⁹ Haydon Manning and Robert Phiddian. "Censorship And The Political Cartoonist". Konferensi Asosiasi Studi Politik Australasia di Universitas Adelaide, 29 September-1 Oktober 2004, hlm. 15.

⁵⁰ *Ibid.*

tahun 1889 adalah *The Bulletin*. Melalui karya Hopkins dengan judul *The Secret of England's Greatness : 5d per hour*, Hopkins menggambarkan satu keluarga Inggris yang hidup dalam kemiskinan.⁵¹ Upah para buruh London yang hanya lima sen per jam ini, dianggap sebagai sebuah rahasia Kerajaan Inggris untuk dapat hidup kaya raya.

Melalui beberapa artikel dan kartun politik yang diterbitkan oleh surat kabar di Australia, mulai bermunculan sikap simpati terhadap perjuangan para buruh pelabuhan London ini. Rasa simpati ini sebagian besar diperoleh dari Serikat-Serikat Buruh di Australia yang merasa memiliki suatu persamaan nasib. Rasa simpati ini ditunjukkan dengan adanya donasi sebesar 150 Poundsterling yang diberikan oleh Serikat Buruh Dermaga Brisbane, donasi sebesar 500 Poundsterling yang diberikan oleh koloni Queensland, dan donasi sebesar 30.000 Poundsterling yang berasal dari buruh pelabuhan Australia dan kerabat-kerabat mereka.⁵²

Sejak saat itulah, pengaruh dari kartun politik di Australia mulai dirasakan tidak hanya oleh masyarakat Australia sendiri tetapi juga dirasakan oleh masyarakat negara lain. Dengan salah satu contoh kartun politik di atas, telah terlihat bahwa kartun politik di Australia telah mengalami perkembangan topik. Awalnya topik yang akan diangkat hanya berkisar masyarakat atau politik di Australia, namun hal ini berubah dengan mulai diangkat sebuah topik mengenai peristiwa atau isu yang sedang terjadi di luar Australia.

Memasuki abad ke 20, kartun politik di Australia mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Kartun politik tidak lagi hanya dapat diminati melalui media cetak, tetapi juga bisa dinikmati melalui media elektronik televisi. Keberadaan kartun politik di televisi dimulai pada tahun 1984, ketika seorang produser *Australian Broadcasting Corporation* (ABC), Ian Carroll,

⁵¹ Demonstrasi buruh pelabuhan London adalah sebuah demonstrasi dengan tujuan untuk menolak upah kerja yang kecil, keselamatan kerja yang tidak terjamin, dan kontrak kerja yang tidak menguntungkan para buruh. Demonstrasi ini dilakukan oleh seluruh buruh pelabuhan di London dan dengan dibantu oleh sikap solidaritas dari buruh-buruh pelabuhan negara atau koloni lainnya seperti Australia. Demonstrasi yang terjadi secara besar-besaran ini, merupakan titik balik dari sejarah kelas pekerja di Inggris dengan disetujuinya segala tuntutan yang diberikan oleh para buruh pelabuhan. Untuk selengkapnya lihat P. F. Donovan. "Australia And The Great London Dock Strike 1889". *Labour History*, No. 23, November 1972, hlm.17-26.

⁵²Lihat lampiran 2.3. <http://libcom.org/history/articles/great-london-dock-strike-1889>. Diunduh pada tanggal 10 Juni 2010, pukul 03.03 wib.

menginginkan sebuah program mingguan yang penuh dengan sindiran.⁵³ Carroll, bekerja sama dengan Peter Nicholson, membuat sebuah acara dengan boneka-boneka yang berbentuk mirip dengan tokoh Australia. Acara tersebut diberi nama *The Puppet*.

Dalam penayangan *The Puppet*, berhasil bertahan selama satu setengah tahun. Namun program ini harus dihentikan pemutarannya untuk memberikan tempat bagi program baru ABC mengenai hubungan antara Australia dan negara lainnya yang bernama "*The National*". Pada tahun 1987, *The Puppet* kembali muncul dengan perubahan nama menjadi *The Rubbery Figures*. Program ini dihidupkan kembali oleh Nicholson dan hanya dapat bertahan selama satu tahun.⁵⁴

Pada abad 20, kebebasan para kartunis untuk berkarya semakin terbuka lebar, terlebih pada abad ini banyak peristiwa besar yang terjadi seperti Perang Boer,⁵⁵ perjuangan hak pilih wanita, perjuangan federasi, kebijakan pembatasan imigrasi, perang dunia, dan depresi hebat di Australia serta pemilihan umum. Dengan didukung oleh perkembangan dari media cetak dan media elektronik maka dapat dikatakan bahwa masa ini adalah masa keemasan bagi kartun politik dan kartunis Australia.

Perkembangan kartun politik di Australia diikuti pula dengan munculnya kartunis-kartunis baru dan untuk memberikan wadah bagi para kartunis baru ini maka dibentuklah suatu komunitas yang bernama *The Black and White Artists' Society* pada tanggal 17 juli 1924 di Sydney.⁵⁶ Komunitas ini merupakan komunitas kartunis pertama di dunia dengan anggota-anggotanya adalah sekelompok seniman kartunis Australia seperti Sd Nichols, Greg Russ, Jack Quayle, John Wiseman, Jack Baird, Joe Johnson, dan Stan Cross.⁵⁷

Anggota komunitas mulai berkembang, ketika banyak kartunis terkenal yang ikut bergabung seperti Emile Mercier, Jim and Dan Russell, Eric Olive,

⁵³ www.nicholsoncartoons.com.au/rubbery.php. Diunduh pada 28 April 2010, pukul 22.20 wib

⁵⁴ *Ibid*

⁵⁵ Perang Boer adalah perang yang terjadi antara Inggris dengan Republik Afrika Selatan Boer. Perang ini berlangsung dua kali, Perang Boer I terjadi pada tahun 1877 ketika Perdana Menteri Inggris, Benjamin Disraeli 'menganeksasi' wilayah tersebut. Perang Boer II terjadi pada bulan 1899, dengan penyerangan yang dilakukan oleh Boer di Koloni Natal dan Cape. Perang ini berakhir pada tahun 1900. www.victorianweb.org/history/hist1.html. Diunduh pada tanggal 26 April 2010, pukul 19.48 wib.

⁵⁶ www.cultureandrecreation.gov.au/articles/cartoons. Diunduh pada 19 Maret 2010, pukul 22.21 wib.

⁵⁷ *Ibid*.

Monty Weeded, Bill Pidgeon, Paul Anti, dan James Kessler. Komunitas yang semula bernama *The Black and White Artist' Society* mengubah namanya menjadi *Australian Cartoonists' Association* (ACA) dengan misinya untuk membuat kartun politik menjadi lebih berpengaruh dan dapat diterima oleh masyarakat.⁵⁸

Para kartunis juga mengadakan pameran kartun politik, pameran ini diberi nama *Behind The Lines: The Year's Best Cartoons* dan sudah berlangsung sejak tahun 2003 oleh Museum Nasional Australia.⁵⁹ Pameran yang bertujuan merayakan kartun politik terbaik Australia dalam jangka waktu satu tahun ini, telah memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk melihat karya asli dari kartunis terkemuka Australia seperti Bill Leak, Alan Noir, Peter Nicholson, Geoff Pryor, dan Bruce Petty.

II. 2. FUNGSI DAN PENGARUH KARTUN POLITIK DI AUSTRALIA

Kartun politik bisa menjadi salah satu senjata penting untuk melindungi analisis politik di dalam surat kabar.⁶⁰ Kartun politik pada umumnya memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai hiburan dan sebagai media informasi yang memberikan pandangan baru dari suatu isu kepada pembaca.⁶¹ Kedua fungsi di atas harus seimbang, karena bila suatu kartun politik terlalu banyak satir maka akan menghilangkan sindiran yang menyisipkan humor dan bila sebuah kartun terlalu banyak memiliki unsur humor maka akan bersifat sebagai hiburan semata dan menyia-nyiakan kesempatan untuk menyampaikan pandangan politiknya.

Menurut hasil wawancara yang dilakukan oleh Museum Nasional Australia kepada Geoff Pryor, seorang kartunis Australia, ia mengatakan bahwa kartun politik memiliki tiga fungsi yaitu,⁶²

- a. berfungsi untuk memberikan pengertian terhadap pola pikir politikus Australia kepada masyarakat dengan cara yang lucu.

⁵⁸ *Ibid*

⁵⁹ *Loc. Cit*

⁶⁰ Robert Philippe. *Political Graphics: Art As A Weapon*. New York: Abbeville Press. 1980. hlm. 44

⁶¹ *Ibid*. hlm. 46

⁶² www.nma.gov.au/education/school_resources/websites_and_interactives/political_cartoons_interactive_activities/interview_a_cartoonist/. Diunduh pada tanggal 22 April 2010, pukul 13.22 wib.

- b. sebagai wadah bagi opini masyarakat yang berfungsi sebagai alat untuk mengkritisi para politikus baik dari segi pandangan politiknya, mengenai kebijakan yang mereka ambil, atau hanya sekedar untuk memperkenalkan diri mereka di dalam masyarakat yang biasanya digunakan oleh para politikus untuk menarik dukungan pada saat pemilihan umum.
- c. dapat berfungsi untuk memberikan perasaan yang mendalam, kesedihan, dan rasa getir pada suatu peristiwa sehingga perasaan yang tidak dapat diwakilkan dengan kata-kata dapat dengan mudah tersirat dalam sebuah kartun politik.

Fungsi-fungsi kartun politik ini dapat memberikan para pembaca sebuah pandangan baru dalam menyikapi suatu peristiwa atau kebijakan dengan tertawa lepas ataupun tersenyum kecut. Fungsi kartun politik yang beragam tentu saja memberikan pengaruh yang beragam pula. Menurut Pryor, seorang kartunis bisa menerima telepon pada pagi hari untuk menerima reaksi dari kartun politik yang dibuatnya mengenai seorang politikus muda dan masih baru bergabung ke dalam lingkaran dunia politik kartun.⁶³ Biasanya para politikus muda ini, meminta agar sang kartunis membuat kembali mengenai kartun diri mereka dengan sisi yang lebih baik. Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa sebuah kartun politik dapat mempengaruhi rasa percaya diri seorang politikus Australia.

Walaupun belum terdapat bukti konkret bahwa kartun politik sukses dalam mengubah opini masyarakat, namun pengaruh kartun memang telah dirasakan oleh masyarakat Australia sejak pertama kali kemunculannya. Sebut saja kartun karya Hopkins yang berhasil memberikan bantuan donasi kepada buruh di London yang sedang melakukan demonstrasi besar-besaran, kartun tersebut berhasil memberikan bantuan donasi dari berbagai kalangan di Australia. Kartun lainnya yang juga memiliki pengaruh adalah kartun mengenai perjuangan wanita Australia dalam memperoleh hak pilihnya yang meskipun tidak memberikan

⁶³ *Ibid.*

pengaruh yang berarti namun bisa menjadi cara yang efektif dalam mendapatkan dukungan dari kalangan pemerintah.⁶⁴

Pengaruh kartun memang tidak secara langsung dapat mengubah opini masyarakat, hal ini dikarenakan sebagian besar penikmat kartun berasal dari kalangan yang memiliki minat kecil terhadap politik atau berasal dari kaum minoritas. Meskipun terdapat penikmat kartun yang posisinya dekat dengan dunia politik, kecil kemungkinannya untuk dapat mengubah pandangan mereka terhadap suatu isu.⁶⁵

Oleh karena fungsi kartun di media massa yang berperan sebagai penghibur, pelepas lelah setelah membaca sederet artikel atau berita dan sebagai media kritik sosial dibandingkan sebagai alat propaganda politik.⁶⁶ Maka sebuah kartun politik hanya dapat memberikan pandangan yang berbeda dari sudut pandang kartunis, tanpa mengharuskan terjadinya perubahan pendapat dikalangan masyarakat.

II. 3. KARTUNIS AUSTRALIA

Di setiap karya kartun politik yang menggambarkan suatu isu atau peristiwa yang terjadi di suatu negara tidak terlepas dari kerja keras kartunis dalam menggambarkan isu-isu tertentu ke dalam sudut pandang yang satirikal sekaligus menghibur. Berbeda dengan peraturan yang dimiliki oleh para jurnalis, seorang kartunis dapat bersifat kekanak-kanakan, tidak perlu menyediakan bukti, atau mempertimbangkan mengenai opini yang akan diutarakan dalam menghasilkan suatu gambar kartun politik.⁶⁷ Kebebasan para kartunis ini juga dilengkapi dengan adanya izin untuk mengatakan sindiran, izin tersebut pada umumnya digunakan untuk tujuan analisis peran mereka sebagai kometator politik dari skala 'tidak serius' hingga 'sangat serius'.⁶⁸

⁶⁴ Marian Sawyer. "Cartoons For Causes: Cartooning For Equality In Australia". Konferensi Tradisi Media Australia, 2001.

⁶⁵ Haydon Manning and Robert Phiddian. "Censorship And The Political Cartoonist,". hlm. 15-16

⁶⁶ Ismail Kusmayadi, *ibid.*

⁶⁷ *Loc. Cit*

⁶⁸ *Ibid*

Selain itu, izin untuk menyindir ini juga digunakan untuk mengenali wilayah kerja mereka antara satir dan humor agar suatu karya kartun dapat seimbang. Keseimbangan antara humor dan satir di dalam suatu kartun dibutuhkan karena adanya dua fungsi yang dimiliki oleh kartun politik yaitu sebagai hiburan dan sebagai media informasi yang memberikan pandangan baru dari suatu isu kepada pembaca, sehingga dalam proses penyampaiannya ke pembaca harus berbeda dari laporan berita atau tulisan opini yang biasanya ditemukan pada kolom utama.

Kebebasan berekspresi yang dimiliki oleh kartunis Australia ini seringkali disebut sebagai bagian dari demokrasi liberal dalam mengutarakan opini di Australia sesuai dengan sistem kebebasan pers liberal yang dianut oleh media massa Australia, yaitu sistem pers yang tidak mengenal lembaga sensor.⁶⁹ Para pemilik dan wartawan memiliki kebebasan absolut untuk menulis atau menyajikan suatu berita yang dari sudut pandang mereka patut untuk dipublikasikan, meskipun demikian tetap terdapat beberapa norma di dalam sistem pers liberal Australia di antaranya adalah,⁷⁰

- a. norma *D-notice* adalah norma menyangkut pencegahan pemberitaan yang berkaitan dengan rahasia negara serta merusak keamanan nasional
- b. norma yang bersangkutan dengan ketentuan perundangan mengenai *libel* atau fitnah
- c. norma yang berkaitan dengan adanya sensor bersifat moral. Sensor moral telah diberlakukan sejak tahun 1970-an, sensor ini mengenai pembatasan untuk membaca atau melihat pertunjukan yang berkaitan dengan pornografi, kekerasan, obat bius, kejahatan dan horor.

Walaupun dalam melakukan pekerjaannya, kartunis dan jurnalis peraturan yang berbeda. Akan tetapi, kartunis juga memiliki beberapa peraturan sederhana yang sama seperti jurnalis, yaitu menghindari penggambaran gambar yang tidak

⁶⁹ Zulkifli Hamid. *Sistem Politik Australia*. Jakarta : LIP-FISIP-UI dan PT. Remaja Rosdakarya. 1999. hlm. 342.

⁷⁰ *Ibid.* hlm. 344-346.

patut, menghilangkan kepentingan pribadi, tidak menyerang kaum minoritas, dan peraturan yang paling penting adalah lucu.⁷¹ Meskipun pekerjaan sebagai kartunis bisa dengan bebas mengungkapkan sindiran, namun tidak berarti para kartunis tidak menemui masalah dalam kartun politik karyanya. Ada beberapa yang dapat menjadi masalah bagi seorang kartunis diantaranya adalah, adanya ketakutan para kartunis bila kartun politiknya berisikan tentang ketentuan perundangan mengenai fitnah, adanya tekanan dari dalam surat kabar, adanya tekanan dari pihak luar yang biasanya berasal dari politikus, partai, dan kepentingan korporasi.⁷²

Dalam sistem kebebasan pers liberal, para wartawan dan kartunis tidak mendapatkan perlindungan hukum atas segala sindiran yang mengandung unsur fitnah. Dalam jurnal hukum, dituliskan bahwa bila seseorang atau suatu instansi merasa tidak senang dengan terhadap suatu materi berita di dalam surat kabar yang menyebabkan reputasi dan nama-baiknya tercemar maka ia berhak untuk melakukan tuntutan terhadap pembuat materi berita.⁷³ Ironisnya, segala hal yang berhubungan dengan kartun politik tentu saja mengenai penyerangan terhadap suatu instansi atau seorang tokoh.

Masalah kedua yang seringkali dialami oleh para kartunis adalah tekanan yang berasal dari surat kabar, tempat mereka bekerja. Meskipun para kartunis diberikan kebebasan dalam menghasilkan suatu gambar untuk surat kabar, namun para kartunis tetap harus menyadari peranan editor di dalam sebuah surat kabar. Editor surat kabar memiliki hak untuk melakukan edit, atau menolak kartun politik yang terkadang tidak tepat sasaran, tidak bersifat menyerang, dan tidak akurat.⁷⁴

Selain tekanan dari surat kabar, para kartunis, juga mendapatkan tekanan dari luar seperti dari partai politik, politikus, dan kepentingan suatu korporasi. Dewasa ini, mulai marak iklan-iklan suatu produk perusahaan yang memenuhi kolom-kolom di surat kabar, iklan memang menjadi suatu aset yang dapat menguntungkan surat kabar maka tak jarang surat kabar yang memotong kolom kartun politik untuk diisi oleh iklan-iklan produk suatu perusahaan.⁷⁵

⁷¹ *Ibid*

⁷² *Ibid*, hlm. 17

⁷³ Zulkifli hamid, *ibid*, hlm. 345.

⁷⁴ Haydon Manning and Robert Phiddian. "Censorship And The Political Cartoonist", hlm. 20

⁷⁵ *Ibid*. hlm. 24

Tekanan dari luar juga berasal dari politikus dan partai politik, bila seorang politikus baru memasuki dunia politik Australia, umumnya memberikan reaksi yang berlebihan mengenai kartun politik yang menggambarkan dirinya sehingga tak jarang para kartunis harus menerima permohonan agar kartun politikus tersebut dibuat dengan lebih baik pada keesokan harinya.⁷⁶

Kartunis-kartunis Australia dianggap sebagai pemberi pengaruh besar terhadap perkembangan kartun politik baik di Australia maupun di negara lain seperti Amerika dan Inggris. Kartunis-kartunis Australia diberikan cukup kebebasan untuk membuat suatu karya kartun politik tanpa takut terhalang oleh kepentingan politikus, walaupun tidak sedikit masalah yang harus mereka hadapi.

Kartunis-kartunis di dunia, khususnya Amerika, sangat mengidolakan para kartunis Australia. Kartunis Amerika kerap kali meminjam gaya dan ide dari kartunis Australia yang berciri khas humor protes dan tidak mudah terintimidasi oleh kekuatan politik.⁷⁷ Adapun beberapa kartunis-kartunis Australia yang memberikan sumbangan cukup besar dalam dunia kartun politik baik di Australia maupun di luar Australia, di antaranya adalah:

a. WILL DYSON (1880-1938)

William Henry Dyson adalah seorang kartunis yang lahir di Ballarat, Victoria pada tahun 1880, ia merupakan anak ke sembilan dari sebelas bersaudara.⁷⁸ Dyson mendapatkan keahlian menggambarinya melalui bantuan kakak laki-lakinya, Ted dan Ambrose, yang berkontribusi dalam artikel dan ilustrasi untuk surat kabar sosialis *The Champion*.

Karirnya sebagai kartunis dimulai sejak tahun 1900 dengan karyanya yang dipublikasikan dalam surat kabar *The Sydney Bulletin*.⁷⁹ Dengan karya-karyanya, reputasi Dyson mulai berkembang sebagai kartunis yang berbakat dan ia pun ditawarkan sebagai asisten kartunis untuk *Adelaide Critic* pada tahun 1904.⁸⁰

⁷⁶ *Ibid*

⁷⁷ Anna Day. "The Wizards of Oz: Aussie Cartoonists Do It Their Way" dalam The Harvard International Journal Of Press/Politics Vol. 5 No. 3 Summer 2000, hlm 96-101.

⁷⁸ www.adbonlien.anu.edu.au. Diunduh pada tanggal 23 April 2010, pukul 15.45 wib

⁷⁹ *Ibid*.

⁸⁰ *Ibid*.

Ketika Australia tidak memberikan kesempatan yang baik untuk mempublikasikan karyanya, Dyson memutuskan untuk pindah ke London pada tahun 1909 dan mulai bekerja di *Weekly Dispatch* dengan menggambarkan kartun yang menantang kekuatan Pemerintahan Liberal dari *House of Lords* mengenai perjuangan hak pilih bagi wanita.⁸¹ Situasi Inggris, yang pada masa itu mengalami konflik industri dijadikan sebuah lahan baginya untuk dijadikan topik bagi kartun politiknya.

Dyson lalu bergabung di *The World*, yang pada tahun 1911 berganti nama menjadi *Daily Herald*, sebuah surat kabar yang diterbitkan oleh *London Printers* pada tahun 1910.⁸² Kehadirannya sebagai kartunis dalam surat kabar ini adalah wujud dari dukungannya terhadap aksi mogok Serikat Buruh Inggris untuk menaikkan upah buruh.⁸³ Surat kabar *Daily Herald* pernah mengalami kemunduran bahkan ditutup sementara hingga 15 April 1912 dengan Will Dyson sebagai kartunisnya.⁸⁴ Charles Lapworth yang merupakan editor surat kabar tersebut memberikannya satu halaman penuh dan kebebasan untuk Dyson dalam mengisinya.

Kartun-kartun karya Dyson menciptakan suatu sensasi, ia dijuluki sebagai kartunis terbaik yang ada di Inggris sejak James Gillray. Salah satu karya Dyson yang banyak menuai kritikan adalah kartun politiknya yang berjudul 'Ramsay MacDonald' yang dipublikasikan oleh *Daily Herald* pada tahun 1913.⁸⁵ Dyson menggambarkan Ramsay MacDonald, seorang pemimpin Partai Buruh, sedang menarik keledai sebagai simbol dari Partai Buruh dengan membawa seorang lelaki bertubuh besar yang mewakili simbol kapitalisme. Dalam kartun ini, Dyson menggambarkan bahwa Partai Buruh dianggap kurang tegas dalam menghadapi kapitalisme.

⁸¹ www.spartacus.schoolnet.co.uk/jdyson. Diunduh pada tanggal 25 April 2010, Pukul 11.55 wib.

⁸² *Ibid.*

⁸³ Pada tahun 1909, merupakan salah satu masa yang penting bagi kehidupan politik di Inggris dengan adanya tantangan terhadap kekuasaan Pemerintahan Liberal oleh Serikat Wanita Sosial dan Politik dan para bangsawan dengan menggunakan metode militer untuk memenangkan pemilihan. Selain itu, masa ini juga merupakan masa konflik industri dengan terjadinya demonstrasi besar-besaran. Sebagai seorang Sosialis, Dyson mendukung demonstrasi yang dilakukan oleh serikat dagang untuk menaikkan gaji anggotanya. Dukungannya ini berbentuk bantuan untuk menggambarkan kartun demonstrasi-demonstrasi di surat kabar *Daily Herald* yang sebelumnya bernama *The World*. *Ibid.*

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ Lihat lampiran 2.4. *Ibid.*

Kartun ‘Ramsay MacDonald’, menuai beragam kritik terutama dari Partai Buruh yang menganggap bahwa Dyson telah terlalu ikut campur dalam permasalahan Partai Buruh. Kritik pun didapat Dyson dari politikus George Lansbury, seorang Sosialis Kristen, ia mengeluhkan gambaran Dyson mengenai sistem kapitalis sebagai kejahatan.⁸⁶

Ketika Perang Dunia I di deklarasikan pada Juli 1914, Dyson pun bergabung dalam tentara. Selama ia ikut berperang, ia menghasilkan gambar-gambar dalam jumlah besar mengenai tentara-tentara di medan perang di antaranya adalah kartun yang menggambarkan David Lloyd George, seorang perdana menteri. Dalam kartunnya, Dyson menggambarkan George sedang berdiri dan meneriaki para tentara yang terluka parah dengan seruan “*You’ve won, you’ve won, my brave and incomparable fellow – vote for me*”.⁸⁷

Sejak kartun-kartun politiknya mengenai Perang Dunia I dipublikasikan, Dyson menjadi satu-satunya kartunis yang menggambarkan perang langsung melalui pengalamannya dan sejak saat itu, ia dikenal sebagai seorang kartunis perang. Karya Dyson tidak hanya sebatas sindiran terhadap kaum kapitalisme atau gambaran pada Perang Dunia I, Dyson juga menggunakan kartunnya untuk membantu Partai Buruh pada pemilihan umum pada tahun 1918.⁸⁸

Dyson mulai mengalami kemunduran dalam karirnya pada saat istrinya meninggal dunia namun ia kembali menemukan semangatnya dengan mulai menggambarkan kartun mengenai bahwa Perjanjian Versailles akan memunculkan perang dunia II. Kartun ini berjudul, ‘*Peace And Future Cannon Fodder*’.⁸⁹ Kartun tersebut menggambar mengenai Perjanjian Versailles yang bukanlah jawaban yang tepat bahkan justru akan membawa dampak yang negatif.

Pandangannya tentang Perjanjian Versailles ini digambarkan melalui seorang anak kecil yang sedang bersembunyi dan lembaran surat Perjanjian Versailles di dekatnya. Anak kecil tersebut mengucapkan kata tahun 1940 dan di belakang anak tersebut bergambar empat orang pria yang merupakan karikatur dari empat orang perwakilan empat negara yaitu David Lloyd George dari Inggris,

⁸⁶ www.spartacus.schoolnet.co.uk/jdyson. Diunduh pada tanggal 25 April 2010, Pukul 11.55 wib.

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ <http://www.adb.online.anu.edu.au/biogs/A080422b.htm>. Diunduh pada tanggal 11 Juni 2010, pukul 11.00 wib.

⁸⁹ Lihat lampiran 2.5. *Loc. Cit.* 33

George Clemenceau dari Perancis, Woodrow Wilson dari Amerika, dan Vittorio Orlando dari Italia. Keempat orang yang disebutkan di atas berkata bahwa mereka seperti mendengar anak kecil menangis. Anak kecil yang digambarkan oleh Dyson merupakan refleksi dari kesedihan anak tersebut akan resiko yang akan ia hadapi setelah ditandatangani Perjanjian Versailles.

Pada tahun 1921, Dyson meninggalkan *Daily Herald*. Ia mulai menerbitkan beberapa kartunnya di media massa lain, namun banyak editor-editor media massa menilai kartun Dyson terlalu radikal. Tahun 1925, Dyson memutuskan untuk kembali ke Australia dan bekerja di *Melbourne Punch*. Akan tetapi, karya-karya sudah tidak lagi memiliki citra rasa yang tinggi bahkan tidak lagi memberikan kritikan yang tajam seperti karya-karya pada masa perang.

Dyson meninggal pada 21 Januari 1938, ia dikenal sebagai kartunis yang berpengaruh bagi kartunis-kartunis lainnya. David Low, seorang kartunis Australia, mengungkapkan bahwa kartun hasil karya Dyson memberikan pengaruh yang cukup besar di dalam setiap karyanya seperti kartun Low yang berjudul '*Peace On Earth*' pada tahun 18 April 1918 yang diterbitkan oleh *The Bulletin*.⁹⁰

Kartun ini menggambar seorang pria raksasa yang sedang duduk di bola dunia dan meniup sebuah terompet dengan mata pedang yang bertuliskan kultur menuju ke arah bumi. Low ingin menggambar Perang Dunia dengan cara yang hebat, kartun ini juga dihasilkan dengan insipirasi yang diberikan oleh Dyson dalam kartunnya berjudul '*Kultur Cartoons*' yang dipublikasikan pada tahun 1915.⁹¹

b. PETER NICHOLSON

Peter Nicholson lahir pada tahun 1946, dan merupakan salah satu kartunis terkenal di Australia. Pada awalnya Nicholson merupakan seorang mahasiswa Fakultas Hukum di *University of Melbourne*, namun pada tahun 1969, ia memutuskan untuk tidak melanjutkan studinya.⁹²

⁹⁰ www.nishi.slv.vic.gov.au/latrobejournal. Lihat lampiran 2.6. Diunduh pada tanggal 29 April 2010, pukul 16.47 wib.

⁹¹ *Ibid*

⁹² www.nicholsoncartoons.com.au. Diunduh pada 28 April 2010, Pukul 22.15 wib

Keputusan untuk meninggalkan studinya, didasari oleh keinginan Nicholson untuk mendapatkan suatu pekerjaan dimana ia bisa duduk dan membaca surat kabar. Kartun karya Nicholson pertama kali muncul di dalam surat kabar kecil berskala nasional, *The Nation Review*, Nicholson membuat sketsa kartun mengenai seorang perdana menteri yang berpakaian seperti penjinak singa.⁹³ Setelah sketsa kartunnya dipublikasikan, Nicholson mulai membangun karirnya sebagai seorang kartunis lepas untuk beberapa surat kabar.

Pada tahun 1976, Nicholson mulai bekerja sebagai kartunis tetap di sebuah surat kabar harian bernama *The Australia Financial Review*.⁹⁴ Setelah bekerja selama enam bulan di surat kabar tersebut, Nicholson pun memutuskan untuk menerima pekerjaan sebagai kartunis di surat kabar *The Age* dari Melbourne. Karirnya mulai meningkat sejak ia bekerja sebagai kartunis di *The Age*, dalam tempo waktu enam belas tahun ia bekerja di surat kabar tersebut, karya-karyanya mulai mendapatkan pengakuan dan posisinya sebagai kartunis telah dapat disandingkan dengan kartunis-kartunis terkenal lainnya seperti Bruce Petty, Michael Leunig, John Spooner, Ron Tandberg, Les Tanner, Arthur Honner, dan Cathy Wilcox.

Salah satu karya awal Nicholson yang mendapatkan banyak respon kritik adalah kartunnya yang berjudul '*Gough Whitlam and Margaret Whitlam Caught In An Earth Quake In China*' pada tahun 1976,⁹⁵ kartun tersebut membahas mengenai perjalanan Perdana Menteri Gough Whitlam dan istrinya, Margaret Whitlam, ke Cina yang bertepatan dengan adanya gempa bumi besar di Cina.

Dalam kartun di atas, Nicholson menggambarkan Gough Whitlam dan istrinya sedang berpelukan di atas tempat tidur dengan adanya pertanyaan dari Margaret untuk Gough "*did the earth move for you too dear?*". Kata-kata ini merupakan sindiran bagi Whitlam yang pada masa itu menjabat sebagai Perdana Menteri Australia. Whitlam yang berasal dari Partai Buruh, membuat suatu kebijakan untuk berhubungan baik dengan negara-negara Asia sehingga pada

⁹³ *Ibid*

⁹⁴ *Ibid*

⁹⁵ Lihat lampiran 2.7. *Ibid*.

masa jabatannya orientasi politik Australia mulai berubah dari negara-negara Eropa menjadi berorientasi ke wilayah Asia.⁹⁶

Kritik yang diterima oleh Nicholson tidak hanya dari Perdana Menteri Gough Whitlam saja, pihak editor *The Age* pun ikut merespon secara negatif mengenai kartun tersebut bahkan memutuskan untuk tidak menerbitkannya. Pihak editor mengkritik kartun Nicholson tersebut sebagai sebuah kartun yang tidak memiliki cita rasa yang tinggi dan tidak memenuhi standar yang telah ada untuk diterbitkan. Akan tetapi, Nicholson melihat hal ini sebagai suatu pembuktian untuk dirinya bahwa ia adalah seorang kartunis yang berpotensi.

Pada tahun 1979, Nicholson memutuskan untuk hijrah ke Italia selama setahun. Ia dan keluarganya hidup di Bracciano, sebuah kota yang terletak sebelah utara Kota Roma, ia menggunakan tempat ini sebagai sarana untuk mempelajari seni Italia, arsitektur, dan melakukan pelatihan seni secara formal.⁹⁷

Pada tahun 1980, Nicholson kembali ke Australia sebagai seorang kartunis yang lebih pintar dan berbakat. Ia pun mulai kembali bekerja sebagai kartunis di surat kabar *The Age*. Sekembalinya ia dari Italia, Nicholson bukan hanya menjadi seorang kartunis tetapi ia juga seorang pemahat. Ketertarikannya terhadap dunia pahatan karikatur, ia dapatkan dari karya kartunis Perancis Honore Daumier pada abad ke-19.⁹⁸

Pahatan karikatur yang ia buat merupakan suatu alat yang mendasari terbentuknya *Rubbery Figures puppets*. Beberapa pahatan karikatur Nicholson yang cukup terkenal seperti pahatan karikatur Bob Hawke, Perdana Menteri New Zealand David Lange, dan Premier Victoria terdahulu, Jeff Kennett,⁹⁹ pernah dipamerkan dalam beberapa pameran termasuk pameran yang diselenggarakan ke seluruh Australia pada tahun 1993 oleh Museum Nasional.

Dengan adanya pahatan karikatur yang dimiliki oleh Nicholson, menjadi suatu dasar bagi terbentuknya suatu program mengenai kartun politik di televisi yang diberi nama *The Rubbery Figures Program*, program ini dibuat di sebuah studio film kecil yang diubah menjadi studio boneka di Melbourne oleh Nicholson

⁹⁶ Michael E. Salla. "Australian Foreign Policy And East Timor" dalam *Australian Journal Of International Affairs* Vol. 49 No. 2 November 1995, hlm. 207

⁹⁷ www.nicholsoncartoons.com.au. Diunduh pada 28 April 2010, Pukul 22.15 wib

⁹⁸ *Ibid*

⁹⁹ *Ibid*

sendiri. Program ini dibentuk untuk menyeimbangkan politik kartun di televisi dengan topik yang lucu, cepat, menggigit, dan memberikan informasi. Program yang dibentuk pada tahun 1984, merupakan hasil kerjasamanya dengan Ian Carroll seorang produser di ABC yang menginginkan adanya suatu acara mingguan dengan segmen yang penuh sindiran.

Karir Peter Nicholson di dalam dunia kartun sangat berkembang, ia pernah meraih empat penghargaan dari *Walkley Award* untuk jurnalisannya,¹⁰⁰ saat ia bekerja di *The Age*, *The Australian Financial Review*, dan *Nation Review*.

c. **BRUCE PETTY**

Bruce Petty merupakan salah satu kartunis Australia yang cukup terkenal, karya-karya yang dihasilkan tajam dan memiliki nilai yang cukup tinggi. Petty telah menjadi salah satu kartunis yang sangat disegani dan memiliki pengaruh besar.

Petty memulai pekerjaannya sebagai kartunis di studio animasi Owen Brothers di Box Hill pada tahun 1949.¹⁰¹ Pada tahun 1955, ia melakukan perantauan, dimana ia harus menggambar untuk dipublikasi oleh *The New Yorker*, *Esquire* di New York, dan *Punch* di London. Petty kemudian kembali ke Australia dan bekerja sebagai kartunis kartun politik untuk *The Bulletin*, *The Australia*, dan kemudian bergabung dengan *The Age* pada tahun 1976 hingga saat ini.

Petty mengungkapkan bahwa untuk menjadi seorang kartunis politik merupakan suatu tantangan yang cukup sulit terutama di era globalisasi. Ia mengatakan :

“...I supposed it is traditional that political cartoonist take on people with power in the community. There is now even more important, more anonymous, figures who run our global, corporate world. These non-elected people decide more than politicians what goes on and make decisions where all our wealth and the wealth of this country go. We [cartoonists] keep drawing politicians but the real power is often with a different set of people. We draw them as a vague, ominous people.”¹⁰²

¹⁰⁰ Penghargaan Walkley adalah penghargaan tahunan bagi para jurnalis di Australia. Acara penghargaan tahunan ini dimulai pada tahun 1956, penghargaan ini merupakan ide dari Sir William Gaston Walkley untuk dukungan media pada usaha eksplorasi minyaknya. <http://www.walkleys.com/aboutwalkleyfoundation>. Diunduh pada tanggal 11 Juni 2010, pukul 11.13 wib

¹⁰¹ www.theage.com.au. Diunduh pada tanggal 22 April 2010, Pukul 14. 21 wib.

¹⁰² *Ibid.*

Menurut Petty, di dalam penggambaran subjek di sebuah kartun politik telah terjadi pergeseran mengenai sosok yang akan diangkat. Hal ini dikarenakan oleh adanya kelompok-kelompok kecil yang juga memiliki kepentingan terhadap suatu isu atau peristiwa di masyarakat, sehingga kelompok-kelompok ini juga menjadi salah satu bahan pertimbangan Pemerintah Australia di dalam mengambil kebijakannya.

Dalam setiap karyanya, Petty menunjukkan kemampuan yang luar biasa. Salah satu karyanya telah memenangkan penghargaan *Australia Politic Satire* dari Museum Nasional Australia yaitu kartun mengenai krisis ekonomi di Asia yang diterbitkan pada tahun 1998 di surat kabar *The Age*.¹⁰³ Pencapaian ini merupakan puncak dalam karirnya.

Karya-karya Petty pun sering dipamerkan di Melbourne. Karyanya merupakan tipe seni introspektif yang merupakan suatu pesan yang kuat mengenai apa yang sedang terjadi. Selama hampir setengah abad, seni Bruce Petty yang anarkis dan brilian telah menghidupkan halaman-halaman surat kabar dan majalah. Ia merupakan salah seorang kartunis Australia yang paling dikagumi

Salah satu karya kartun politik Bruce Petty yang terkenal adalah kartun mengenai Perdana Menteri John pada *Gorton Days*. Terdapat banyak skandal di dalam kartunnya tersebut. Dalam kartun *Gorton Days*, ia menggambar sekelompok orang di atas gedung untuk pertahanan dengan dilempari kotoran.¹⁰⁴ Kartun tersebut menggambarkan pertahanan yang menimbulkan kekesalan bagi banyak orang.

Selain sukses berkarir di dunia kartun politik, Petty, juga mulai masuk ke dalam dunia kartun animasi. Dalam bidang ini, ia juga memenangkan Oscar untuk *Leisure*, sebuah film pendek animasi pada tahun 1997. Selain itu, ia juga memenangkan Penghargaan AFI untuk film dokumenternya yang berjudul *Global Haywire* pada tahun 2007.¹⁰⁵ Petty juga menciptakan sejumlah mesin pahatan dengan salah satu karya terkenalnya adalah "*Man Environment Machine*" atau yang lebih dikenal dengan nama "*Petty Machine*".

¹⁰³ *Ibid*

¹⁰⁴ http://www.about.theage.com.au/view_profile.asp?intid=588. Diunduh pada tanggal 28 April 2010, pukul 22.19 wib.

¹⁰⁵ *Ibid*.

BAB III

ANALISIS HUBUNGAN AUSTRALIA-INDONESIA TERKAIT ISU TIMOR-TIMUR DALAM KARTUN POLITIK AUSTRALIA 1974-2002

Ketertarikan Australia terhadap Timor Portugis (nama waktu itu, selanjutnya akan disebut Timor Timur), secara diplomatik telah dimulai sejak abad ke-20. Hal ini dibuktikan dengan sebuah memorandum yang dituliskan pada 26 Januari 1903 oleh Hon. Dr. J. M. Creed, seorang anggota dari Dewan Legislatif New South Wales (selanjutnya akan disingkat menjadi NSW), untuk Sir Harry Rawson yang menjabat sebagai Gubernur NSW.¹⁰⁶

Dalam memorandum tersebut, Creed menuliskan sebuah pertimbangan akan kebutuhan atas keberadaan Inggris di wilayah timur Pulau Timor yang berada dalam kekuasaan Portugis.¹⁰⁷ Keberadaan Inggris di wilayah tersebut dianggap penting untuk dapat memberikan keamanan bagi Australia dan juga untuk menjaga keamanan jalur perdagangan antara Australia, Filipina, dan Cina. Creed juga melihat bahwa letak geografis Timor Timur yang strategis dapat memberikan dampak yang negatif bagi Inggris bila Timor Timur jatuh ke dalam kekuasaan negara-negara yang tidak bersahabat seperti Jerman, Perancis, atau Rusia.

Bila Timor Timur jatuh ke tangan negara-negara yang tidak bersahabat, Australia khawatir akan berdirinya sebuah pangkalan militer di laut oleh negara yang berkuasa dan akan menghancurkan perdagangan Inggris.¹⁰⁸ Ketakutan serupa juga pernah dipublikasikan oleh sebuah surat kabar pertama Australia, *Melbourne Argus*, pada bulan Februari 1902.¹⁰⁹ Surat kabar tersebut menuliskan:

“...*the trouble in Timor is interesting to Australian seeing that...Port Dili, the scene of outrages, is closer to port Darwin than Hobart is to Melbourne*”.

¹⁰⁶ Peter Hastings. “The Timor Problem II: Some Australian Attitudes 1903-1941”. *Australian Outlook*, Vol. 29, No. 2, August 1976, hlm. 180

¹⁰⁷ Timor Timur telah menjadi koloni Portugis sejak tahun 1904 melalui perjanjian antara Portugis dengan Belanda. Perjanjian tersebut berisikan mengenai peresmian pembagian Pulau Timor menjadi dua bagian. Akan tetapi perjanjian tersebut tetap mendatangkan perselisihan hingga pada tahun 1946 perselisihan antara Portugis dan Belanda ini dibawa ke Pengadilan Arbitrase di Den Haag. Pengadilan Arbitrase memutuskan bahwa Belanda tetap menguasai Timor bagian barat dan Portugis mendapatkan Pulau Timor bagian timur dan juga mendapatkan Pulau Atauro (utara Dili) dan daerah Oekusi di Pantai Utara Timor bagian barat. Lihat lampiran 3.1. J. Kristiadi. “Dekolonialisasi Timor Timur”. *Analisa*, No. V. 1986. hlm. 931-932

¹⁰⁸ *Loc. Cit*, hlm. 180.

¹⁰⁹ Helen Hill. *The Timor Story*. Victoria: Timor Information Service. 1976. hlm. 2.

Dalam tulisan tersebut telah terlihat bahwa kedekatan jarak antara Timor Timur yang hanya 400 mil dari Australia, telah memberikan rasa ketertarikan bagi Australia untuk melihat peristiwa apa saja yang sedang terjadi di Timor Timur. Hal ini juga menggambarkan rasa khawatir yang sudah mendominasi pemikiran Australia terutama masyarakat Australia Utara terhadap Indonesia, sehingga segala sesuatu yang terjadi di Timor Timur akan membuat Australia khawatir.

Ketakutan akan keberadaan Jerman di Timor Timur telah mewarnai kehidupan Australia hingga usai Perang Dunia I (1914-1918) karena suatu berita terbitan surat kabar Darwin, *The Northern Territory Times*, yang menuliskan bahwa terjadi negosiasi antara Jerman dan Portugis mengenai pembelian Pulau Timor oleh Jerman.¹¹⁰ Berita ini tentu saja memberikan kekhawatiran yang besar bagi Australia, terlebih lagi beredar sebuah berita bahwa ketertarikan Jerman atas sebagian dari Pulau Timor Timur dimaksudkan untuk mendirikan sebuah basis Angkatan Laut Jerman di wilayah tersebut.¹¹¹

Pasca Perang Dunia I, Timor Timur terus menjadi bahan diskusi di Australia. Akan tetapi, diskusi kali ini mengenai ketertarikan Australia untuk memiliki Pulau Timor Timur. Salah satu bentuk ketertarikan Australia terhadap Timor Timur dibuktikan dengan sebuah ide seseorang dari *University Of Melbourne* yang disampaikan kepada Perdana Menteri Andrew Fischer pada Bulan April 1915.¹¹²

Ide tersebut mengenai pembentukan wilayah Timor Timur untuk dijadikan sebagai sebuah tempat peristirahatan musim panas bagi masyarakat Australia, khususnya Australia Utara. Akan tetapi ide tersebut ditolak oleh Sekretaris Luar Negeri Attlee Hunt, ia menganggap bahwa menjadikan Timor Timur sebagai sebuah tempat peristirahatan akan memakan biaya banyak dan tidak berguna karena masyarakat Australia akan lebih memilih pergi ke tempat lain dibandingkan ke Timor Timur.¹¹³

Sejak tahun 1920-an, kekhawatiran Australia mulai berubah. Australia tidak lagi merasa khawatir terhadap Jerman melainkan mulai khawatir terhadap

¹¹⁰ Peter Hastings. "The Timor Problem II...". hlm. 180-182.

¹¹¹ *Ibid.*

¹¹² *Ibid.*, hlm 185

¹¹³ *Ibid.*

Jepang. Australia melihat kekuatan Jepang yang meskipun merupakan negara baru namun memiliki kekuatan yang cukup hebat. Kekhawatiran Australia terhadap minat Jepang terhadap Timor Timur, mulai dirasakan oleh E.L.Piesse sebagai Kepala Departemen Urusan Pasifik yang memperhatikan koalisi politik di Wilayah Pasifik dan Timur Jauh.

Pada saat kunjungannya ke Timur Jauh, ia menulis sebuah memorandum yang ditujukan kepada Sekretaris Perdana Menteri pada 9 Maret 1920. Piesse menuliskan bahwa selama masa perang, terdengar isu mengenai ketertarikan Jepang untuk membeli Makau dari Portugis dan bila memungkinkan Jepang juga berharap untuk dapat memiliki Timor timur.¹¹⁴ Kekhawatiran Australia semakin besar pada tahun 1930-an, yaitu dengan ancaman kekuatan Jepang yang akan masuk ke Asia Tenggara. Jepang mulai masuk ke Timor Timur secara resmi ditandai dengan adanya kepemilikan saham Jepang pada perusahaan pertanian Portugis, yaitu *Sociedade Agricola Patria E Trabalho* (SAPT).¹¹⁵

Pada saat Perang Dunia II sudah mulai mendekat, Australia semakin yakin bahwa Jepang akan melakukan serangan terhadap Timor Timur. Meskipun Portugis belum menyatakan perang dengan Jepang, namun Australia meminta kepada Inggris dan Belanda untuk mengirimkan pasukan sekutu ke Timor Timur sebagai bentuk dari kekuatan pertahanan. Pada tanggal 17 Desember 1971, pasukan yang terdiri dari pasukan Australia dengan bantuan dari pasukan Belanda mendarat di dekat Dili. Pasukan ini dikenal dengan nama *Sparrow Force*.¹¹⁶

Pasca Perang dunia II, Pemerintahan Buruh melalui Menteri Luar Negerinya Dr. Evatt, melihat bahwa kekuasaan portugis di Timor Timur tidak lagi efektif. Ia mengatakan bahwa Australia seharusnya 'menginvasi' Timor Timur mengingat wilayah tersebut merupakan wilayah yang cukup sensitif bagi Australia. Pernyataan Evatt ini, juga sepaham dengan pernyataan yang

¹¹⁴ *Ibid*, hlm 187

¹¹⁵ SAPT merupakan instansi Pemerintahan Portugis yang bergerak dalam bidang pertanian di Timor Timur. Untuk selengkapnya dapat dilihat di Peter Hastings. "The Timor Problem II...", hlm. 192.

¹¹⁶ Nevil Shute. "Introductory Chapter" dalam Bernard Callinan, *Independent Company*, Victoria: William Heinemann Australia. 1989. hlm. xvii.

dikeluarkan oleh Percy Spender dari Partai Liberal di depan *House of Representative* pada 18 juli 1944.¹¹⁷

Percy mengatakan bahwa seharusnya Australia menganeksasi Timor Timur karena alasan keamanan. Meskipun demikian, Australia tidak pernah melakukan aneksasi terhadap Timor Timur. Australia bahkan harus menerima bahwa Timor Timur tetap berada dalam kekuasaan Portugis, hal tersebut dilakukan Australia untuk menghormati hubungan sekutu antara Inggris dan Portugis.

Ketertarikan Australia pada isu Timor Timur kembali mencuat sejak tahun 1974. Hal tersebut terlihat jelas dengan beberapa keikutsertaan Australia secara langsung ke dalam permasalahan yang dialami oleh Timor Timur. Keikutsertaan Australia tersebut, menandai perhatian Australia yang semakin besar terhadap Timor Timur dan juga masih terdapat kekhawatiran Australia bila Pulau Timor Timur jatuh ke dalam kekuasaan negara-negara tidak bersahabat yang dapat mengancam keamanan di wilayah tersebut.

Ketertarikan Australia pada Timor Timur setelah tahun 1974, dapat dibagi ke dalam tiga tahapan waktu, yaitu pada masa proses integrasi dengan Indonesia (1974-1976), pada masa integrasi dengan Indonesia (1976-1999), dan yang terakhir masa Referendum Timor Timur sebagai sebuah proses Timor Timur untuk menjadi sebuah negara yang merdeka (1999-2002). Ketiga tahapan waktu tersebut dapat memperlihatkan hubungan antara Australia-Indonesia yang berfluktuasi terkait dengan kebijakan kedua negara mengenai isu Timor Timur yang selalu menjadi topik diskusi yang menarik bagi kedua negara.

III. 1. PROSES INTEGRASI TIMOR TIMUR (1974-1976)

Pada saat terjadi kudeta di Portugis yang dikenal dengan nama Revolusi Bunga pada tanggal 25 April 1974,¹¹⁸ menghasilkan dua program politik baru

¹¹⁷ *Commonwealth Parliamentary Debates: House of Representative*, 18 July 1944, hlm. 109.

¹¹⁸ Kudeta Portugis yang dikenal dengan nama Revolusi Bunga merupakan suatu kudeta militer yang diprakarsai oleh sejumlah besar perwira muda. Perwira muda ini mendirikan sebuah wadah resmi untuk melakukan kudeta dengan nama *Movimento das Forcas Armada* atau yang disingkat *Movimento* atau *MFA*. Kudeta militer ini dilakukan untuk memaksa duet Salazar/Caetano yang berhaluan diktator-otoriter-fasis untuk mundur dari jabatannya. Lebih lengkapnya lihat P. Gregor

yang diterapkan oleh Portugis kepada koloni-koloninya yaitu politik demokratisasi dan politik dekolonisasi.¹¹⁹

Kudeta yang terjadi di Portugis, tidak hanya membawa perubahan bagi Portugis saja tetapi juga memberikan perubahan bagi negeri-negeri jajahannya. Dalam melangsungkan politik dekolonialisasi, Portugis di bawah pimpinan Jenderal Antonio de Spínola, memberikan janji-janji kepada wilayah jajahan yang dapat memberikan harapan bagi negeri-negeri tersebut untuk memperjuangkan kemerdekaan negeri.

Di Timor Timur, Portugis memberikan janji berupa pengembalian hak sipil, termasuk hak-hak demokrasi; pembubaran Partai Aksi Nasional Rakyat (ANP);¹²⁰ penghapusan polisi rahasia yang menjadi hantu bagi rakyat; peniadaan sensor pers; dan rakyat bebas untuk membentuk partai-partai politik serta mengambil bagian dalam penyusunan kebijaksanaan pemerintah. Selain itu, Pemerintah Portugis juga memberikan tiga opsi untuk rakyat Timor Timur dalam menentukan nasibnya sendiri. Ketiga opsi tersebut adalah: Pertama, asosiasi Timor dengan Portugis; Kedua, Timor yang merdeka; dan opsi ketiga adalah integrasi Timor dengan negara tetangga, Indonesia.¹²¹

Bagi rakyat Timor Timur, politik dekolonisasi yang dijalankan oleh Portugis menjadi salah satu kesempatan untuk membentuk partai-partai politik yang menjadi wadah bagi suara rakyat. Terdapat lima partai politik di Timor Timur, yaitu UDT (*Uniao Democratica Timorese*), Fretilin (*Frente Revolucionaria de Timor Leste Independente*), dan Apodeti (*Associacao Popular*

Neonbasu SVD. *Peta Politik Dan Dinamika Pembangunan Timor Timur*. Jakarta: Yanense Mitra Sejati. 1997. hlm.40.

¹¹⁹ Terdapat dua kelompok penentu strategi politik di Portugis setelah peristiwa Revolusi Bunga di negara tersebut. Kehadiran dua kelompok ini memberikan dampak dengan menimbulkan dua versi politik dekolonisasi yang akan dijalankan oleh Portugis terhadap negeri-negeri jajahan. Versi pertama adalah versi Spínola yang bersifat konservatif dan versi kedua adalah versi *Movimento* yaitu gerakan yang bersifat radikal dan konsekuan. Meskipun kedua kelompok ini memiliki sikap yang berbeda namun memiliki latar belakang dan motif yang sama yaitu berusaha untuk tidak menanggung beban yang diberikan oleh perang kolonial di Afrika. Dapat dikatakan bahwa politik dekolonisasi yang dijalankan oleh Portugis bukanlah dilandasi oleh tuntutan zaman atau kesadaran negara tersebut bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa sehingga segala bentuk penjajahan di dunia harus dihapuskan. J. Kristiadi, *ibid*, hlm. 928.

¹²⁰ Pada Masa Penjajahan Portugis, hanya ada satu partai pemerintahan yaitu Partai Pemerintahan Aksi Nasional Rakyat (ANP). *Ibid*, hlm. 929.

¹²¹ Bantarto Bantoro. "Dimensi Internasional Masalah Timor Timur". *Analisa*, No. V, 1986, h. 961

Democratica Timorese), KOTA (*Klibur Oan Timor Aswa'in*), dan *Trabalhista*.¹²² Selain lima partai politik resmi di atas, terdapat pula satu partai politik yaitu ADITLA (*Associação Democrática da Integração de Timor Leste a Austrália*), namun partai ini hilang dengan sendirinya karena tidak mendapat dukungan dari Australia.¹²³

Partai UDT terbentuk pada tanggal 11 Mei 1974.¹²⁴ UDT didirikan oleh tokoh-tokoh Partai Aksi Nasional Rakyat Timor Portugis yang telah dibubarkan oleh Pemerintahan Portugis yang baru. Pada awal partai ini terbentuk, terdapat tiga kelompok di dalam UDT.¹²⁵ Kelompok pertama berada di bawah pimpinan Ir. Mario Viegas Carascalao yang menghendaki rakyat Timor Timur untuk menentukan nasib Timor Timur sendiri. Kelompok kedua adalah kelompok Moutinho yang menghendaki Timor Timur berintegrasi dengan Portugis, dan kelompok ketiga berada di bawah pimpinan Domingus da Oliveira yang menginginkan Timor Timur berintegrasi dengan Indonesia. Di antara ketiga kelompok di atas, kelompok yang dipimpin oleh Mario Viegas Carascalao merupakan kelompok dengan pendukung terkuat, sehingga UDT menghendaki rakyat Timor Timur untuk menentukan nasib sendiri.

Sembilan hari kemudian, yaitu pada 20 Mei 1974 berdiri Partai Politik ASDT (*Associação Social Democrática Timorese*) yang disponsori oleh Jose Manuel Ramos Horta.¹²⁶ ASDT kemudian berganti nama menjadi Fretilin dan menganut sistem FRELIMO (*Frente de Libertação de Mocambique*) yang berhaluan Marxis dalam perjuangan memperjuangkan kemerdekaan serta menerapkan pola MPLA (Gerakan Kerakyatan bagi Pembebasan Angola).¹²⁷ Tujuan dan cita-cita politik Fretilin adalah membentuk negara merdeka Timor Timur dengan pemerintahan sendiri tanpa berlindung di bawah pemerintahan Portugis ataupun Indonesia.

Partai ketiga adalah Partai AITI (*Associação Para a Integração de Timor na Indonésia*) yang berdiri pada tanggal 27 Mei 1974 oleh Fernando Osorio

¹²² Untuk proses pendirian partai dapat dilihat pada P. Gregor Neonbasu SVD, *ibid*, hlm. 44. Lihat Lampiran 3. 4.

¹²³ P. Gregor Neonbasu SVD, *ibid*, hlm. 46

¹²⁴ J. Kristiadi, *ibid*. hlm. 930

¹²⁵ *Ibid*.

¹²⁶ *Ibid*, hlm. 931.

¹²⁷ P. Gregor Neonbasu SVD, *ibid*, hlm. 45

Soares.¹²⁸ Partai AITI kemudian berubah nama menjadi Apodeti. Apodeti merupakan wadah untuk kelompok yang memiliki aspirasi untuk berintegrasi dengan Indonesia, akan tetapi ada pula aspirasi lainnya yaitu menggabungkan Timor Timur dengan Timor Barat dan memerintah sendiri namun partai ini akhirnya mencapai kesepakatan untuk berintegrasi dengan Indonesia.¹²⁹

Pada tanggal 8 November 1974 lahir Partai Politik APMT (*Associacao Popular Monarquica Timorenses*) yang didirikan oleh Thomas Ximenes, APMT kemudian berganti nama menjadi KOTA.¹³⁰ Anggota dari partai ini sebagian besar keturunan *liurai* (raja). Partai terakhir yang hadir pada masa dekolonisasi adalah Partai Partindo Trabalhista atau lebih dikenal dengan Trabalhista. Partai ini dibentuk pada 5 September 1974 dan sebagian besar anggotanya adalah kaum buruh.¹³¹

Partai ADITLA didirikan oleh Henrique Pereira. Pereira merupakan seorang pebisnis di Timor Timur, ia tidak berasal dari kalangan politik. Meskipun demikian, ia pernah membantu Pasukan Australia di Timor Timur pada Perang Dunia II dan tetap menjaga hubungan dengan beberapa Pasukan Australia ketika mereka kembali ke Sydney. Hal inilah yang membuat Pereira memiliki sebuah jaringan untuk mendapatkan tanda resmi dalam membentuk suatu organisasi.¹³²

Partai ADITLA didirikan oleh adanya kesadaran bahwa pilihan untuk berintegrasi dengan Indonesia tidak disukai oleh sebagian besar rakyat Timor Timur namun mereka juga menyadari bahwa Timor Timur belum mampu untuk menjadi sebuah negara yang merdeka secara utuh. Akan tetapi, pada 12 Maret 1975, Partai ADITLA ditolak kehadirannya oleh Pemerintah Australia. Di dalam berita sebuah surat kabar *A Voz de Timor*,¹³³ Pemerintah Australia menyatakan bahwa Timor Timur tidak akan berintegrasi ke dalam Wilayah Persemakmuran Australia dan berharap tidak dikaitkan dengan ADITLA.¹³⁴ Dengan tidak

¹²⁸ J. Kristiadi, *ibid*, hlm 932.

¹²⁹ *Ibid*.

¹³⁰ *Ibid*.

¹³¹ *Ibid*.

¹³² Bill Nicol. *Timor: A Nation Reborn*. Jakarta: Equinox Publishing. 2002. hlm 63

¹³³ *A Voz de Timor*, merupakan sebuah surat kabar Pemerintah Timor Portugis yang anti terhadap Pemerintah Indonesia. E.M. Tomodok. *Hari-Hari Akhir Timor Portugis*. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya. Cet. 2. 1996. hlm 244

¹³⁴ *Ibid*, hlm 64.

didapatkan dukungan dari Australia, partai ini pun menghilang dari dunia politik di Timor Timur.

Perbedaan pandangan kelima partai politik ini tidak jarang menimbulkan bentrokan antar partai politik, bahkan perbedaan pandangan ini mulai meningkat menjadi konflik bersenjata diantara masyarakat Timor Timur yang menimbulkan pergolakan dan perang saudara di Timor Timur. Perang saudara yang terjadi di Timor Timur telah memberikan situasi yang menjadikan wilayah tersebut sebagai wilayah yang rawan.

Melihat perubahan yang terjadi di Portugis, Indonesia menyambut baik perubahan tersebut dan menganggap bahwa peristiwa tersebut dapat memberikan kesempatan bagi rakyat Timor Timur untuk mempercepat proses kemerdekaan. Sikap Indonesia yang mendukung proses dekolonisasi Timor Timur tertuang dalam memorandum dari Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik yang ditujukan kepada salah satu tokoh Fretilin yaitu Jose Manuel Ramos Horta.

Dalam memorandum yang dituliskan pada tanggal 17 Juni 1974 tersebut, Adam Malik menyatakan tiga hal penting yaitu bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa, bahwa Indonesia tidak bermaksud untuk melakukan ekspansi, dan bahwa Indonesia akan menjaga hubungan baik dengan siapapun yang berkuasa di Timor Timur.¹³⁵ Surat yang dikirimkan oleh Adam Malik mencerminkan sikap Indonesia terhadap Timor Timur hingga bulan September 1974, hal ini disebabkan oleh beberapa perkembangan penting yang timbul. Perkembangan-perkembangan tersebut akhirnya memaksa Indonesia untuk meninjau kembali kebijakannya terhadap Timor Timur, diantaranya adalah pertemuan antara Presiden Soeharto dengan Perdana Menteri Whitlam di Wonosobo pada tanggal 5 September 1974.¹³⁶

Pada pertemuan tersebut, Whitlam menyatakan bahwa “kemerdekaan Timor Timur tidak akan langgeng dan sia-sia, sehingga pilihan terbaik adalah Timor Timur masuk ke dalam wilayah Indonesia”. Dalam pernyataan tersebut, terlihat keragu-raguan dari Australia bahwa Timor Timur dapat memperoleh kemerdekaan, terlebih lagi situasi perekonomian dan sistem pertahanan Timor

¹³⁵ Kristio Wahyono. *Sepuluh Tahun Tragedi Di TimTim: Timor Target*. Banda Aceh: Krueng Aceh. Juli 2009. hlm. 112

¹³⁶ *Ibid.*

Timor yang masih lemah. Pernyataan tersebut diungkap dalam suatu laporan tidak rahasia Departemen Luar Negeri Australia tanggal 11 September 1974.¹³⁷

Munduranya Spinola dari jabatan Presiden Portugis pada tanggal 30 September 1974 dan digantikan oleh Jenderal Da Costa Gomez yang berasal dari golongan radikal, juga menjadi salah satu unsur perubahan kebijakan Indonesia terhadap Timor Timur.¹³⁸ Portugis kemudian merencanakan penguasaan Timor Timur kepada Fretilin. Pandangan Fretilin yang kekiri-kirian dan adanya keikutsertaan Partai Komunis Portugis (PCP) di dalam partai tersebut.

Situasi Timor Timur pada awal tahun 1975 semakin tidak stabil. Hal ini dikarenakan tiga partai politik besar di Timor Timur, yaitu yaitu UDT, Fretilin, dan Apodeti. Kampanye-kampanye yang dilakukan oleh tiga partai politik tersebut, mulai menciptakan alur baru yaitu dengan koalisi antara UDT-Fretilin pada tanggal 20 Januari 1975.¹³⁹ Akan tetapi, koalisi ini berlangsung singkat karena tindakan sepihak dari UDT yang menilai bahwa Fretilin lebih mementingkan kepentingan partainya dan tidak mau patuh terhadap ketentuan-ketentuan dalam koalisi serta unsur komunis yang semakin kuat di dalam tubuh Partai Fretilin.

Gagal berkoalisi dengan Fretilin, UDT mengadakan pendekatan dengan Apodeti. UDT bahkan meminta bantuan kepada Indonesia berupa pendidikan kader-kader guna membendung komunis dan bantuan biaya agar mereka bisa mengadakan kontak dengan negara-negara ASEAN, Taiwan, dan Australia.¹⁴⁰ Portugis yang melihat ketidakstabilan yang semakin meningkat di Timor Timur, mengadakan pertemuan dengan ketiga partai politik di Timor Timur namun Fretilin menolak untuk hadir. Ketidakhadiran Fretilin ini disebabkan oleh ketidaksediaan untuk duduk bersama dengan kedua partai politik yang memutuskan untuk bergabung dengan Indonesia.

¹³⁷ Bantarto Bandoro, *Ibid*, hlm. 976-977. Lihat juga “Kisah Integrasi Timor Timur”, *Republika*, 14 Oktober 1999.

¹³⁸ Pada tanggal 30 September 1974, Presiden Spinola mundur dari jabatan Presiden dan digantikan oleh Jenderal Da Costa Gomez. Mundurnya Spinola, menunjukkan perubahan konstelasi politik di Portugis yaitu dengan tersisihnya golongan moderat dan semakin menonjolnya peranan golongan radikal. Kedatangan Lemos Pires sebagai Administrator yang baru di Timor Timur membawa misi untuk melepaskan Timor Timur secepatnya mungkin dari Timor Timur dan memberikan kekuasaan kepada Fretilin yang didukung oleh PCP (*Partido Comunista Português*). Lebih lengkapnya lihat J.Kristiadi, *ibid*, hlm. 937.

¹³⁹ *Ibid*, hlm.49.

¹⁴⁰ *Ibid*, hlm. 944.

Sikap Fretilin, tidak hanya memperlambat proses dekolonisasi di Timor Timur tetapi juga terus menimbulkan suasana kacau di Timor Timur. Situasi Timor Timur semakin memanas ketika UDT melakukan gerakan yang menyerupai kudeta pada tanggal 11 Agustus 1975 yang dimaksudkan sebagai sikap tegas untuk melaksanakan gerakan revolusioner anti-pengaruh komunis dengan sasaran utama untuk membersihkan Timor Timur dari tangan-tangan komunis, baik di tubuh Fretilin maupun di dalam Pemerintah Portugis untuk Timor Timur.¹⁴¹

Bagi Fretilin, upaya UDT ini dilakukan untuk meng kudeta Fretilin. Kesalahpahaman antar kedua partai politik ini, mengakibatkan perang saudara antara Fretilin-UDT yang memaksa Portugis untuk mengungsikan warga negaranya dan warga negara asing yang sedang berada di Timor Timur. Pada tanggal 25 Agustus 1975, Portugis meminta bantuan kepada Indonesia untuk mengirimkan kapal ke Timor Timur.

Kekuatan militer Fretilin yang kuat, membuat UDT dan Apodeti meminta bantuan kepada Indonesia berupa bantuan medis, pangan, hingga senjata-senjata berat.¹⁴² Akibat dari perang saudara ini, Indonesia juga menerima ratusan pengungsi yang berasal dari Timor Timur melalui perbatasan Timor Timur dan Indonesia. Melihat situasi Timor Timur, Indonesia tidak dapat bersikap diam terutama pada saat kedatangan para pengungsi ke wilayah perbatasan antara Indonesia dengan Timor Timur untuk mencari keamanan. Selain itu UDT dan Apodeti juga berusaha meminta bantuan kepada Indonesia berupa bantuan medis, pangan, hingga senjata-senjata berat.¹⁴³ Bantuan yang diminta oleh kedua partai ini untuk dapat bertahan melawan kekuatan militer Fretilin yang kuat.

Situasi di Timor Timur yang semakin memanas dan kepergian perwakilan Pemerintahan Portugis dari Timor Timur, membuat Indonesia harus bertindak ofensif terutama untuk menjaga keamanan wilayah perbatasan dan kestabilan di wilayah Pasifik. Indonesia lalu mengambil tindakan militer untuk

¹⁴¹ P. Gregor Neonbasu SVD, *ibid*, hlm. 50.

¹⁴² J. Kristiadi, *ibid*, hlm 949.

¹⁴³ J. Kristiadi, *ibid*.

meredam pertempuran senjata antara Fretilin dengan UDT dan Apodeti. Operasi Indonesia ini dikenal dengan nama Operasi Komodo.¹⁴⁴

Sikap Australia sendiri, terlihat seperti mendukung tindakan Indonesia terutama dalam dengar pendapat di dalam Parlemen Australia mengenai permohonan bantuan dari Portugis untuk mengirimkan pasukan Australia ke Timor Timur yang kemudian permintaan ini ditolak oleh Whitlam. Whitlam menyatakan bahwa keamanan rakyat Timor timur merupakan tanggung jawab penuh Pemerintahan Portugis.¹⁴⁵

Melihat “invasi” yang dilakukan oleh Indonesia ke Timor Timur, Australia yang berada di bawah kepemimpinan Whitlam bersikap seolah-olah setuju tanpa protes (*acquiescence*) bahkan cenderung diam. Walaupun demikian Australia masih berkeberatan dengan penggunaan kekuatan militer di Timor Timur. Sikap diam yang diambil oleh Whitlam ini, dianggap oleh pihak oposisi sebagai dukungan terhadap faksi garis keras yang dijalankan oleh Ali Moertopo dan Jenderal lainnya.¹⁴⁶

Sikap yang diambil oleh Whitlam ini, disebabkan oleh kebijakan luar negeri Pemerintahan Whitlam yang lebih menitikberatkan pada hubungan dengan negara-negara ASEAN. Akan tetapi, sikap Whitlam dalam menghadapi isu Timor Timur bertentangan dengan prinsip ideologi yang dianut oleh Partai Buruh Australia bahwa kemerdekaan, kebebasan, dan hak menentukan nasib sendiri dianggap sebagai perkembangan yang alamiah. Selain itu sikap diam Whitlam, dianggap mengabaikan kesimpulan yang dibuat *Caucus* Partai Buruh dari Komite Hubungan Luar Negeri dan Pertahanan yang menyatakan bahwa sebagian besar Rakyat Timor Timur menginginkan kemerdekaan dan segala bentuk aksi kekuatan luar tidak dapat dibenarkan.¹⁴⁷

¹⁴⁴ Operasi Komodo merupakan operasi militer terselubung Indonesia yang ditujukan untuk mengusahakan integrasi Timor Timur ke dalam Wilayah Indonesia, operasi ini merupakan ide dari salah seorang penasihat Soeharto yaitu Brigadir Jenderal Ali Moertopo. Michael E. Salla. “Australian Foreign Policy and East Timor”, dalam *Australia Journal of International Affairs* vol.49 no. 2, 2000,

¹⁴⁵ *Ibid*, hlm. 115.

¹⁴⁶ Michael E. Salla. “Australian Foreign Policy...”, hlm. 212.

¹⁴⁷ *Caucus* Partai Buruh terdiri atas seluruh anggota parlemen partai baik yang duduk dalam majelis rendah maupun Senat. *Caucus* bertugas mengarahkan kebijakan-kebijakan Partai Buruh yang telah ditetapkan dalam Konferensi Nasional Partai Buruh, memilih menteri-menteri ketika Partai Buruh memerintah dan menteri-menteri “bayangan” ketika Partai Buruh menjadi pihak oposisi, dan juga berfungsi untuk menegakkan disiplin bagi anggota-anggota parlemen dari Partai



Gambar 3.1
Geoff Hook, "Ahem..."

Sumber: www.geoffhook.com/archive/get_archive1e08.html?image=1975/11/jeff271175&ref=politics/asia

Kartun diatas merupakan gambaran hubungan antara Soeharto dan Whitlam yang mengalami masa-masa indah. Hal ini ditandai dengan beberapa kunjungan antara Soeharto dan Whitlam guna membahas isu Timor Timur, seperti kedatangan Soeharto pada tanggal 3-5 April 1975 ke Townsville. Dalam pertemuan tersebut, Whitlam menyatakan bahwa Timor Timur harus berintegrasi ke dalam Wilayah Indonesia dengan melalui *self-determination* oleh rakyat Timor Timur sesuai dengan keinginan dari Portugis.¹⁴⁸

Akan tetapi masa-masa indah hubungan antara Australia-Indonesia terkait Timor Timur mulai mengalami perubahan ketika dipecatnya Whitlam dari posisi Perdana Menteri pada tanggal 11 November 1975. Posisi Whitlam ini, digantikan oleh Malcolm Fraser yang berasal dari Partai Liberal. Pada awal pemerintahan Fraser, tidak terjalin kontak pribadi antara Fraser dengan Soeharto. Hal ini tentu saja berbeda ketika Whitlam menjabat sebagai Perdana Menteri. Putus kontak pribadi dengan Soeharto, karena Fraser cenderung membelokkan

Buruh. Untuk lebih lengkap lihat Zulkifli Hamid. *Sistem Politik Australia*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999, hlm. 211.

¹⁴⁸ Michael E. Salla. "Australian Foreign Policy...", hlm. 212

kembali orientasi politik luar negeri Australia ke Eropa atau Amerika dan memandang Asia Tenggara sebagai kawasan yang kurang penting.¹⁴⁹

Perdana Menteri Fraser melalui Menteri Luar Negerinya Peacock, menunjukkan dukungan terhadap wilayah Timor Timur yang merdeka dan mengambil posisi menentang segala kebijakan Whitlam terutama sikap diamnya.¹⁵⁰ Pertentangan Australia terhadap Indonesia masih berlanjut, hal ini ditandai dengan pernyataan Peacock pada tanggal 26 November 1975 bahwa tindakan Indonesia melalui intervensi militer di Timor Timur tidak dibenarkan dan penolakan Whitlam untuk turut terlibat dalam masalah Timor Timur telah mendorong Indonesia untuk melakukan intervensi militer yang tidak diinginkan.¹⁵¹

Fraser lebih mendukung gerakan-gerakan *United Nation Fourth (decolonisation) Commitee* yang melakukan negosiasi diantara pihak yang bertikai untuk melakukan misi kunjungan ke Timor Timur dan mendukung penentuan nasib sendiri bagi rakyat Timor Timur. Selain itu Fraser juga mengangkat dua hal yang menjadi topik perdebatan di dalam Parlemen Australia.¹⁵² Hal pertama adalah harus diadakan pertanggungjawaban oleh Whitlam tentang hasil masalah Timor Timur dan mempersalahkan Whitlam atas kegagalan kebijakannya untuk melibatkan Australia menangani masalah Timor Timur dengan baik serta menyudutkan Whitlam atas persengkongkolan dengan aksi Indonesia di Timor Timur dan juga menuntut Whitlam karena telah memberikan dorongan kepada Indonesia untuk melakukan aksi di Timor Timur.¹⁵³ Hal kedua, yaitu kritik Menteri Luar Negeri Peacock terhadap tindakan

¹⁴⁹ *Ibid.*

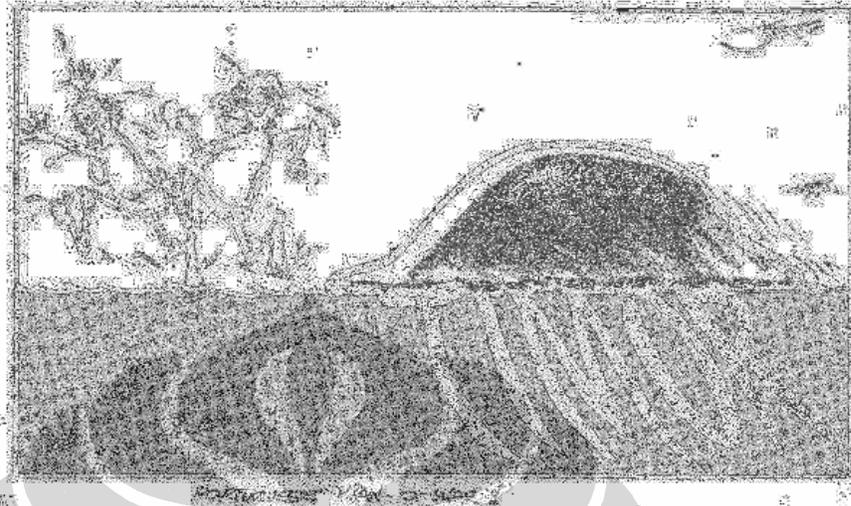
¹⁵⁰ Pada faktanya pada suatu debat di Parlemen Australia mengenai Timor Timur pada bulan Februari 1975 atas inisiatif Peacock, ia menyatakan pandangan umum pihak oposisi yang melihat bahwa ketidakmampuan rakyat Timor Timur untuk berdiri sendiri seperti negara bekas jajahan portugis yang lain. Oleh karena itu pihak oposisi mengusulkan agar Portugis tetap diizinkan memegang kontrol untuk beberapa waktu di Timor Timur sambil mendukung program penentuan nasib sendiri bagi rakyat Timor hingga cukup matang untuk melakukan segalanya sendiri dan barulah dapat menjadi negara yang mereka. *Ibid*, hlm. 213.

¹⁵¹ Nancy Vivian. "Australians and The Timor Issues: II". *Australian Outlook*, Vol. 32, No. 3 April 1978, hlm 241.

¹⁵² *Ibid.*

¹⁵³ Dorongan Whitlam ini berdasarkan telegram antara Australia dengan Indonesia yang berjumlah 484 (1974-1976) dan file rahasia yang telah dibuka dan diterbitkan dalam sebuah buku berjudul *Australia and the Indonesia Incorporation of Portuguese East Timor* yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Alexander Downer di Parlemen Australia pada tanggal 12 September 2000.

Indonesia dengan menekankan keterlibatan Indonesia terhadap segala sesuatu yang terjadi di Timor Timur.



Gambar 3.2

Geoff Hook, "East Timor Situation Begins"

Sumber: www.geoffhook.com/archive/get_archive7030.html?image=1975/11/jeff271175&ref=politics/asia

Meskipun Fraser mengecam sikap diam Whitlam terhadap "Invasi" yang dilakukan oleh Indonesia, namun dalam setiap kebijakan yang diambil oleh Fraser juga tidak mengikutsertakan Australia dalam setiap peristiwa yang terjadi di Timor Timur. Kebijakan yang diambil oleh Whitlam dan Fraser dapat dilihat pada kartun di atas, dimana keduanya, baik Fraser maupun Whitlam, tidak ingin terlibat lebih dalam mengenai masalah yang terjadi di Timor Timur. Hal ini juga ditandai oleh dukungan yang diberikan Fraser terhadap pembentukan Negara Timor Timur yang merdeka. Dukungan ini, tercermin pada pertemuan sebanyak tiga kali dengan pemimpin Fretilin yaitu Jose Ramos Horta.

Akan tetapi, Australia masih belum mengambil sikap yang konsisten mengenai kebijakan Timor Timur. Hal ini tercermin dari pernyataan Australia yang tidak mengakui proklamasi kemerdekaan secara sepihak mengenai pendirian

Salah satu isi telegram adalah Perdana Menteri Whitlam melalui Sekretaris Pribadinya Peter Walensky, menyarankan kepada Pemerintahan Soeharto untuk melakukan serangan bawah tanah ke Timor Timur. Kristio Wahyono, *ibid*, hlm. 115.

sebuah negara dengan nama Republik Demokratik Timor Timur oleh Fretilin pada tanggal 28 november 1975.¹⁵⁴

Menteri Luar Negeri Peacock menyatakan bahwa Pemerintahan Australia tidak mengakui pernyataan kemerdekaan sepihak Fretilin dan tetap mendukung penyelesaian secara damai.¹⁵⁵ Sebagai reaksi dari proklamasi sepihak partai Fretilin, pada tanggal 29 November 1975 gerakan gabungan Apodeti, Fretilin, UDT, KOTA, dan Tralabista juga melakukan proklamasi yang menyatakan bahwa Timor Timur sebagai bagian dari Indonesia dan tidak mengakui proklamasi sepihak kemerdekaan yang dilakukan oleh Fretilin.¹⁵⁶

Integrasi Timor Timur ke dalam Wilayah Indonesia mulai terasa nyata pada saat keempat partai gabungan Timor Timur mendirikan Pemerintahan Sementara Timor Timur (PSTT). PSTT didirikan pada tanggal 17 Desember 1975 untuk menjamin pemerintahan yang tertib hukum dan keamanan sehingga kehidupan rakyat Timor Timur dapat dipulihkan. Berdasarkan Act No. 1/AD, 1976, Apodeti, UDT, KOTA, dan Tralabista membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Wilayah Timor Timur.¹⁵⁷

Pada tanggal 31 Mei 1976, DPR Wilayah Timor Timur melangsungkan sidang paripurna terbuka dengan topik pembahasan mengenai penentuan masa depan Timor Timur. Sidang Paripurna DPR Wilayah Timor Timur menghasilkan keputusan untuk segera berintegrasi dengan Indonesia dengan mengeluarkan petisi yang mendesak Pemerintahan Indonesia agar integrasi Timor Timur ke dalam Indonesia dilaksanakan.¹⁵⁸

Pada tanggal 5 Juni 1976, delegasi besar rakyat Timor Timur yang terdiri dari 41 orang dengan dipimpin oleh Ketua Eksekutif PSTT, Arnaldo dos

¹⁵⁴ Proklamasi yang dilakukan oleh Fretilin ini merupakan dampak dari hilangnya garis perjuangan Fretilin, terutama ketika Dili berada di dalam kepungan lawan. Kemenangan yang didapat oleh koalisi partai Apodeti, KOTA, Tralabista, dan UDT dengan bantuan dari Indonesia, memaksa Komite Sentral Fretilin untuk melakukan proklamasi kemerdekaan Negara Republik Demokrasi Timor Timur dan mengangkat serta menetapkan Xavier do Amaral sebagai Presiden. J. Kristiadi, *Ibid*, hlm. 951-952.

¹⁵⁵ *Ibid*, hlm. 952.

¹⁵⁶ Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan oleh gabungan partai Apodeti, UDT, KOTA, dan Tralabista dilakukan pada 29 November 1975 namun ditandatangani pada tanggal 30 November 1975. *Ibid*, hlm. 953.

¹⁵⁷ *Ibid*, hlm 956-958.

¹⁵⁸ *Ibid*.

Reis Araujo, tiba di Jakarta¹⁵⁹. Kedatangan delegasi Timor Timur bertujuan untuk merealisasikan keputusan sidang paripurna DPR Wilayah Timor Timur dengan memberikan Petisi Rakyat Timor Timur untuk berintegrasi dengan Indonesia. Petisi rakyat Timor Timur diterima oleh Presiden Soeharto pada tanggal 7 Juni 1976, Presiden Soeharto juga menyatakan bahwa akan mengirim suatu tim yang terdiri dari wakil-wakil pemerintah, DPR-RI, dan berbagai kalangan organisasi masyarakat¹⁶⁰.

Setelah kedatangan delegasi Indonesia pada tanggal 24 Juni 1976 ke Timor Timur, maka pada tanggal 29 Juni 1976 diadakan Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin oleh Presiden Soeharto¹⁶¹. Dalam sidang tersebut, tim yang terdiri dari 36 orang dan dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri, Amir Machmud, memberikan laporannya bahwa Petisi yang diberikan oleh DPR Wilayah Timor Timur memang mencerminkan keinginan rakyat Timor Timur untuk berintegrasi dengan Indonesia.

Atas dasar Sidang Kabinet Paripurna, Presiden Soeharto memutuskan untuk menanggapi secara positif keinginan Rakyat Timor Timur dengan segera melaksanakan proses integrasi wilayah itu ke dalam Indonesia. Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang penggabungan Timor Timur ke wilayah Indonesia pun diajukan kepada DPR-RI pada tanggal 1 Juli 1976, akhirnya pada tanggal 15 Juli 1976 RUU tersebut disahkan menjadi Undang-Undang tentang Penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Republik Tingkat I Timor Timur¹⁶². Undang-Undang yang dikenal dengan UU No.7 Tahun 1976 itu kemudian ditandatangani oleh Soeharto di Bina Graha pada tanggal 17 Juli 1976¹⁶³,

Menanggapi proklamasi yang dilakukan baik oleh Fretilin maupun partai politik gabungan Apodeti, UDT, Tralalihista, dan KOTA, Australia tidak mengakui proklamasi keduanya. Sikap Australia ini menunjukkan indikasi bahwa Australia belum tentu setuju dengan Timor Timur yang berdiri sebagai sebuah negara yang merdeka dan kemungkinan berhaluan komunis. Walaupun demikian,

¹⁵⁹ *Ibid.*

¹⁶⁰ *Ibid.*

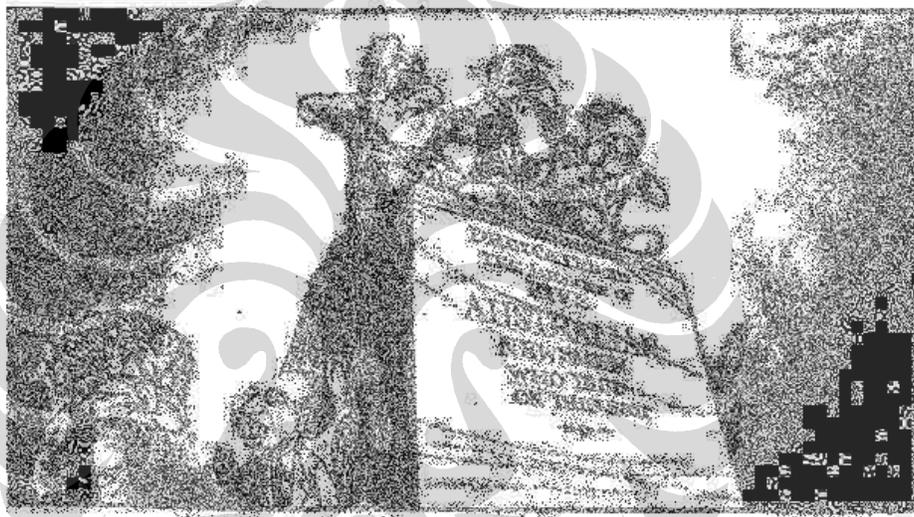
¹⁶¹ *Ibid.*, hlm. 958-959

¹⁶² *Ibid.*

¹⁶³ “Good bye (kalau jadi) Timor Timur” *Forum Keadilan*, No 22, tahun VII, 8 Februari 1999, hlm.16

adanya ‘invasi’ yang dilakukan oleh Indonesia ke Timor Timur juga tidak disetujui oleh Australia.

Hubungan antara Australia-Indonesia bertambah buruk ketika terjadi peristiwa tewasnya lima wartawan Australia di Balibo pada tanggal 16 Oktober 1975. Lima wartawan Australia yaitu, Greg Shackleton, Tony Stewart, Gary Cunningham, Britons Malcolm Rennie, dan Brian Peters, dikabarkan tewas dalam pertempuran yang terjadi di Dili antara Fretilin dan Militer Indonesia.¹⁶⁴ Peristiwa ini menjadi awal pertentangan antara media Australia dan Indonesia.



Gambar 3.3

Geoff Hook, “Lest We Forget”

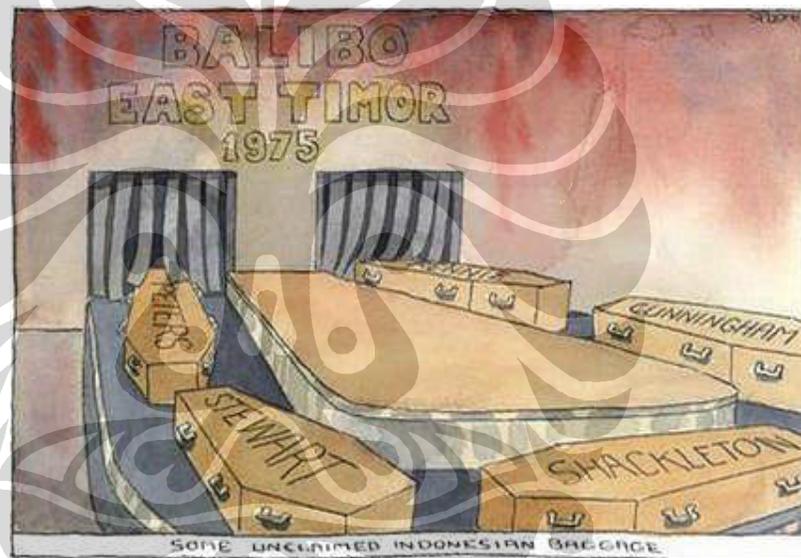
Sumber: www.geoffhook.com/archive/get_archive553.html?image=1976/11/jeff271175&ref=politics/asia

Tewasnya kelima wartawan Australia tersebut disebabkan oleh sebuah serangan gabungan tentara UDT-Apodeti-KOTA ke Balibo pada pertengahan Oktober 1975, dalam pertempuran tersebut ditemukan lima belas orang dari pihak Fretilin tewas, empat orang kulit putih dalam keadaan terbakar, dan satu orang kulit putih dalam keadaan membusuk.¹⁶⁵ Akan tetapi pada saat itu, Pemerintah Indonesia belum memastikan bahwa kelima orang kulit putih tersebut adalah warga Negara Australia.

¹⁶⁴ “New Search For Answer On Balibo Five”. *Sydney Morning Herald*. 17 Oktober 2005

¹⁶⁵ Philips Kitley, Richard Chauvel, dan David Reeve. *Australia Di Mata Indonesia: Kumpulan Artikel Pers Indonesia 1973-1988*. Jakarta: PT. Gramedia, Anggota IKAPI, 1989, hlm 79.

Ketidakpastian yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia kepada Australia, menyebabkan terjadi aksi mogok di kalangan buruh pelabuhan Sydney dengan tidak mau mengurus kapal-kapal Indonesia yang sedang berlabuh di Sydney. Hal ini kemudian memaksa Pemerintah Australia untuk meminta secara tegas penyelidikan mengenai nasib kelima wartawan mereka di Timor Timur melalui Indonesia.¹⁶⁶ Setelah diadakan penyelidikan dan observasi dengan ditemukannya beberapa dokumen dan kamera yang diduga oleh milik dari wartawan tersebut, maka Pemerintah Indonesia melalui surat resmi dari Presidium Apodeti, D. Guilherme Maria Gonvalces, memberitahukan bahwa kelima orang kulit putih yang ditemukan tewas adalah wartawan Australia.



Gambar 3.4

John Spooner, "Balibo Five"

Sumber: <http://www.abc.net.au/rn/360/galleries/2009/2571516/JohnSpoonersCartoon.htm>

Meskipun peristiwa tersebut menjadi awal dari pertentangan antara media Australia dan Indonesia, namun kepentingan kedua negara untuk berhubungan baik tidak dapat dihalangi. Permintaan dari kalangan wartawan Australia untuk diadakan penyelidikan khusus mengenai kelima rekan mereka yang dibunuh, tidak ditanggapi secara serius oleh Pemerintah Australia. Australia

¹⁶⁶ *Ibid*, hlm 79.

bahkan cukup puas dengan penjelasan yang diberikan oleh Presidium Apodeti melalui Pemerintah Indonesia.¹⁶⁷

Australia tidak hanya puas dengan penjelasan yang diberikan tetapi juga tidak melontarkan protes keras terhadap Indonesia mengenai kejadian di Balibo tersebut. Australia bahkan membantu menutup-nutpi tanggung jawab Indonesia atas pembunuhan tersebut.¹⁶⁸ Sikap yang diambil oleh Australia untuk menjaga hubungan baik dengan Indonesia terlihat dari kunjungan Bob Hawke sebagai ketua dari ACTU (*Australian Council of Trade Union*) pada April 1976.¹⁶⁹

III. 2. MASA INTEGRASI TIMOR TIMUR (1976-1999)

Sejak tanggal 17 Juli 1976, Timor Timur resmi menjadi Propinsi ke-27 di Indonesia. Setelah Timor Timur berintegrasi ke Indonesia, masalah mengenai daerah tersebut belum surut. Integrasi Timor Timur pada tahun 1976, memancing reaksi keras dalam sidang Majelis Umum PBB tahun 1976 yang memandang integrasi tersebut sebagai *fait accompli* Indonesia. Indonesia dianggap tidak melaksanakan hak penentuan nasib Timor Timur berdasarkan Piagam PBB dan Resolusi Majelis Umum PBB No. 1514 (1960) dan juga ada tuduhan terhadap intervensi militer Indonesia di Timor Timur terhadap proses dekolonisasi Timor Timur¹⁷⁰.

Pada saat integrasi Timor Timur ke dalam Wilayah Indonesia, Australia mengambil sikap diam. Hal ini terlihat dari sikap delegasi Australia yang masih mengambil sikap diam dalam perdebatan mengenai masalah Timor Timur di Komite Dekolonisasi pada bulan Desember 1976. Bahkan Menteri Luar Negeri Peacock juga tidak menyinggung masalah Timor Timur dalam pidatonya di muka Sidang Umum PBB tanggal 29 September 1976.¹⁷¹

¹⁶⁷ Kristio Wahyono. *Sepuluh Tahun Tragedi Timtim...*, hlm 167.

¹⁶⁸ Jill Jolliffe. *Cover-Up: The Inside Dtory of The Balibo Five*. Melbourne: Scribe Publications. 2001, hlm 130.

¹⁶⁹ *Ibid*, hlm 80.

¹⁷⁰ Resolusi Majelis Umum PBB No. 1514 (1960) ini berisikan tentang Deklarasi pemberian kemerdekaan bagi negara-negara dan orang-orang negara jajahan terutama berkaitan dengan hak asasi manusia. www.bappenas.go.id/get-file-server/node/6418, diunduh pada tanggal 11 Juni 2010, pukul 13.10 wib.

¹⁷¹ Sue Nichterlein. "Australia : Courier or Courtesan? The Timor Issue Revisited". *Australian Outlook*, vol.36, no. 1, April 1982, hlm. 47-50.



Gambar 3.5
Geoff Hook, "Disembarking!"

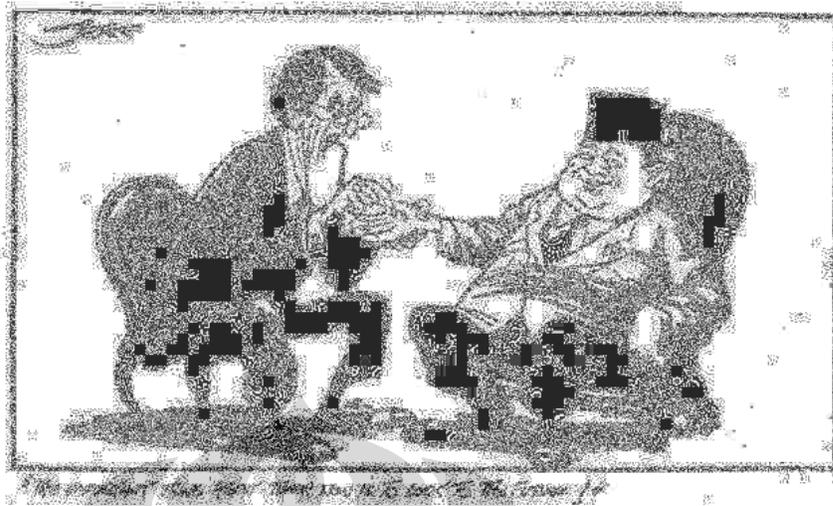
Sumber: www.geoffhook.com/archive/get_archive553.html?image=1976/11/jeff271175&ref=politics/asia

Sikap Fraser berubah setelah kunjungannya ke Indonesia pada bulan Oktober 1976,¹⁷² kunjungan Fraser ini untuk mengadakan perbincangan dengan Soeharto namun tidak ditemukan catatan mengenai topik yang menjadi perbincangan. Meskipun demikian, beberapa surat kabar memberitakan bahwa kedatangan Fraser kali ini juga akan membahas mengenai dua hal yaitu Timor Timur dan mengenai kebocoran pembicaraan Fraser di Beijing pada bulan Juni 1976.¹⁷³ Kebocoran pembicaraan antara Fraser dengan Perdana Menteri Cina, Hua Kuo-Feng yang jatuh ke tangan wartawan Indonesia ini mengenai kekhawatiran situasi di Indonesia di masa depan karena rezim yang berkuasa pada saat itu, sehingga Australia ragu untuk memberikan bantuan untuk mendukung pembangunan rakyat Indonesia. Terkait isu Timor Timur, baik di Jakarta maupun Canberra, terdapat beberapa spekulasi mengenai sikap yang akan Fraser ambil mengenai integrasi Timor Timur sebagai propinsi ke-27 Indonesia, yaitu menolak, mengakui, atau mengakui secara berangsur-angsur.¹⁷⁴

¹⁷² Bantarto Bandoro, *ibid*, hlm 977

¹⁷³ Philips Kitley, Richard Chauvel, dan David Reeve, *ibid*, hlm 83.

¹⁷⁴ *Ibid*, hlm 84-85.



Gambar 3.6
Geoff Hook, “Fraser Ignores The Past”

Sumber: www.geoffhook.com/archive/get_archivef672.html?image=1976/10/jeff111076&ref=politics/asia

Salah satu hal yang juga menjadi pertimbangan bagi Fraser untuk merubah kebijakan Australia adalah sumber daya alam yang terkandung di Celah Timor. Pertimbangan ini dilakukan oleh Fraser setelah adanya komunikasi diplomatik rahasia dari Duta Besar Australia untuk Jakarta Richard Woolcott kepada Perdana Menteri Whitlam.¹⁷⁵

Dalam komunikasi tersebut, Woolcott menyatakan bahwa suatu perjanjian mengenai kandungan minyak di Laut Timor antara Australia dan Timor Timur (Celah Timor) lebih mudah dirundingkan dengan Indonesia daripada dengan Portugis atau dengan Timor Timur yang merdeka. Oleh karena itu, Fraser akhirnya memberikan pengakuan *de facto* atas integrasi Timor Timur ke Indonesia pada tahun 1978.¹⁷⁶ Hal ini dilakukan Fraser juga untuk mencapai suatu kesepakatan antara Australia dan Indonesia mengenai Celah Timor.¹⁷⁷

¹⁷⁵ Kristio Wahyono, *Ibid*, hlm. 115.

¹⁷⁶ Alan Renouf. *Malcom Fraser And Australian Foreign Policy*. Sydney: Australian Professional Publications, 1986, hlm. 167.

¹⁷⁷ Celah Timor atau *Timor Gap* merupakan suatu daerah lautan antara Timor, Indonesia, dan Australia. Daerah lautan ini belum menemukan kesepakatan antara Portugis dan Australia dalam menetapkan perbatasan ketika Timor Timur masih berada di dalam kekuasaan Portugis. Pada saat integrasi Timor Timur ke dalam wilayah Indonesia, Australia mulai melakukan beberapa perundingan untuk menetapkan batasan wilayah di daerah lautan tersebut. Ketertarikan Australia terhadap Celah Timor disinyalir karena ditemukan kandungan sumber daya alam berupa minyak dan gas dengan jumlah yang tidak sedikit. Untuk lebih lengkap lihat Ferdi Tanoni. *Skandal Laut*

Fraser semakin menunjukkan dukungannya terhadap Indonesia dengan menolak pemberian izin oleh Menteri Luar negeri Australia, Peacock, untuk mengantarkan sukarelawan PBB ke wilayah FRETILIN di Timor Timur dengan menggunakan kapal Angkatan Udara Australia. Perubahan Fraser ini mendapatkan respon negatif dari masyarakat Australia, pada awal mula kepemimpinannya, Fraser, sangat mendengarkan pandangan masyarakatnya mengenai kebijakan yang seharusnya diambil oleh Australia akan tetapi kepentingan nasional Australia juga mengambil peranan yang cukup signifikan dalam kebijakan yang akan diambil oleh Fraser.



Gambar 3.7

Peter Nicholson, "East Timor Peacock Soeharto Tidy Neighbours"
Sumber : http://www.nicholsoncartoons.com.au/cartoon_2022.html

Dukungan Fraser terhadap Indonesia semakin terlihat dengan adanya pernyataan dari Menteri Luar Negeri Andrew Peacock yang menegaskan bahwa Pemerintah Australia menginginkan hubungan baik dan bersahabat dengan Indonesia meskipun sebagian besar dari pers Australia dan masyarakat Australia menentang integrasi Timor Timur ke Indonesia.¹⁷⁸ Menurut Downer, yang paling penting dalam hubungan kedua Negara ini adalah pendapat dari masing-masing pemerintah.¹⁷⁹

Timor: Sebuah Barter Politik-Ekonomi Canberra-Jakarta?. Jakarta: Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB), 2008.

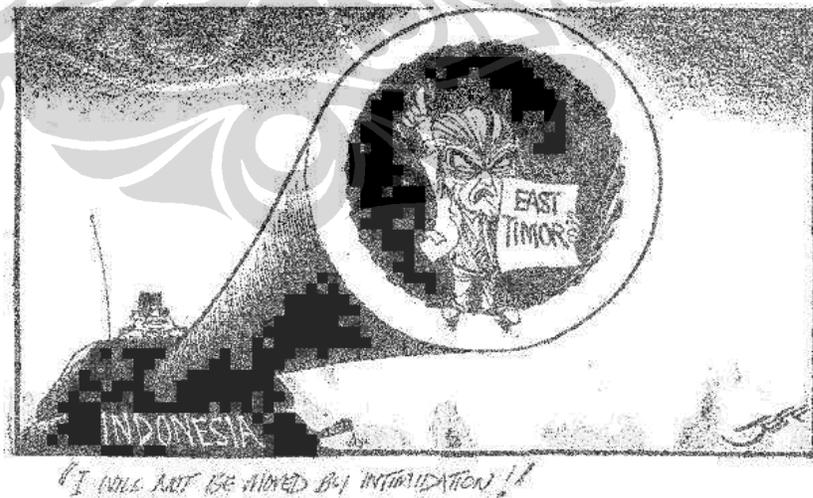
¹⁷⁸ Philips Kitley, Richard Chauvel, dan David Reeve, *ibid*, hlm 93

¹⁷⁹ *Ibid*.

Masalah Timor Timur kembali muncul dalam Pemerintahan Australia ketika pergantian Perdana Menteri pada bulan September 1983. Hasil Pemilihan Umum Australia memberikan kemenangan bagi Bob Hawke yang berasal dari Partai Buruh untuk menjadi Perdana Menteri Australia. Sama dengan pemerintahan sebelumnya, isu Timor Timur juga menjadi kendala bagi hubungan yang baik antara kedua negara bertetangga pada masa kepemimpinan Bob Hawke.

Pada masa awal kepemimpinan Hawke, ia menunjukkan sikap yang kurang bersahabat dengan Indonesia. Sikapnya ditunjukkan oleh Hawke dengan mencoba mementahkan masalah Timor Timur melalui program kerja yang diberikan pada Kongres Australia Juli 1982.¹⁸⁰ Program kerja Hawke dan penolakan dari platform Partai Buruh pada tahun 1982 menyatakan bahwa Australia akan menolak pengakuan atas integrasi Indonesia terhadap Timor Timur.

Akan tetapi, kedatangan Hawke ke Jakarta pada bulan Juni 1983, dan pernyataan Hawke yang berbunyi “Kita sama sekali tidak bisa melenyapkan atau menghapuskan apa yang terjadi di masa lalu”,¹⁸¹ menunjukkan bahwa Hawke paham akan peristiwa yang terjadi di Timor Timur dan berusaha akan meningkatkan pengertian masyarakat Australia terutama Partai Buruh mengenai peristiwa Timor Timur.



¹⁸⁰ Bantarto Bandoro, *ibid*, hlm 978.

¹⁸¹ Ronald Nangoi. “Menerobos Kesulitan Hubungan Australia-Indonesia”. *Suara Karya*, 3 Juni 1983.

Gambar 3.8
Geoff Hook “Moved?”

Sumber: www.geoffhook.com/archive/get_archive179b.html?image=1984/07/jeff120784&ref=politics/asia

Sikap Australia yang mendua pada masa Hawke semakin terlihat dari pernyataan Menteri Luar Negeri Bill Hayden, atas nama Pemerintah Australia ia mencatat bahwa Indonesia telah memasukkan Timor Timur ke dalam wilayah Indonesia tetapi juga menyatakan keprihatinan bahwa suatu tindakan penentuan nasib sendiri yang diawasi secara internasional belum terjadi di Timor Timur.¹⁸²

Pernyataan Hayden di atas, merupakan sebuah bahasa diplomatik yang menunjukkan bahwa Australia tidak menolak atau mengakui kebijakan pengakuan pemerintah yang sebelumnya. Hawke pun mengeluarkan pernyataan yang mendapatkan juga reaksi keras dari kalangan kiri Partai Buruh. Kalangan kiri Partai buruh menuduh Hawke telah menyimpang dari kebijakan luar negeri yang telah ditetapkan oleh partainya dalam kongres tahun 1982.¹⁸³

Perubahan sikap Hawke terhadap Indonesia ini didasari oleh adanya keinginan Hawke untuk memiliki hubungan baik dengan Indonesia. Keinginan Hawke tersebut, terlihat pada saat konferensi nasional Partai Buruh Australia ke-36 tahun 1984. Dalam konferensi itu, terjadi perdebatan mengenai program politik baru Partai Buruh kelompok Hawke-Hayden,¹⁸⁴ akan tetapi Hawke dan Hayden berhasil meyakinkan anggota-anggota dari Partai Buruh bahwa seharusnya pengakuan yang diberikan oleh pemerintah sebelumnya tidak perlu disesalkan.

Usaha agar dapat memiliki hubungan baik dengan Indonesia terus dilakukan oleh Pemerintah Australia, dengan mengakui secara *de Jure* terhadap kedaulatan Indonesia di Timor Timur pada tanggal 22 Agustus 1985 di depan Parlemen Australia.¹⁸⁵ Setelah mengakui integrasi pada tahun 1985 dan juga menerima secara formal Timor Timur sebagai bagian dari Indonesia yang sah, Hawke justru mengubah hubungan kedua negara dari hubungan khusus menjadi

¹⁸² *Loc. Cit.*, hlm 978

¹⁸³ *Ibid.*

¹⁸⁴ Bantarto Bandoro, “Dimensi Internasional Masalah Timor Timur”. *Analisa*, No. V, 1986, h. 979

¹⁸⁵ *The Jakarta Post*, 20,22,23 Agustus 1985.

hubungan biasa antara 1986-1988.¹⁸⁶ Sikap Bob Hawke terhadap Indonesia, dianggap cenderung hati-hati bahkan cenderung keras dan justru menyebabkan hubungan kedua negara ini renggang terutama pada saat Hawke menurunkan kadar hubungan bilateral.¹⁸⁷

Meskipun demikian, pada tahun 1991, Hawke melalui Menteri Luar Negerinya Gareth Evans menghasilkan suatu keuntungan yang praktis dalam hubungan bilateral dengan Indonesia yaitu dengan tercapai kesepakatan mengenai pengelolaan Celah Timor pada tahun 1989.¹⁸⁸ Dengan perjanjian ini, Hawke telah lebih memberikan pengakuan terhadap integrasi Timor Timur ke dalam wilayah Indonesia dengan suatu ikatan perjanjian resmi secara hukum internasional antara dua institusi kenegaraan.

Meskipun kebijakan yang terhadap isu Timor Timur telah melunak namun hubungan Australia-Indonesia kembali renggang pada saat peristiwa berdarah di Pemakaman Umum Santa Cruz Dili terjadi pada 12 november 1991.¹⁸⁹ Peristiwa ini mendapatkan kecaman dari negara-negara barat termasuk Australia.

¹⁸⁶ Ikrar Nusa Bhakti. "Kilas Balik Hubungan Indonesia-Australia dan Prospeknya di Masa Datang". *Jurnal Harian CIDES*, No. 2, 1996, hlm 269

¹⁸⁷ Ikrar Nusa Bhakti. "Kunjungan Keating Memperkukuh Hubungan Bertetangga". *Kompas*, 20 April 1992.

¹⁸⁸ Ferdi Tanoni, *Ibid*, hlm 121.

¹⁸⁹ Peristiwa yang dikenal dengan nama Peristiwa Santa Cruz ini merupakan peristiwa penembakan pemrotes Timor Timur di Kuburan Santa Cruz. Insiden ini dilatarbelakangi oleh aksi protes pemuda Timor Timur terhadap Pemerintahan Indonesia pada penguburan rekan-rekan mereka yang dicurigai oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) mendukung kemerdekaan Timor Timur. Dalam prosesi pemakaman, para pemuda yang sebagian besar mahasiswa menggelar spanduk untuk penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan, pada saat ini TNI memasuki kuburan dan mulai menembak. Untuk lebih lengkap lihat Joseph Nevins. *Pembantaian Timor Timur: Horor Masyarakat Internasional*. Yogyakarta: Galangpress, 2008, hlm 43.



Gambar 3.9

Geoff Hook “The Santa Cruz Massacre”

Sumber: www.geoffhook.com/archive/get_archive3e39.html?image=1991/11/jeff151191&ref=politics/asia

Peristiwa berdarah di Pekuburan Umum Santa Cruz tersebut, selalu menjadi sebuah ajang argumentatif oleh sebagian besar masyarakat Australia yang anti-integrasi Timor Timur. Peristiwa ini juga menjadi serangan politik yang seringkali menyudutkan pihak Indonesia, apapun yang terjadi di pemakaman Santa Cruz telah membantu Timor Timur untuk mematahkan isolasi internasionalnya.

Pada saat peristiwa Santa Cruz terjadi, terdapat sejumlah wartawan media asing yang menyaksikan dan memberitakan mengenai prosesi pemakaman di Santa Cruz. Penembakan yang dilakukan oleh Tentara Indonesia tersebut, direkam oleh beberapa wartawan yang berada di Santa Cruz, dan dengan rekaman tersebut kekejaman yang terjadi di Timor Timur muncul ke layer-layer televisi di seluruh dunia.¹⁹⁰

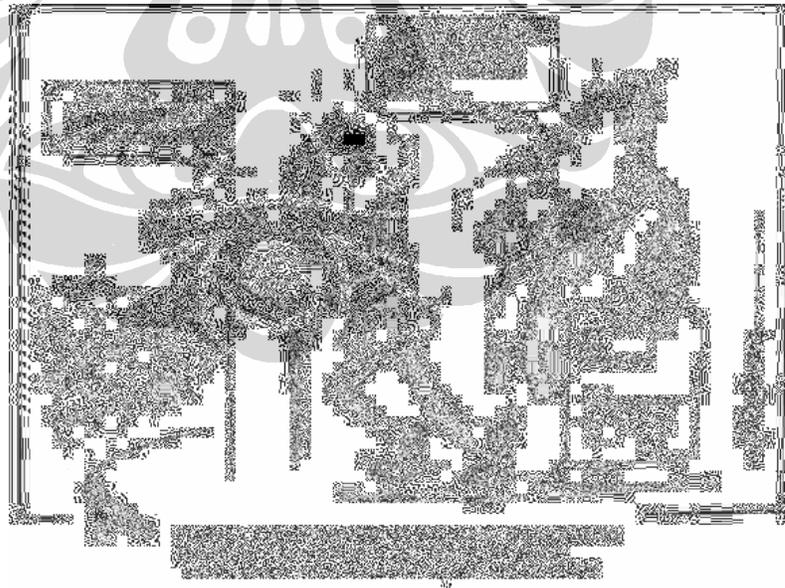
Berbagai surat kabar besar di dunia bereaksi keras atas rekaman video kekejaman di pemakaman Santa Cruz, rekaman tersebut juga mengakibatkan demonstrasi-demonstrasi di Amerika, Kanada, dan negara barat lainnya. Demonstrasi yang terjadi di hampir seluruh dunia ini, menyulitkan posisi

¹⁹⁰ *Ibid*, hlm 44

Indonesia dan memaksa Indonesia untuk mengutarakan penyesalan serta memberhentikan dua komando militer tinggi dengan mengirimkan mereka ke Amerika untuk belajar di Universitas.¹⁹¹

Pemerintah Australia pun menyesal atas peristiwa yang terjadi di Santa Cruz, akan tetapi Australia melihat bahwa Indonesia telah mengambil langkah dan sanksi tegas terhadap Tentara Indonesia yang terlibat pada Peristiwa tersebut.¹⁹² Timor Timur telah menjadi suatu tantangan yang berat bagi Pemerintahan Hawke, berbagai peristiwa yang berkaitan dengan wilayah tersebut telah membuat hubungan Australia-Indonesia mengalami masa-masa indah maupun masa suram. Isu Timor Timur pun belum selesai untuk menjadi topik bagi Pemerintah Australia selanjutnya.

Pada masa Keating, hubungan Australia-Indonesia mencapai hubungan yang teramat manis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.¹⁹³ Hubungan antara Australia-Indonesia pada masa Keating sering digambarkan sebagai hubungan bapak dan anak.¹⁹⁴ Hal ini disebabkan oleh pandangan Keating bahwa 'tidak ada negara yang paling penting bagi Australia, kecuali Indonesia', dan kekagumannya terhadap sosok orang nomor satu di Indonesia, yaitu Soeharto.



¹⁹¹ *Ibid.*

¹⁹² Kristio Wahyono, *ibid*, hlm 35.

¹⁹³ Ikrar Nusa Bhakti. "Kilas balik...", hlm. 295

¹⁹⁴ Vinsensio Dugis. 'Pergantian Kepemimpinan Oposisi Australia, Prospek Hubungan Indonesia-Australia', *Kompas*, 20 Februari 1995, hlm 5

Gambar 3.10
Linieberg, tanpa judul

Sumber: <http://www.pandora.nla.gov.aunph-arch1999Z1999-May20>

Selain itu pergantian Menteri Bill Hayden oleh Evans dan Mochtar Kusumaatmaja dengan Ali Alatas, juga turut berperan dalam membina hubungan baik kedua negara. Kedua Menteri Luar Negeri masing-masing negara ini memiliki pola pikir yang sama sehingga jarang terjadi kesalahpahaman diantara keduanya. Meskipun demikian, hubungan kedua negara tidak dapat terlepas dari beberapa konflik. Terdapat tiga konflik antara Australia dan Indonesia pada masa Pemerintahan Keating yaitu pembatalan pengangkatan Duta Besar Indonesia untuk Australia LetJen TNI-Angkatan Darat (AD) HBL. Mantiri pada 6 juli 1985, pemberian visa sementara oleh Australia kepada 18 imigran gelap asal Timor Timur yang melarikan diri dari Indonesia pada 24 mei 1995, dan yang ketiga mengenai isu soal pembakaran Bendera Merah Putih oleh para demonstiran anti-integrasi di Australia.¹⁹⁵

Ketiga konflik ini pernah membuat hubungan antara Australia-Indonesia renggang namun karena keharmonisan yang ada diantara masing-masing kepala pemerintahan dan juga menteri luar negerinya, konflik-konflik yang terjadi dapat terselesaikan dan hubungan kedua negara pun kembali berjalan baik.



¹⁹⁵ *Ibid*, hlm 308-309

Gambar 3.11
Blood Stains APEC Batik

Sumber : http://www.nicholsoncartoons.com.au/cartoon_58.html

Kebijakan yang diambil oleh Keating mengenai isu Timor Timur merupakan suatu kebijakan yang menyerupai kebijakan yang pernah diterapkan oleh Whitlam pada masa kepemimpinannya. Kebijakan tersebut dikenal dengan Diplomasi Batik,¹⁹⁶ hal ini dikarenakan adanya hubungan yang teramat manis antara Indonesia dengan Australia pada masa Pemerintahan Keating yang menyerupai hubungan manis pada masa kepemimpinan Whitlam. Hubungan baik ini tetap terjaga hingga kemenangan John Howard pada Pemilihan Umum Australia yang diadakan 2 Maret 1996.

Perubahan kepemimpinan yang terjadi di Australia juga turut memberikan perubahan dalam kebijakan yang akan diambil oleh pemerintahan tersebut terkait suatu isu tertentu. Pada saat Howard menjadi Perdana Menteri Australia, ia ingin tetap menjaga hubungan baik yang telah dijalin oleh perdana menteri terdahulunya. Sikap Howard ini dibuktikan dengan kunjungan pertama Howard sebagai Perdana Menteri ke Indonesia.

Walaupun demikian pidato yang ia sampaikan di depan Parlemen Australia mengundang berbagai polemik, ia mengatakan bahwa Australia dan Indonesia sangatlah berbeda. Oleh karena itu, Australia tidak bisa disebut Asia namun Indonesia dan Asia masih tetap penting bagi Australia. Howard juga menyatakan bahwa Australia tidak akan menjadi jembatan bagi Asia dalam hubungannya dengan Eropa.¹⁹⁷ Pidato Howard menunjukkan bahwa Howard mengambil sikap mendua.

Dalam kunjungan ke Jakarta, Howard tidak membicarakan masalah Timor Timur dengan Soeharto, namun ia mengungkapkan bahwa pers Australia sangat kritis bila memberitakan mengenai masalah Timor Timur.¹⁹⁸ walaupun demikian, Howard dan Menteri Luar Negeri Australia Alexander Downer akan

¹⁹⁶ Kristio Wahyono. *Sepuluh Tahun Tragedi Di TimTim: Timor Target*. Banda Aceh: Krueng Aceh, Juli 2009, hlm. 109.

¹⁹⁷ "PM Defends Soft Line On Indonesia" *The Sydney Morning Herald*, Wednesday 18 September 1996, hlm 1.

¹⁹⁸ "Soeharto-Howard Sepakat Hubungan Baik Jadi Kepentingan Bersama", *Kompas*, 18 September 1996 dan pada Niki Savva. "PM Sidesteps Human Rights Issue". *The Age*, Wednesday 18 September 1996, hlm 3.

menjalankan kebijaksanaan ‘keterlibatan konstruksif’ dalam menangani masalah Timor Timur.¹⁹⁹ Australia adalah negara yang sudah mengakui integrasi Timor Timur, tetapi juga mendukung perundingan segitiga Indonesia-Portugis dibawah naungan PBB dan mendukung serta mendanai perundingan antar-orang Timor (*All Inclusive East Timorese Dialogue-AETD*).²⁰⁰



Gambar 3.12
Geoff Hook “Lest We Ignore”

Sumber: www.geoffhook.com/archive/get_archive5f46.html?image=1991/11/jeff151191&ref=politics/asia

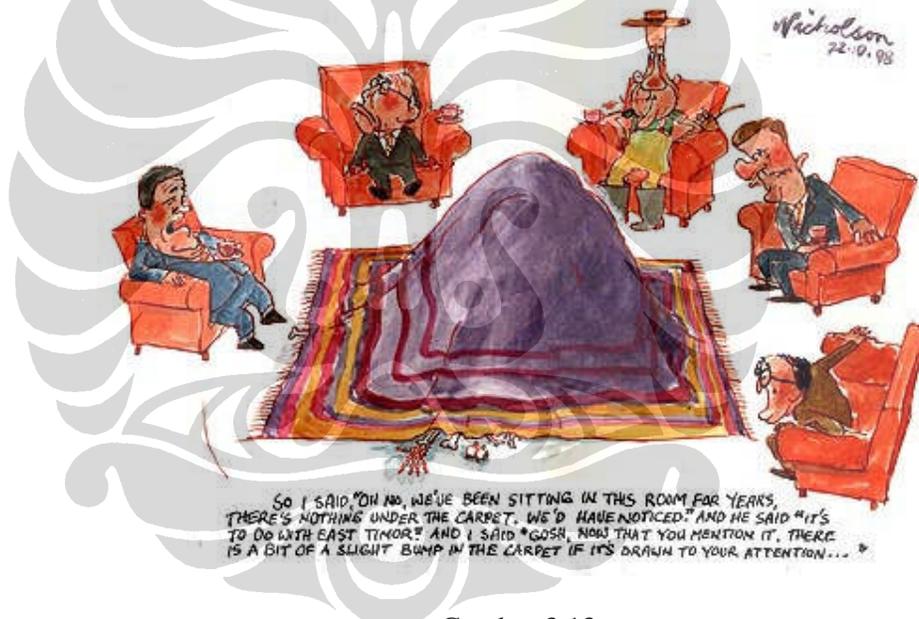
Pada saat terjadi reformasi di Indonesia pada bulan Mei 1998, dengan Soeharto mundur dari jabatan Presiden Indonesia pada 21 Mei 1998 dan digantikan oleh BJ. Habibie. Reformasi di Indonesia merupakan awal perubahan Pemerintahan Indonesia menuju reformasi politik dan membuka peluang besar bagi demokratisasi dengan berdiri partai-partai politik baru yang dibentuk dan menjamin kebebasan berpendapat dalam pers.

¹⁹⁹ Prinsip keterlibatan kostruktif adalah keterlibatan yang diterapkan pada tahun 1991 oleh negara-negara ASEAN dengan bersikap proaktif untuk membantu suatu negara anggota yang punya problem politik yang berat, tetapi dengan catatan tidak melanggar prinsip kedaulatan. Bantuan itu berupa bantuan ekonomi maupun politik demokrasi. Ikrar Nusa Bhakti. “Pelajaran Dari Timor Timur”. *Jurnal PUSLITBANG Politik*, 13-18 September 1999, hlm 33.

²⁰⁰ “Australia Jalankan Keterlibatan Konstruktif Dalam Soal Timor Timur” *Kompas*, 16 April 1996.

Untuk masalah Timor Timur, Habibie akan memberikan status otonomi khusus kepada Timor Timur bahkan hendak membebaskan Xanana Gusmao yang dipenjarakan pada masa Pemerintahan Soeharto.²⁰¹ Pernyataan Habibie ditanggapi secara serius oleh Portugal, PBB, rakyat Timor, dan Australia.

Pada pertengahan 1998, Australia juga mulai menentukan sikapnya terhadap Indonesia. Australia tidak lagi memberikan dukungan penuh terhadap Indonesia terutama mengenai isu Timor Timur, Australia pun kembali membuka luka lama dengan menanyakan peristiwa lima wartawan Australia yang terbunuh di Balibo pada 16 Oktober 1975. Howard pun mulai membentuk suatu penyelidikan untuk mengungkap fakta atas peristiwa tahun 1975 tersebut yang mengakibatkan lima wartawan Australia terbunuh di Balibo.



Gambar 3.13

Peter Nicholson, tanpa judul

Sumber: <http://www.dfat.com/Balibo.htm>

Selain itu Australia juga menanyakan penambahan personal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) di Timor Timur sebanyak 107 personel pada akhir Oktober 1998, sebelumnya Habibie telah mengutarakan niatnya untuk

²⁰¹ Bilveer Singh. *The United Nations, Role In The Birth of Independent East Timor, A Blunder?*. Singapore: Crescent Design Associates, 1999, hlm 172.

berangsur-angsur mengurangi personel ABRI di Timor Timur.²⁰² Isu Timor Timur mulai kembali muncul secara intens di dunia internasional sejak tahun 1999, yang merupakan tahun referendum bagi rakyat Timor Timur terlaksana.

III. 3. MENUJU REFERENDUM (1999-2002)

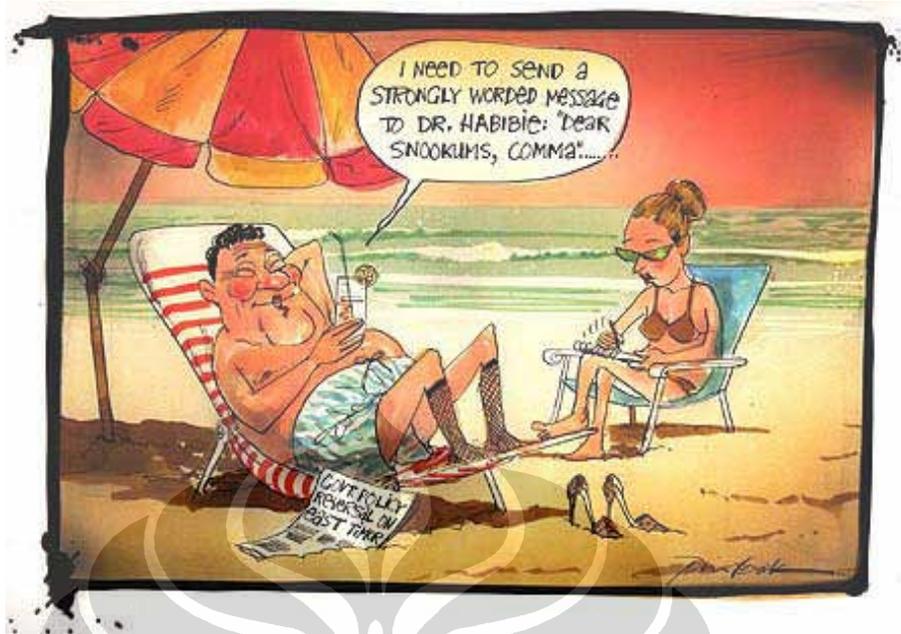
Munculnya isu Timor Timur di dunia internasional pada Tahun 1999 didasari oleh isu yang mencuat tentang penindasan hak asasi manusia di dunia pada umumnya. Selain itu rezim Soeharto yang tumbang di Indonesia dan digantikan oleh BJ. Habibie pada pertengahan Tahun 1998 juga menjadi titik tolak bagi pelaksanaan referendum di daerah Timor Timur. Awal masa pemerintahannya, Habibie menginginkan untuk menjalankan reformasi demokrasi secara utuh dengan diperbolehkan pembentukan partai-partai politik. Salah satu yang menjadi konsentrasi Habibie adalah memberikan Timor Timur status otonomi khusus.

Pemerintah Indonesia, awalnya hanya memberikan status otonomi khusus bagi rakyat Timor Timur, namun pada akhirnya Pemerintah Indonesia berdasarkan keputusan Habibie memberikan referendum bagi rakyat Timor Timur untuk menentukan nasibnya sendiri. Keputusan untuk menjalankan referendum ini, tidak lepas dari adanya peranan Australia.²⁰³ Peranan Australia dalam proses Referendum Timor Timur dibuktikan dengan adanya surat yang diberikan oleh John Howard melalui Menteri Luar Negeri Alexander Downer kepada Presiden Habibie pada tanggal 21 Desember 1998 dan baru dipublikasikan pada 12 Januari 1999.²⁰⁴

²⁰² "Australia Pertanyakan Personel ABRI Di Timor Timur", *Jawa Pos*, Sabtu 31 Oktober 1998, hlm 2.

²⁰³ Kristio Wahyono, *ibid*, hlm 51

²⁰⁴ Untuk mendapatkan kejelasan yang komprehensif mengenai surat tersebut yang ditandatangani oleh Howard pada tanggal 18 Desember 1998 beserta isinya dapat dilihat pada Tim Fischer, *Ballot and Bullet: Seven Days in East Timor*, Australia: Allen and unwin, 2000, hlm. 9-18



Gambar 3.14
Bill Leak, tanpa judul

Sumber: <http://www.pandora.nla.gov.au/nph-arch1999Z1999-May20>

Dalam surat tersebut berisikan mengenai saran Howard dalam menyelesaikan permasalahan Timor Timur, Howard menyetujui otonomi luas yang akan diberikan kepada Timor Timur dan Indonesia juga harus tetap memberikan kesempatan bagi rakyat Timor Timur untuk menentukan masa depannya melalui referendum.

Kebijakan Australia ini, diumumkan oleh Howard kepada media Australia pada 27 Desember 1998.²⁰⁵ Habibie juga mengatakan pada *ABC News Australia* dalam rangka 'The Howard years, the inside story' pada 16 September 2008. Habibie mengatakan bahwa Howard memaksa dirinya untuk melakukan referendum di Timor Timur.²⁰⁶ surat howard ini menekan Habibie sehingga Habibie tidak dapat menahan tekanan tersebut dan para menteri di kabinet pun tidak ada yang menentang.

Tekanan Australia ini dikarenakan, dukungan Australia terhadap Indonesia terkait Timor Timur di PBB sudah mulai berkurang. Hal ini disebabkan

²⁰⁵ Bilveer singh, *The United Nations...*, hlm. 197.

²⁰⁶ Kristio Wahyono, *Ibid*, hlm 51.

oleh dukungan yang juga berkurang dari Amerika.²⁰⁷ Sikap mendua Australia pun jelas terlihat dari beberapa pernyataan Downer ataupun Howard. Dalam suatu kesempatan Menteri Luar Negeri Australia Downer menyatakan bahwa, sikap yang diambil oleh Australia justru tidak menginginkan Timor Timur yang merdeka penuh karena takut perpecahan terjadi di Indonesia. Namun dalam kesempatan lain di Adelaide, Downer menyatakan bahwa Timor Timur yang berdiri sebagai negara yang merdeka memang akan menyusahkan Australia pada masa datang namun cepat atau lambat harus dihadapi oleh Australia bila hal itu terjadi.²⁰⁸



Gambar 3.15
East Timor Self-Determination
Sumber : www.dfat.com/sharpe13199.htm

Kedua pernyataan Australia ini menurut Duta Besar Indonesia untuk Australia Wiryono Sastrohandoyo sangat mengecewakan karena dapat mengancam perundingan segitiga yang selama ini disponsori PBB, ia juga menyatakan bahwa sikap Australia tidak membantu sama sekali upaya yang sedang diwujudkan oleh Indonesia dalam penyelesaian Timor Timur dengan cara adil.²⁰⁹

Dua hari kemudian, salah satu keputusan dalam Sidang Kabinet Bidang Politik dan Keamanan di Bina Graha menyebutkan bahwa pemerintah

²⁰⁷ Kristio Wahyono, *ibid*, hlm. 176.

²⁰⁸ *Op. Cit.*

²⁰⁹ "Menteri Luar Negeri: Tak Mungkin Memberikan Tahanan Rumah Kepada Xanana", *Suara Pembaruan*, Selasa 26 Januari 1999, hlm 11.

mengajukan alternatif yaitu Timor Timur dilepaskan dari Indonesia apabila opsi pemberian status khusus dengan otonomi luas ditolak atau mengalami jalan buntu. Menurut Ali Alatas keputusan ini berawal dari disposisi Habibie sebagai tanggapan dari surat Howard dan berbagai masukan.²¹⁰

Keputusan Habibie itu ditanggapi hangat oleh Australia, bahkan Australia menyatakan siap memainkan peranan lebih besar membantu Timor Timur bila Indonesia memberika kemerdekaan pada Timor Timur. Meskipun demikian, pada 1 Februari 1999, Downer di Radio BBC mengatakan bahwa hal terbaik bagi Timor Timur adalah suatu bentuk otonomi dan Australia lebih suka bila Timor Timur tetap menjadi wilayah otonomi Indonesia.²¹¹ Hal ini juga ditegaskan oleh Howard bahwa Timor Timur sebaiknya memilih bentuk otonomi dengan Indonesia daripada berdiri sendiri, karena bila Timor Timur merdeka akan merepotkan bagi negara donor seperti Australia.



Gambar 3.16
Peter Nicholson, Tanpa Judul
Sumber : www.dfat.com/timorcarts99.htm

²¹⁰ "Timor Timur Dilepas Bila Status Khusus Otonomi Luas Ditolak", *Suara Pembaharuan*, Kamis 28 Januari 1999.

²¹¹ "Menteri Luar Negeri Alexander Downer: Otonomi Pilihan Terbaik Bagi Timor Timut", *Suara Pembaharuan*, Selasa 2 Februari 1999. Lihat juga dalam "Australia Fears Free Timor May Fracture Indonesia", *The Jakarta Post*, 4 Februari 1999.

Downer dalam wawancara di *Channel 7* bahwa Australia belum bersedia ikut serta dalam pasukan penjaga perdamaian di Timor Timur.²¹² Akan tetapi, pernyataan Downer tidak sama dengan yang dilakukan oleh Australia. Melalui Seorang Pejabat Tinggi Angkatan Bersenjata Australia (Australia Defence Forces-ADF), diketahui bahwa Downer telah setuju untuk mengirimkan bantuan 3000 personel angkatan bersenjata dan personel sipil ke Timor Timur. Pengiriman personel ini sebagai bagian dari Pasukan Perdamaian PBB dan di bawah naungan Bendera PBB.²¹³

Dapat dilihat isu Timor Timur telah menjadi permasalahan yang cukup signifikan bagi hubungan Australia-Indonesia. Hal ini terlihat dari kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pemerintahan Australia baik pada masa kepemimpinan Whitlam hingga Howard, Australia selalu mengambil sikap mendua bila terkait masalah Timor Timur yang tidak terlepas dari persepsi Australia terhadap keamanan nasional maupun regional.

²¹² "Downer Menapik Membanjirnya Pengungsi Timor Timur Ke Australia", *Suara Pembaruan*, Minggu 21 Februari 1999.

²¹³ Ikrar Nusa Bhakti. "Kilas Balik...", hlm 195.

BAB IV
PERUBAHAN KEBIJAKAN PEMERINTAH AUSTRALIA TERHADAP
INDONESIA TERKAIT ISU TIMOR TIMUR DALAM KARTUN POLITIK
AUSTRALIA 1974-2002

Selama kurun waktu 65 tahun, Australia dan Indonesia telah menjalin hubungan bertetangga yang berfluktuasi. Hubungan yang berfluktuasi ini tentu saja di dasar oleh beberapa faktor baik faktor internal masing-masing negara maupun faktor eksternal. Kedua faktor tersebut, dapat mempengaruhi salah satu atau bahkan kedua negara dalam mengambil kebijakan luar negeri terhadap negara lain yang akan berdampak pada perubahan kebijakan luar negeri negara masing-masing.

Di dalam konteks hubungan Australia-Indonesia terkait dengan isu Timor Timur, dapat kita lihat bahwa faktor-faktor internal dan eksternal tersebut akan berdampak pada terciptanya hubungan yang harmonis antara kedua negara bertetangga ini atau bahkan mengganggu keharmonisan keduanya. Untuk dapat menjelaskan perubahan kebijakan Australia terhadap Indonesia terutama yang berkaitan dengan isu Timor Timur, perlu diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kebijakan Australia terhadap Indonesia baik faktor internal maupun faktor-faktor eksternal.

IV. 1. FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBIJAKAN LUAR NEGERI AUSTRALIA

Untuk dapat melihat perubahan kebijakan luar negeri Australia terhadap Indonesia yang berkaitan dengan isu Timor Timur, maka terlebih dahulu harus kita lihat faktor-faktor yang menjadi penentu kebijakan luar negeri Australia terhadap Indonesia. Faktor-faktor tersebut umumnya terdiri atas dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal memiliki peran yang cukup signifikan dalam pengambilan kebijakan luar negeri Australia, faktor ini telah memberikan pola dan turut mempengaruhi perumusan serta pelaksanaan kebijakan luar negeri Australia.

Faktor eksternal umumnya berasal dari situasi yang terjadi di dunia internasional. Faktor ini dapat dipandang penting atau tidak penting terhadap

politik luar negeri suatu negara, tergantung pada pandangan pemerintah yang berkuasa. Bila pemerintah melihat faktor eksternal tersebut penting bagi negaranya maka akan terjadi perubahan kebijakan luar negeri di negaranya.

IV.1.1 Faktor Internal

Faktor internal Australia dalam pengambilan kebijakan luar negerinya terkait isu Timor Timur terdiri dari dua faktor yaitu, peran Perdana Menteri Australia dan kepentingan Nasional Australia. Kedua faktor ini dapat memperlihatkan orientasi kebijakan luar negeri Australia yang akan membentuk suatu pola kebijakan dalam pemerintah Australia.

a. Peran Perdana Menteri di Australia

Peran Perdana Menteri sangat sentral dalam perpolitikan Australia, Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan eksekutif sehari-hari, sehingga ia menjadi pusat perhatian dalam dunia politik di Australia. Salah satu tugas utama dari Perdana Menteri Australia adalah melakukan koordinasi terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah.

Melalui departemen yang dipimpin oleh Perdana Menteri, *Departement of Prime Minister and Cabinet (PMC)*, seorang Perdana Menteri tidak hanya dapat mengkoordinasikan tetapi juga mengontrol kebijakan-kebijakan departemen lain. Divisi-divisi yang terdapat di dalam PMC bertugas untuk membuat dan mencarikan alternatif kebijakan yang ”membayangi” kebijakan-kebijakan dari kementrian.²¹⁴

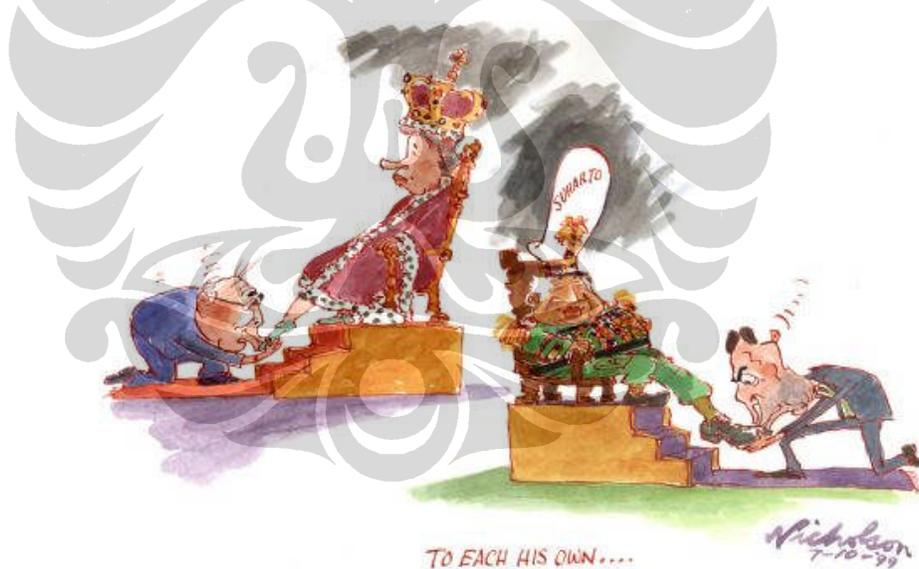
Peran Perdana Menteri terhadap pelaksanaan kebijakan luar negeri terkadang juga didasari oleh kepentingan Perdana Menteri untuk menaikkan atau menstabilkan popularitasnya. Hal ini dilakukan untuk menarik simpati masyarakat Australia untuk pemilihan umum mendatang. Kebijakan yang diambil oleh seorang Perdana Menteri Australia, tidak luput dari salah satu faktor lain yaitu partai politik tempatnya bernaung. Di Australia terdapat dua partai politik yang berkuasa yaitu Partai Liberal yang berkoalisi dengan Partai Country dan Partai Buruh, kedua partai ini memiliki basis pendukung masing-masing. Bagi Partai

²¹⁴ Zulkifli Hamid. *Sistem Politik Australia*. Jakarta : LIP-FISIP-UI dan PT. Remaja Rosdakarya. 1999. hlm. 99.

Liberal sebagian besar pendukungnya adalah kaum kapitalis kelas menengah Australia, sedangkan Partai Buruh sebagian besar pendukungnya berasal dari Serikat Buruh di Australia.²¹⁵ Kedua partai ini juga memiliki perbedaan dalam mengambil kebijakan yang akan dijalani oleh negaranya terkait suatu isu atau peristiwa.

Partai Liberal yang sebagian besar pendukungnya adalah kaum kapitalis Australia memiliki orientasi politik ke negara-negara barat seperti Inggris dan Amerika, sedangkan Partai Buruh yang sebagian besar pendukungnya berasal dari Serikat Buruh Australia lebih berorientasi politik ke Asia Tenggara seperti Indonesia dan Cina.²¹⁶

Partai Liberal yang sebagian besar pendukungnya adalah kaum kapitalis Australia memiliki orientasi politik ke negara-negara barat seperti Inggris dan Amerika, sedangkan Partai Buruh yang sebagian besar pendukungnya berasal dari Serikat Buruh Australia lebih berorientasi politik ke Asia Tenggara seperti Indonesia dan Cina.²¹⁷



Gambar 4.1

Keating Kisses Suharto's Boots

Sumber : http://www.nicholsoncartoons.com.au/cartoon_57.html

²¹⁵ *Ibid.*, hlm 188-219

²¹⁶ *Ibid.*

²¹⁷ *Ibid.*

Perbedaan ini ditunjukkan oleh Pemerintahan Australia di bawah kekuasaan Perdana Menteri Paul Keating dan Perdana Menteri John Howard terutama terkait isu Timor Timur. Pada masa Keating, hubungan Australia lebih berorientasi ke Asia terutama Indonesia.²¹⁸ Hal ini ditandai dengan hubungan yang manis antara kedua negara, yang meskipun diselingi oleh beberapa konflik namun kedua negara tetap dapat menjalin hubungan yang baik.

Berbeda dengan Partai Buruh yang berorientasi ke Asia, koalisi Partai Liberal dan Partai Nasional memilih untuk berorientasi ke negara-negara Barat yaitu Amerika atau Inggris. Sikap Partai Liberal ini diambil karena masih dimilikinya rasa bahwa Australia merupakan bagian dari Negara Inggris atau Australia merupakan negara barat namun dengan letak geografis yang berada di wilayah Asia.²¹⁹ Bila Partai Liberal memimpin Australia, maka jelaslah bahwa kebijakan yang diambil akan selalu mengikuti negara panutannya, Inggris atau Amerika.

Sikap Partai Liberal yang cenderung memilih negara-negara barat sebagai panutannya, direfleksikan melalui pidato Perdana Menteri John Howard pidato yang ia sampaikan di depan Parlemen Australia, ia mengatakan bahwa Australia dan Indonesia sangatlah berbeda. Oleh karena itu, Australia tidak bisa disebut Asia namun Indonesia dan Asia masih tetap penting bagi Australia. Howard juga menyatakan bahwa Australia tidak akan menjadi jembatan bagi Asia dalam hubungannya dengan Eropa.²²⁰

Adanya perbedaan sikap yang diambil oleh Partai Buruh dan Partai Liberal, seringkali memberikan benturan-benturan antara Australia dengan Indonesia. Posisi Australia terhadap Indonesia sangat ditentukan oleh partai yang akan berkuasa di Australia, maka bila hubungan antara kedua negara berjalan baik atau buruk perlu diamati partai mana yang sedang berkuasa di Australia.

²¹⁸ Ikrar Nusa Bhakti. "Kilas Balik Hubungan Indonesia-Australia dan Prospeknya di Masa Datang". *Jurnal Harian CIDES*, No. 2, 1996.

²¹⁹ Hilman Adil. *Hubungan Australia Dengan Indonesia 1945-1962*. Jakarta: Djembatan, 1993, hlm 66.

²²⁰ "PM Defends Soft Line On Indonesia" *The Sydney Morning Herald*, Wednesday 18 September 1996, hlm 1.

b. Kepentingan Nasional Australia

Kepentingan Nasional Australia ikut mengambil peran penting dalam merumuskan kebijakan Australia terhadap Indonesia terkait Timor Timur. Kepentingan nasional Australia di wilayah Timor Timur, pada awalnya didasari untuk terciptanya keamanan di wilayah regional Australia yang sangat dekat batasnya dengan Timor Timur. Ketidakstabilan di wilayah Timor Timur, ditakutkan akan memberikan ketidakstabilan di wilayah Australia.²²¹

Akan tetapi, kepentingan Australia mulai bergeser ketika ditemukannya sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam di Celah Timor.²²² Penemuan sumber daya alam ini, merupakan salah satu dasar yang dari kebijakan politik non-intervensi terhadap Timor Timur yang dilaksanakan oleh Whitlam.²²³ Sumber daya alam yang terdapat di Celah Timor ini pula yang dapat mengubah kebijakan Perdana Menteri Fraser mengenai Timor Timur. Fraser yang pada awalnya menolak akan tindakan "invasi" Indonesia di wilayah Timor Timur mengubah sikapnya setelah adanya komunikasi diplomatik rahasia dari Duta Besar Australia untuk Jakarta Richard Woolcott kepada Perdana Menteri Whitlam.²²⁴

Dalam komunikasi tersebut, Woolcott menyatakan bahwa suatu perjanjian mengenai kandungan minyak di Laut Timor antara Australia dan Timor Timur (Celah Timor) lebih mudah dirundingkan dengan Indonesia daripada dengan Portugis atau dengan Timor Timur yang merdeka. Oleh karena itu, Fraser akhirnya memberikan pengakuan *de facto* atas integrasi Timor Timur ke Indonesia pada tahun 1978.²²⁵ Hal ini dilakukan Fraser juga untuk mencapai suatu kesepakatan antara Australia dan Indonesia mengenai Celah Timor.²²⁶

²²¹ Ikrar Nusa Bhakti. "Kilas Balik Hubungan Indonesia-Australia...."

²²² Tempo, 18 Oktober 1975.

²²³ Philips Kitley, Richard Chauvel., and David Reeve. *Australia Di Mata Indonesia: Kumpulan Artikel Pers Indonesia 1973-1988*. Jakarta: PT. Gramedia.1989. hlm 74.

²²⁴ Kristio Wahyono, *Ibid*, hlm. 115.

²²⁵ Alan Renouf. *Malcom Fraser And Australian Foreign Policy*. Sydney: Australian Professional Publications, 1986, hlm. 167.

²²⁶ Celah Timor atau *Timor Gap* merupakan suatu daerah lautan antara Timor, Indonesia, dan Australia. Daerah lautan ini belum menemukan kesepakatan antara Portugis dan Australia dalam menetapkan perbatasan ketika Timor Timur masih berada di dalam kekuasaan Portugis. Pada saat integrasi Timor Timur ke dalam wilayah Indonesia, Australia mulai melakukan beberapa perundingan untuk menetapkan batasan wilayah di daerah lautan tersebut. Ketertarikan Australia terhadap Celah Timor disinyalir karena ditemukan kandungan sumber daya alam berupa minyak dan gas dengan jumlah yang tidak sedikit. Untuk lebih lengkap lihat Ferdi Tanoni. *Skandal Laut*

IV.1.2. Faktor Eksternal

Selain faktor internal yang turut mengambil peranan dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan Australia terhadap Indonesia terkait isu Timor-Timur, terdapat pula beberapa faktor eksternal yang dianggap penting oleh Pemerintah Australia untuk menentukan kebijakannya terkait isu Timor Timur. Faktor-faktor eksternal inilah yang ikut mengambil peranan dalam perubahan sikap Australia terhadap Indonesia terutama pada tahun 1996-2002.

a. Muncul Isu HAM di Dunia

Perkembangan isu HAM di tingkat internasional sudah sangat pesat dan mengglobal, meskipun demikian PBB tidak memiliki cukup kekuatan untuk memaksakan suatu negara agar menerapkan HAM di dalam setiap kebijakan baik di dalam maupun luar negeri. Terintegrasinya HAM dalam suatu kebijakan luar negeri maka situasi suatu negara baik internal maupun eksternal akan memiliki pengaruh yang cukup besar. Dalam hubungan Australia-Indonesia terkait isu Timor Timur, isu HAM mulai diangkat pada saat John Howard menjabat sebagai Perdana Menteri Australia

Howard mulai mempermasalahkan pelanggaran HAM di Timor Timur bahkan juga mempersoalkan integrasi Timor Timur ke Indonesia tanpa mengingat adanya pengakuan Australia pada masa kepemimpinan Bob Hawke tahun 1985. Perubahan kebijakan Australia ini, dianggap sebagai suatu penyesuaian yang dilakukan oleh Australia untuk menyesuaikan kebijakan luar negerinya dengan tuntutan dunia internasional yang dalam hal ini adalah HAM.²²⁷

b. Sikap Amerika Dalam Isu Timor Timur

Ideologi Komunisme yang berkembang di negara-negara Indocina pada tahun 1975 dan politik dekolonisasi yang dilaksanakan oleh Portugis di Timor Timur, menimbulkan kekhawatiran negara-negara blok Barat akan unsur Komunis di Timor Timur. Oleh karena itu, Amerika mengambil sikap dengan mendukung "invasi" yang dilakukan oleh Indonesia ke Timor Timur. Sikap Amerika ini

Timor: Sebuah Barter Politik-Ekonomi Canberra-Jakarta?. Jakarta: Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB), 2008.

²²⁷ Ikrar Nusa Bhakti. "Kilas Balik Hubungan Indonesia-Australia...."

ditanggapi baik oleh Australia, yang pada saat itu juga khawatir akan hadir negara Komunis di Asia.²²⁸ Dukungan Amerika dan Australia terlihat dengan sebuah serangan yang dilakukan oleh Indonesia, kurang dari 24 jam kunjungan Presiden Amerika Gerald Ford dan Menteri Luar Negeri Amerika Henry Kissinger meninggalkan Jakarta. Akan tetapi, dukungan Amerika ini hanya berupa dukungan moral bagi pasukan Indonesia yang akan melakukan serangan pada tanggal 7 Desember 1975.²²⁹

Dukungan Amerika disebabkan oleh pandangan bahwa kehadiran Indonesia yang pro-barat di Timor Timur akan lebih baik dibandingkan bila wilayah tersebut jatuh ke pihak-pihak yang berhaluan kiri. Dukungan Amerika pun diberikan pada saat Portugis mendesak pembahasan Timor Timur di dalam agenda sidang Majelis Umum PBB. Sikap Amerika terus mendukung Indonesia dengan menentang pembahasan Timor Timur di Mahkamah Internasional.²³⁰ Kebijakan Amerika mulai berubah pada tahun 1999, dengan semakin maraknya isu HAM di dunia internasional. Perubahan sikap Amerika ini diikuti pula oleh sekutunya, Australia.

Pada tanggal 12 Januari 1999, Australia mengambil sikap yang mendukung terlaksananya *self-referendum* di Timor Timur. Akan tetapi sikap Australia ini ditanggapi dingin oleh Amerika, Amerika lebih memilih sikap untuk tidak terlibat langsung ke dalam Timor Timur.²³¹ Bagi Amerika, Australia-lah yang seharusnya memikul tanggung jawab utama untuk menuntaskan proses kemerdekaan di Timor Timur. Keengganan Amerika juga terlihat dengan mengesampingkan desakan pengiriman pasukan penjaga perdamaian PBB ke Timor Timur, dalam hal ini Amerika melihat bahwa keamanan di wilayah tersebut merupakan tanggung jawab dari Indonesia.²³²

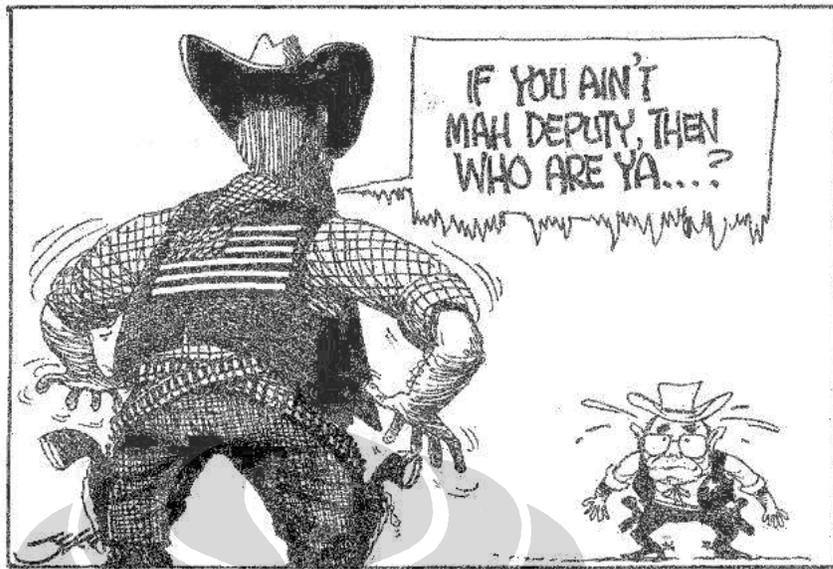
²²⁸ *Ibid.*

²²⁹ Joseph Nevins. *Pembantaian Timor Timur: Horor Masyarakat Internasional*. Yogyakarta: Galangpress, 2008. hlm 101.

²³⁰ *Ibid*

²³¹ Kristio Wahyono, *Ibid*, hlm. 115.

²³² *Ibid*



Gambar 4.2
Geoff Hook, "Draw"

Sumber: www.geoffhook.com/archive/get_archived67y2.html?image=1976/10/jeff111076&ref=politics/asia

Sikap Amerika, membuat Australia berasumsi bahwa Amerika memberikan lampu hijau untuk memimpin pasukan perdamaian PBB di Timor Timur. Hal ini disebabkan oleh adanya dukungan Amerika terhadap Australia dengan menyediakan peralatan tempur untuk keperluan di Timor Timur.²³³ Selain itu, Amerika juga memberikan tekanan secara ekonomi kepada Indonesia, bila Indonesia tidak segera mengembalikan ketentraman di Timor Timur dan mengizinkan Australia memimpin pasukan internasional untuk menjaga perdamaian di Timor Timur.

Perubahan sikap Australia terhadap Indonesia ini, didasari oleh perubahan sikap yang ditunjukkan oleh Amerika. Perubahan Australia tidak akan terjadi bila Amerika menolak pengiriman tentara ke Timor Timur, dengan demikian Australia pun akan berpikir terlebih dahulu untuk mengubah kebijakannya. Orientasi politik yang diambil oleh John Howard dengan cenderung mengikuti Amerika, semakin mengukuhkan posisi Australia sebagai "Deputi Sheriff" Amerika untuk wilayah Asia.

²³³ *Ibid.*

c. Situasi dan Kondisi di Indonesia



Gambar 4.3

Burial of Australia's Policy of 25 Years

Sumber : http://www.nicholsoncartoons.com.au/cartoon_48.html

Pada saat rezim Soeharto turun dan digantikan oleh BJ. Habibie, terjadi beberapa hal penting yang berubah di dalam Pemerintah Australia mengenai Timor Timur. Perubahan kebijakan Pemerintah Australia adalah salah satunya adalah kebijakan terhadap Timor Timur yang telah dijalankan selama 24 tahun. Kebijakan ini disebabkan oleh kebijakan yang diambil oleh Whitlam pada masa kepemimpinannya, hal tersebut selalu menjadi dasar bagi perdana menteri selanjutnya untuk menjalankan kebijakan di Timor Timur.²³⁴

Perubahan kebijakan Australia yang mendukung pelaksanaan *self-referendum*, dianggap sebagai sebuah pengkhianatan oleh Indonesia. Pemerintah Australia melihat bahwa kemerdekaan Timor Timur dapat menjadi sebuah solusi politik yang seringkali mengganggu hubungan harmonis antara Australia dengan Indonesia.²³⁵ Keputusan Australia ini juga dipertegas oleh Pernyataan Menteri Luar Negeri Australia, Alexander Downer, yang menyatakan bahwa Jakarta tidak

²³⁴ Michael E. Salla. "Australian Foreign Policy And East Timor", *Australian Journal Of International Affairs*, Vol. 49, No. 2, November 1995, hlm 233.

²³⁵ Paul Cleary. "Australia's 'Free Timor' Switch Angers Jakarta". *Sydney Morning Herald*, 13 Januari 1999.

memiliki pilihan lain selain menerima pelaksanaan *self-determination* di Timor Timur jika Indonesia menginginkan konflik yang terjadi selama 24 tahun berakhir.²³⁶

Keputusan ini diambil oleh Australia dengan harapan bahwa ketika *self-referendum* dilaksanakan, rakyat Timor Timur akan memilih untuk tetap berada di wilayah Indonesia. Hal ini ditandai dengan adanya pernyataan dari Downer di Radio BBC pada tanggal 1 Februari 1999, ia mengatakan bahwa hal terbaik bagi Timor Timur adalah suatu bentuk otonomi dan Australia lebih suka bila Timor Timur tetap menjadi wilayah otonomi Indonesia.²³⁷ Hal ini juga ditegaskan oleh Howard bahwa Timor Timur sebaiknya memilih bentuk otonomi dengan Indonesia daripada berdiri sendiri, karena bila Timor Timur merdeka akan merepotkan bagi negara donor seperti Australia.

IV.2. DAMPAK PERUBAHAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI AUSTRALIA

Perubahan kebijakan Australia ini mendapatkan respon yang positif dari masyarakatnya, namun Indonesia melihat perubahan tersebut sebuah pengkhianat Australia. Perubahan yang dilakukan Australia ini menimbulkan beberapa ketegangan hubungan diplomasi antara kedua negara, di Indonesia, terjadi demonstrasi di depan kedutaan besar Australia dan penolakan impor barang-barang yang berasal dari Australia. Di Australia pun terjadi penolakan buruh kapal Australia untuk memuat barang-barang yang akan dikirim ke Indonesia, serangan terhadap kedutaan besar dan Konsulat Indonesia serta penyerangan terhadap warga negara Indonesia di Australia.

Perubahan sikap Australia ini, tidak hanya mendapatkan reaksi negatif dari Indonesia tetapi juga mendapatkan reaksi yang cukup keras dari DFAT (*Departement of Foreign Affairs*). Reaksi ini disebabkan oleh kekhawatiran DFAT terhadap keamanan wilayah regional Australia yang dapat terganggu oleh

²³⁶ Don Greenlees dan Robert Garran. 'Timor Switch Sparks Row'. *The Australian*, 13 Januari 1999.

²³⁷ "Menteri Luar Negeri Alexander Downer: Otonomi Pilihan Terbaik Bagi Timor Timur", *Suara Pembaruan*, Selasa 2 Februari 1999. Lihat juga dalam "Australia Fears Free Timor May Fracture Indonesia", *The Jakarta Post*, 4 Februari 1999.

kehadiran Timor Timur yang merdeka dan belum mampu untuk menjaga pertahanan serta keamanan di negaranya.²³⁸



. Gambar 4.4

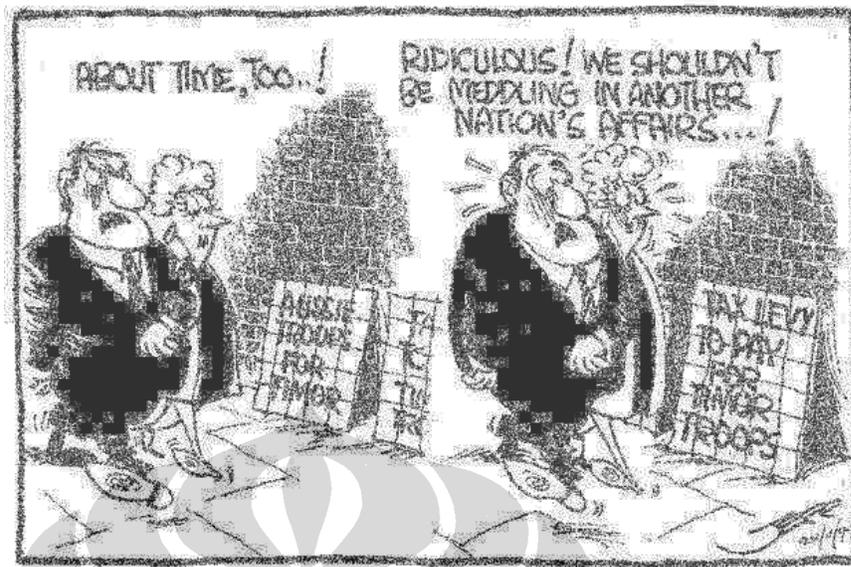
Peter Nicholson, tanpa judul

Sumber : http://www.nicholsoncartoons.com.au/cartoon_66.html

Meskipun masyarakat Australia mendukung perubahan kebijakan Howard, akan tetapi dampak dari perubahan sikap Australia pun dirasakan oleh masyarakatnya. Sejak Australia mendukung pelaksanaan *self-determination* di Timor Timur dengan pengiriman bantuan 3000 personel angkatan bersenjata dan personel sipil ke Timor Timur. Pengiriman personel ini sebagai bagian dari Pasukan Perdamaian PBB dan di bawah naungan Bendera PBB.²³⁹ Australia menaikkan pajak sementara untuk biaya bagi Pasukan Australia di Timor Timur

²³⁸ ²³⁸ Ikrar Nusa Bhakti. "Kilas Balik Hubungan Indonesia-Australia...."

²³⁹ Ikrar Nusa Bhakti. "Kilas Balik...", hlm 195.



Gambar 4.5

Geoff Hook, "Peacekeeping Takes Its Toll"

Sumber: www.geoffhook.com/archive/get_archived67y2.html?image=1976/10/jeff111076&ref=politics/asia

Pajak yang diberlakukan sementara tersebut, digunakan oleh Australia untuk membiayai operasi perdamaian di Timor Timur. Hal ini tentu saja mendapatkan reaksi yang negatif dari masyarakat Australia, meskipun kemerdekaan Timor Timur merupakan harapan dari sebagian besar masyarakat Australia yang merasa memiliki hutang atas bantuan rakyat Timor Timur kepada Pasukan Australia pada Perang Dunia II.²⁴⁰

Evolusi sikap Australia dalam Timor Timur secara tegas dibatasi oleh kebijakan yang pertama kali dikemukakan oleh Perdana Menteri Gough Whitlam, sehingga segala kebijakan yang diterapkan oleh perdana menteri-perdana menteri setelahnya akan selalu menjalankan kebijakan yang telah dilakukan oleh Whitlam tersebut.

²⁴⁰ Paul Cleary. "Australia's 'Free Timor' Switch Angers Jakarta". *Sydney Morning Herald*, 13 Januari 1999

BAB V

KESIMPULAN

Australia dan Indonesia merupakan dua negara bertetangga yang sangat berbeda, mulai dari suku bangsa, bahasa, agama, sejarah, dan kebudayaan. Perbedaan-perbedaan inilah yang seringkali menjadi kendala dalam terciptanya hubungan bertetangga yang harmonis.

Awalnya hubungan kedua negara bertetangga ini menghasilkan hubungan yang manis, hal ini dibuktikan dengan adanya dukungan dari Australia pada saat Indonesia memperjuangkan kemerdekaannya. Akan tetapi, hubungan manis ini seringkali harus terusik oleh berbagai masalah baik masalah di dalam negeri masing-masing hingga masalah di luar negerinya.

Salah satu isu yang cukup menyita perhatian kedua negara selama kurang lebih 23 tahun adalah isu Timor Timur. Isu Timor Timur mulai menjadi fokus perhatian kedua negara ketika adanya kudeta yang terjadi di Portugis, yang mengakibatkan berakhirnya masa kolonialisme Portugis di Timor Timur. Berakhir kekuasaan Portugis di Timor Timur, membuat daerah tersebut tidak stabil. Dengan adanya perbedaan pendapat dari masing-masing partai politik yang berdiri di Timor Timur, mengenai penentuan nasib sendiri bagi rakyat Timor Timur.

Adanya perbedaan pendapat antara rakyat Timor Timur tersebut, menyebabkan semakin tidak stabilnya situasi di daerah Timor Timur. Melihat hal ini, Australia mulai mendukung integrasi Timor Timur ke Indonesia. Kebijakan yang diambil Australia untuk mendukung segala kebijakan Indonesia terhadap Timor Timur, dimaksudkan agar terciptanya keamanan dan kestabilan di wilayah Australia dan Timor Timur.

Meskipun demikian, kebijakan Australia pada masa kepemimpinan Gough Whitlam untuk mendukung penuh segala tindakan Indonesia di Timor Timur, tidak serta merta mendapatkan persetujuan dari berbagai kalangan baik dari Partai Buruh ataupun dari Partai Liberal sebagai Oposisi. Kebijakan Whitlam bahkan dikecam oleh sebagian besar anggota pemerintah dan masyarakat Australia.

Akan tetapi, kebijakan yang telah diambil oleh Whitlam di atas selalu

menjadi kebijakan bagi Perdana Menteri-Perdana Menteri Australia selanjutnya. Hal ini terlihat dari kebijakan Pemerintahan Fraser yang semula menentang kebijakan Whitlam terhadap Indonesia, kemudian berubah menjadi kebijakan yang juga mendukung tindakan Indonesia di Timor Timur. Dukungan Australia terhadap Indonesia semakin jelas terlihat dengan adanya pengakuan secara *de facto* maupun *de jure* atas integrasi Timor Timur ke dalam wilayah Indonesia.

Kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Australia selalu mendapatkan tanggapan dari masyarakatnya, salah satu media untuk mengutarakan pendapat mereka adalah melalui kartun politik yang umumnya ada di dalam kolom editorial sebuah surat kabar.

Berbeda dengan Australia yang masyarakatnya telah mengenal kartun politik yang penuh dengan sindiran sebagai bagian dari budaya politiknya, masyarakat Indonesia tidak terlalu memiliki sejarah yang kuat dalam kartun politik. Sehingga sebuah kartun politik yang dianggap biasa menurut Australia bisa menimbulkan respon dengan keras dari Indonesia.

Dalam hubungan Australia-Indonesia sejak tahun 1945, tidak sedikit kartun politik yang telah dihasilkan untuk menggambarkan hubungan kedua negara berdasarkan pada kebijakan yang diambil oleh masing-masing negara. Salah satu isu yang paling signifikan untuk topik kartun politik di sebuah surat kabar adalah isu Timor Timur.

Isu Timor Timur menjadi beban politik luar negeri Australia dan juga Indonesia, disamping karena letak geografis kedua negara yang berdekatan tetapi juga adanya ikatan antara rakyat Timor Timur dengan Australia pada Perang Dunia II. Pada masa Perang Dunia II, Australia memutuskan untuk mengirimkan pasukannya ke Timor Timur untuk menghalau masuknya Jepang ke dalam daerah tersebut, akan tetapi kedatangan pasukan Australia ini justru berakibat banyaknya rakyat Timor Timur yang tewas karena melindungi pasukan Australia.

Isu Timor Timur terus diangkat oleh media Australia bahkan simpatisan Timor Timur di Australia juga memiliki peranan yang kuat dalam mengkampanyekan Timor Timur. Walaupun demikian, dukungan Australia terhadap Indonesia untuk memasukkan Timor Timur menjadi bagian dari wilayah Indonesia lebih kuat dibandingkan perasaan hutang tersebut.

Isu Timor Timur juga merupakan topik yang diangkat oleh para kartunis politik untuk menggambarkan kartun politiknya. Tercatat banyak kartun politik yang menggambarkan hubungan Australia-Indonesia atau mengenai kebijakan Australia terhadap Timor Timur.

Kartun politik di Australia merupakan salah satu senjata ampuh untuk mengeluarkan pendapat terhadap pemerintahan Australia. Hal ini karena sifatnya yang lucu, penuh humor, namun tetap membawa unsur kritik di dalamnya. Kartun politik bisa saja dinikmati oleh masyarakat umum yang tidak ingin terlibat terlalu dalam pada masalah politik karena hanya dengan melalui visualisasi penggambaran, bisa langsung dinikmati oleh pembacanya.

Kartun politik di Australia, tidak hanya memberikan gambaran mengenai kebijakan Pemerintah Australia yang berubah-ubah terhadap Timor Timur, namun juga dapat memberikan kepada kita sebagai pembaca, pandangan baru ataupun dapat melihat pandangan masyarakat Australia melalui kartun politik. Seringkali kartun politik yang dipublikasikan adalah kartun politik yang anti-pemerintah

Melalui ungkapan kartun editorial dapat difahami bagaimana hubungan media dengan masyarakat, dengan pemerintah, dan dapat dipelajari budaya komunikasi masyarakat pada tempat dan saat tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

SUMBER PRIMER

Dokumen

Commonwealth Parliamentary Debates: House of Representative, 18 July 1944.

Majalah dan Surat Kabar

Kompas, Ikrar Nusa Bhakti, "Kunjungan Keating Memperkukuh Hubungan Bertetangga", 20 April 1992.

-----, Vinsensio Dugis, 'Pergantian Kepemimpinan Oposisi Australia, Prospek Hubungan Indonesia-Australia', 20 Februari 1995.

-----, "Soeharto-Howard Sepakat Hubungan Baik Jadi Kepentingan Bersama", 18 September 1996.

-----, "Australia Jalankan Keterlibatan Konstruktif Dalam Soal Timor Timur", 16 April 1996.

Jawa Pos, "Australia Pertanyakan Personel ABRI Di Timor Timur", Sabtu 31 Oktober 1998

Media Indonesia, Prof. Dr. Hasyim Djalal, "Masa Depan Timor Timur". Maret 1999.

Rakyat Merdeka, "Australia Berutang Darah Pada Indonesia". 21 September 1999.

Republika, "Kisah Integrasi Timor Timur", 14 Oktober 1999.

Suara Karya, Ronald Nangoi, "Menerobos Kesulitan Hubungan Australia-Indonesia", 3 Juni 1983.

-----, "Dulu Australia Dukung Integrasi Timtim, Karena Khawatir Lahirnya Negara Komunis", 2 Maret 1999.

Suara Pembaruan, "Menteri Luar Negeri: Tak Mungkin Memberikan Tahanan Rumah Kepada Xanana", Selasa 26 Januari 1999.

-----, "Timor Timur Dilepas Bila Status Khusus Otonomi Luas Ditolak", Kamis 28 Januari 1999.

-----, "Menteri Luar Negeri Alexander Downer: Otonomi Pilihan Terbaik Bagi Timor Timur", Selasa 2 Februari 1999.

-----, "Sebuah Serangan: 7 Desember 1975", 16 Februari 1999.

-----, "Downer Menapik Membanjirnya Pengungsi Timor Timur Ke Australia", Minggu 21 Februari 1999.

The Age, Niki Savva, "PM Sidesteps Human Rights Issue", Wednesday 18 September 1996.

The Australian, Don Greenlees dan Robert Garran. 'Timor Switch Sparks Row'. 13 Januari 1999

The Jakarta Post, 20,22,23 Agustus 1985.

-----, "Australia Fears Free Timor May Fracture Indonesia", 4 Februari 1999.

The Sydney Morning Herald, "New Search For Answer On Balibo Five", 17 Oktober 2005.

-----, "PM Defends Soft Line On Indonesia", Wednesday 18 September 1996.

-----, Paul Cleary. "Australia's 'Free Timor' Switch Angers Jakarta". 13 Januari 1999.

SUMBER SEKUNDER

Buku

Adil, Hilman. *Hubungan Australia Dengan Indonesia 1945-1962*. Jakarta: Djambatan, 1993.

-----, *Kebijaksanaan Australia Terhadap Indonesia 1962-1966 : Studi Kasus Keterlibatan Australia Dalam Konflik Bilateral*. Jakarta : CSIS. 1997.

Brotoatmodko et al. *Demokrasi Dan Ham Dalam Kartun Pers*. (1st ed). Jakarta: Institut ECATA-INPI-PACT, 1997.

Callinan, Bernard. *Independent Company*. Victoria: William Heinemann Australia, 1989.

Evans, Gareth, and Bruce Grant. *Australia's Foreign Relation In The World Of 1990's*. Australia: Melbourne University Press, 1991.

- Fischer, Tim. *Ballot and Bullet: Seven Days in East Timor*. Australia: Allen and Unwin, 2000.
- Forrester, Geoff. *Et.al* (ed). *Indonesia Masa Transisi, Persepsi media Indonesia & Australia*. Jakarta : Australian Studies Centre Publishing, 2001.
- George, Margareth., Wardah Hafidz., and Hermawan Sulisty. *Australia Dan Revolusi Indonesia*. Jakarta: Pantja Simpati, 1986.
- Goodall, Peter. *High Culture Popular Culture*. Australia: Allen and Unwin, 1995.
- Hamid, Zulkifli. *Sistem Politik Australia*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999.
- Hill, Helen. *The Timor Story*. Victoria: Timor Information Service, 1976.
- Hou, Charles, and Cynthia. *The Art of Decoding Political Cartoons: A Teacher Guide*. Vancouver: Moody's Lookout Press, 1998.
- Jolliffe, Jill. *Cover-Up: The Inside Dtory of The Balibo Five*. Melbourne: Scribe Publications. 2001.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia* (2nd ed.). Jakarta, 2007.
- Kitley, Philips., Richard Chauvel., and David Reeve. *Australia Di Mata Indonesia : Kumpulan Artikel Pers Indonesia 1973-1988*. Jakarta: PT. Gramedis, 1989,
- Lockwood, Rupert. *Armada Hitam*. Jakarta: Gunung Agung, 1975.
- Neonbasu, Gregor. *Peta Politik Dan Dinamika Pembangunan Timor Timur*, Jakarta: Yanense Mitra Sejati, 1997, hlm.40.
- Nevins, Joseph. *Pembantaian Timor Timur: Horor Masyarakat Internasional*. Yogyakarta: Galangpress, 2008.
- Nicol, Bill. *Timor: A Nation Reborn*. Jakarta: Equinox Publishing. 2002.
- Nimmo, Dan. *Komunikasi Politik, Komunikator, Pesan, Dan Media*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993.
- Phillippe, Robert. *Political Graphics: Art As A Weapon*. New York: Abbeville Press, 1980.
- Renouf, Alan. *Malcolm Fraser And Australian Foreign Policy*, Sydney: Australian Professional Publications, 1986.

Sibarani, Augustin. *Karikatur Dan Politik*. Jakarta: ISAI-Garba Budaya-PT. Media Lintas Inti Nusantara, 2001.

Singh, Bilveer. *The United Nations, Role In The Birth of Independent East Timor, A Blunder?*. Singapore: Crescent Design Associates, 1999.

Soesastro, Hadi, and Tim McDonald, ed. *Diverse Cultures, Converging Interest*. Jakarta: CSIS, 1995.

Sobur, Alex. *Semiotika Komunikasi*. (1st ed.). Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003.

------. *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotika, dan Analisis Framing*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001.

Stephen, Becker. *Comic Art In United States*. USA: Simon & Schuster, 1959.

Tanoni, Ferdi. *Skandal Laut Timor: Sebuah Barter Politik-Ekonomi Canberra-Jakarta?*. Jakarta: Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB), 2008.

Tomodok, E.M. *Hari-Hari Akhir Timor Portugis*. (2nd ed.). Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1996.

Wahyono, Kristio. *Sepuluh Tahun Tragedi Di TimTim: Timor Target*. Banda Aceh: Krueng Aceh, 2009.

Wijana, I Dewa Putu. *Kartun: Studi Tentang Permainan Bahasa*. Yogyakarta: Ombak, 2004.

Internet

www.adbonlien.anu.edu.au. Diunduh pada tanggal 23 April 2010, pukul 15.45 wib

<http://animals.nationalgeographic.com/animals/invertebrates/portuguese-man-of-war/>. Diunduh pada tanggal 11 Juni 2010, pukul 17.14 wib.

www.api-network.com. Diunduh pada 21 Maret 2010, pukul 13.25 wib.

http://www.aph.gov.au/library/pubs/monographs/Kendall/Chapter_one.htm. Diunduh pada 6 Mei 2010, pukul 03.22 wib.

www.bappenas.go.id/get-file-server/node/6418. Diunduh pada tanggal 11 Juni 2010, pukul 13.10 wib.

www.cultureandrecreation.gov.au/articles/cartoons. Diunduh pada 19 Maret 2010, pukul 22.21 wib

www.dfat.com/sharpe13199.htm

www.geoffhook.com/archive/get_archivef672.html?image=1976/10/jeff111076&ref=politics/asia. Diunduh pada 9 Juni 2010, pukul 04.51 wib.

http://lcweb2.loc.gov:8081/learn/features/political_cartoon/cag.html. Diunduh pada tanggal 3 Juni 2010, pukul 04.48 wib.

<http://libcom.org/history/articles/great-london-dock-strike-1889>. Diunduh pada tanggal 10 Juni 2010, pukul 03.03 wib.

www.nicholsoncartoons.com.au/. Diunduh pada 28 April 2010, pukul 22.20 wib.

www.nishi.slv.vic.gov.au/latrobejournal. Diunduh pada tanggal 29 April 2010, pukul 16.47 wib.

www.nma.gov.au/education/school_resources/websites_and_interactives/political_cartoons_interactive_activities/interview_a_cartoonist/. Diunduh pada tanggal 22 April 2010, pukul 13.22 wib.

www.punch.co.uk/cartoonhistory02.html. Diunduh pada 19 Maret 2010, pukul 22.35 wib.

www.spartacus.schoolnet.co.uk/jdyson. Diunduh pada tanggal 25 April 2010, Pukul 11.55 wib.

www.theage.com.au. Diunduh pada tanggal 22 April 2010, Pukul 14. 21 wib.

<http://www.thomasnast.com/default.htm>. Diunduh pada tanggal 9 Juni 2010, pukul 06.31 wib.

www.victorianweb.org/history/hist1.html. Diunduh pada tanggal 26 April 2010, pukul 19.48 wib.

“Karikatur dan Presiden” dalam <http://www.vision.net.id>. Diunduh pada tanggal 19 Maret 2010, pukul 22.47 wib.

<http://www.walkleys.com/aboutwalkleyfoundation>. Diunduh pada tanggal 11 Juni 2010, pukul 11.13 wib



Lampiran 1.1



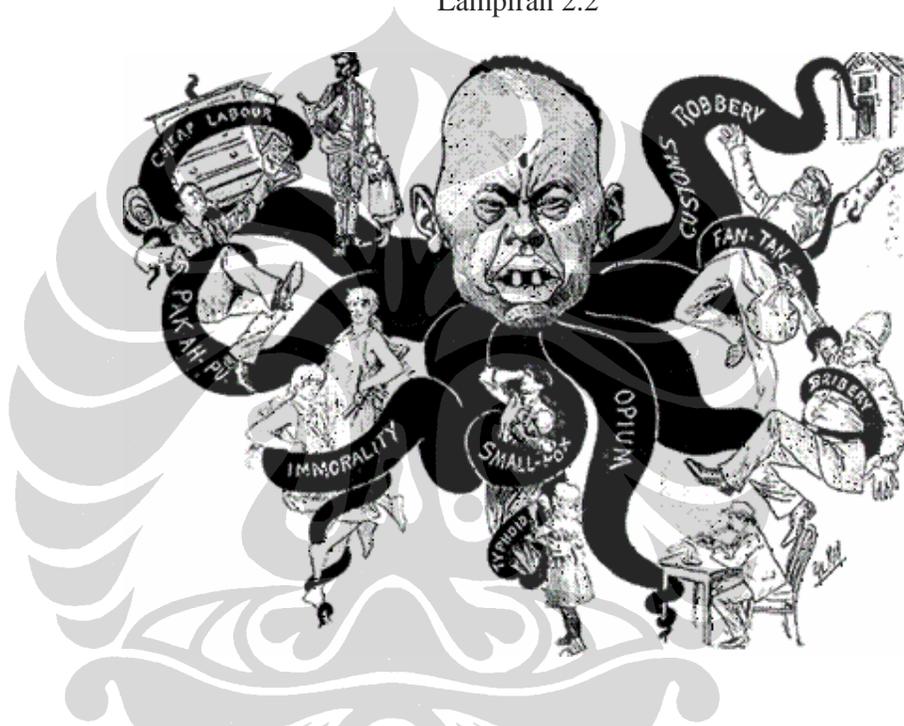
Sumber: Margaret George. *Australia Dan Revolusi Indonesia*. Jakarta : Pantja Simpati, 1986. hlm 236

Lampiran 2.1



John Leech, 'Substance And Shadow'
Dipublikasikan pada tahun 1834 oleh Majalah *Punch*, Inggris.
Sumber : www.punch.co.uk/cartoonhistory02.html
Diunduh pada 19 Mei 2010. Pukul 22.21 WIB

Lampiran 2.2



Phil May, 'The Mongolian Octopus'.

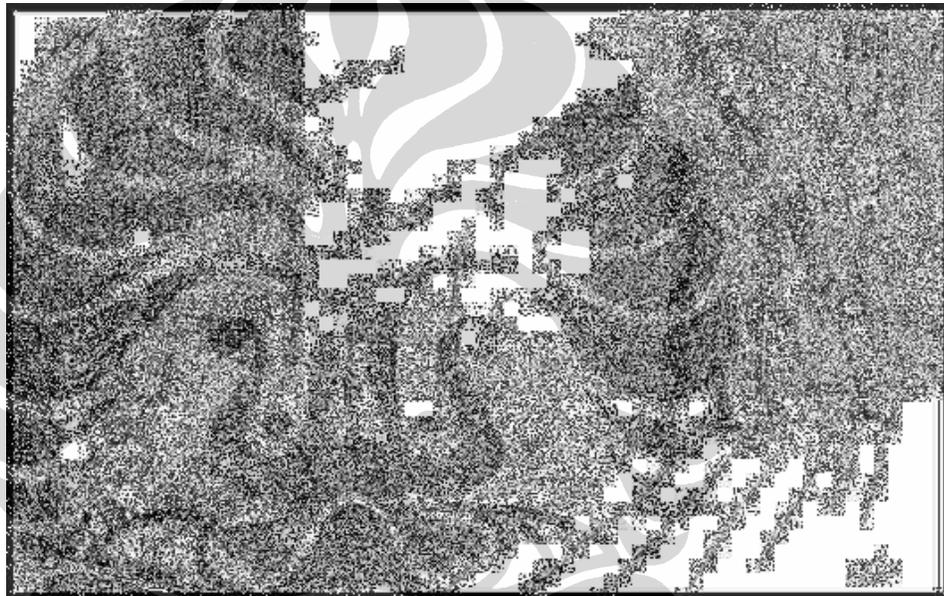
Dipublikasikan pada 21 Agustus 1886 oleh *The Bulletin*

Sumber :

http://www.aph.gov.au/library/pubs/monographs/Kendall/Chapter_one.htm

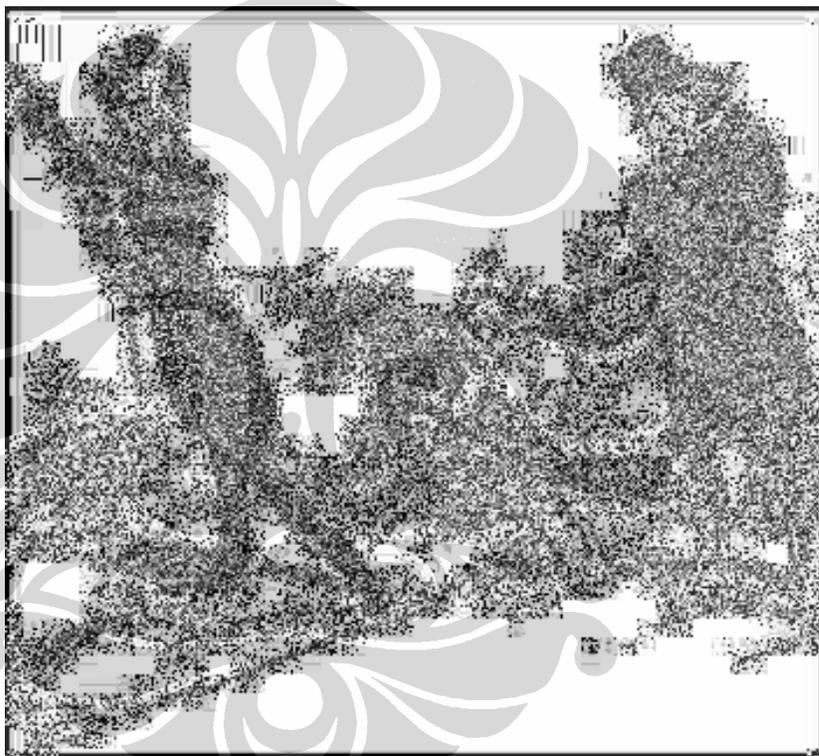
Diunduh pada 6 Mei 2010. Pukul 3.22 WIB

Lampiran 2.3



Livingston Hopkin, 'The Secret of England's Greatness : 5d per hour'
Dipublikasikan pada bulan Agustus 1989 oleh *The Bulletin*
Sumber: <http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/TUdockers.htm>
Diunduh pada 6 Mei 2010. Pukul 3.39 WIB

Lampiran 2.4



Will Dyson 'Ramsay MacDonald'
Dipublikasikan pada tahun 1913 oleh *Daily Herald*
Sumber: www.spartacus.schoolnet.co.uk/jdyson
Diunduh pada 7 April 2010. Pukul 19.51

Lampiran 2.5



Will Dyson 'Peace And Future Cannon Fodder'
Dipublikasikan pada tahun 1920 oleh *Daily Herald*
Sumber: <http://www.schoolhistory.co.uk/year9links/versailles.shtml>
Diunduh pada 12 Mei 2010. Pukul 18.32

Lampiran 2.6



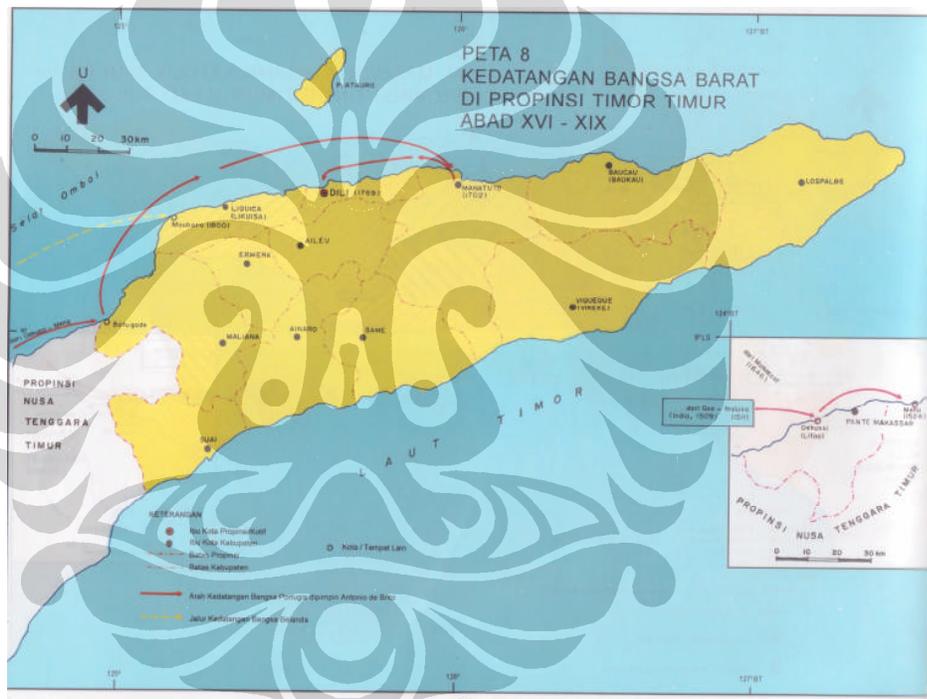
David Low '*Peace On Earth*'
Dipublikasi pada 18 April 1918 oleh *The Bulletin*
Sumber : www.nishi.slv.vic.gov.au/latrobejournal
Diunduh pada 12 Mei 2010. Pukul 18.51

Lampiran 2. 7



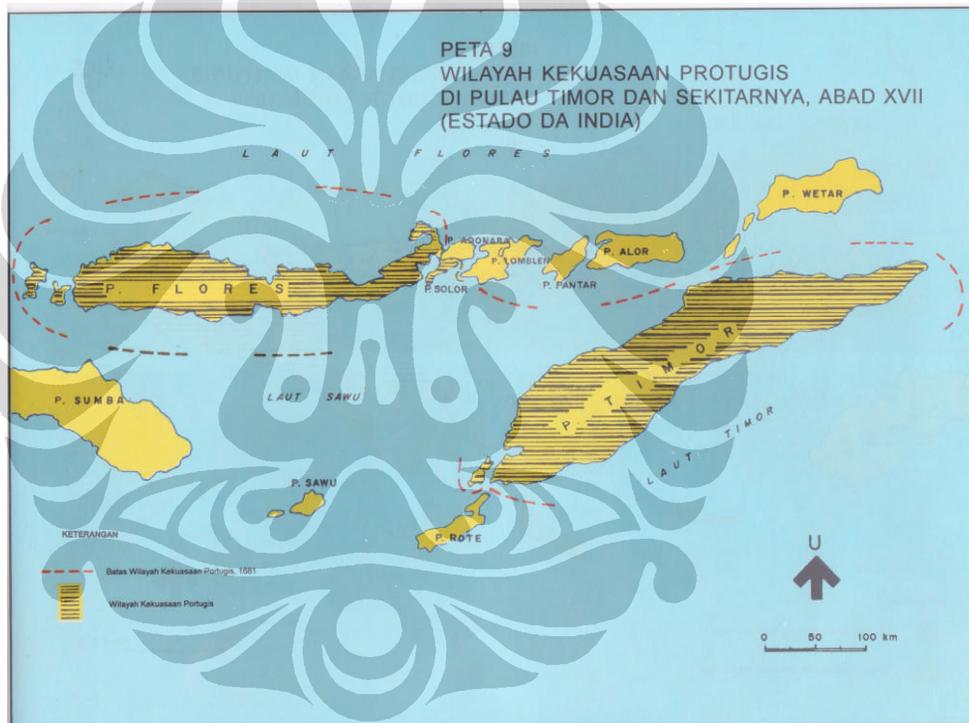
Peter Nicholson. '*Gough and Margaret Whitlam caught in an earthquake in China*', Dibuat pada tahun 1976, kartun ini tidak dipublikasikan
Sumber: <http://www.nicholsoncartoons.com.au/about.php>
Diunduh pada 28 April 2010. Pukul 22.20 WIB

Lampiran 3.1

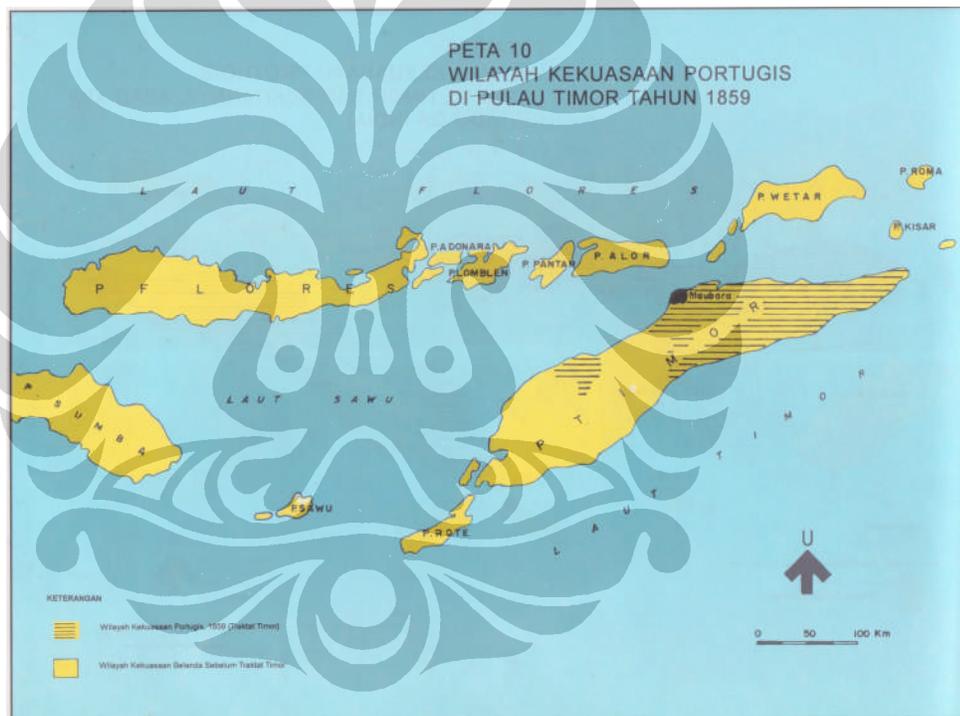


ta Sejarah Propinsi Timor Timur. Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan RI Jakarta, 1996. Hlm. 9

Lampiran 3.2



Lampiran 3.3



Lampiran 3.4

